



LAPORAN AKHIR PENGAWASAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
Sekretariat : JL. Indra Giri Nomor 01 Padang Harapan Kota Bengkulu

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. TUJUAN LAPORAN.....	5
C. LANDASAN HUKUM.....	5
D. SISTEMATIKA LAPORAN.....	7
BAB II.....	8
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN.....	8
A. PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH.....	8
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih.....	8
2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih Dan Daftar Pemilih.....	11
3. Hasil-Hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih.....	16
4. Dinamika Dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih.....	17
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih.....	18
B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK.....	18
1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub Verifikasi Partai Politik.....	18
2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik.....	21
3. Hasil-hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik.....	48
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik..	50
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Verifikasi Partai Politik.....	51
C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon Anggota DPD/DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.....	52
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Anggota DPD/DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.....	52
2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Anggota DPD/DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.....	55

3. Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	67
4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota	68
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.....	69
a. Evaluasi	69
b. Masukan.....	69
1) Rekomendasi kepada KPU Provinsi Bengkulu.....	69
Pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD di Provinsi Bengkulu hendaknya langsung bertemu dengan yang bersangkutan sehingga dapat dikonfirmasi dukungan yang diberikan.	69
2) Rekomendasi kepada Peserta Calon perseorangan	69
Kepada peserta Pemilu 2019 calon perseorangan (DPD) menyampaikan dukungan menggunakan data yang akurat sehingga pada saat verifikasi dukungan tidak terdapat dukungan yang tidak memenuhi syarat.	69
3) Masukan Kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu.....	69
Terkait pengawasan, Bawaslu Provinsi Bengkulu sebaiknya mengadakan BIMTEK terkait pengawasan kepada Koordinator divisi dan staf se- Kabupaten/Provinsi Bengkulu sehingga terjadi keseragaman baik dalam teknis atau pelaporan pengawasan.	69
D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye.....	70
1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye.....	70
2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan Kampanye..	73
3. Hasil-hasil Pengawasan tahapan subtahapan Kampanye.....	83
4. Dinamika dan permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye	88
5. Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye	89
E. PELAKSANAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE	105
1. Pelaksanaan Pengawasan.....	105
2. Kegiatan Pengawasan.....	107
F. PELAKSANAAN PENGAWAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA.....	117
1. Pelaksanaan Pengawasan:.....	117
2. Kegiatan Pengawasan.....	122
3. Hasil-hasil pengawasan	159
4. Dinamika dan Permasalahan	159
5. Evaluasi dan Permasalahan.....	176
G. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN ASN.....	192
1. Pelaksanaan Pengawasan.....	192

2.	Kegiatan Pengawasan.....	193
3.	Hasil-hasil Pengawasan.....	194
4.	Dinamika dan Permasalahan.....	194
5.	Evaluasi dan Permasalahan.....	194
H.	PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITIK UANG.....	195
1.	Pelaksanaan Pengawasan.....	195
2.	Kegiatan Pengawasan.....	195
3.	Hasil-hasil Pengawasan.....	197
4.	Dinamika dan Permasalahan.....	197
5.	Evaluasi dan Permasalahan.....	197
I.	PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITISASI SARA.....	197
1.	Pelaksanaan Pengawasan.....	197
2.	Kegiatan Pengawasan.....	198
3.	Hasil-hasil Pengawasan.....	198
4.	Dinamika dan Permasalahan.....	199
5.	Evaluasi dan Permasalahan.....	199
BAB III		
PENUTUP.....		200
A.	Kesimpulan.....	200
B.	Rekomendasi.....	201

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Sesuai dengan Pasal 1 undang-undang 7 tahun 2017 yang dimaksud dengan: Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, selanjutnya Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan umum sebagai implementasi demokrasi telah digunakan hampir sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, yang merupakan negara heterogen. Indonesia telah melakukan pemilihan umum sebanyak 12 kali. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis, juga mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tonggak tegaknya demokrasi, di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan.

Tahun 2019 adalah momentum bersejarah bagi Bawaslu untuk mengawal Pemilu agar berjalan sesuai perintah Undang-Undang, di sisi lain keterlibatan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting bagi Bawaslu sesuai dengan motto Bawaslu “ *Bersama Rakyat Awasi Pemilu Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu* . Dari uraian diatas maka penting bagi Bawaslu Provinsi

Bengkulu untuk membuat laporan akhir pengawasan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi institusi Bawaslu kedepan, karena laporan akhir bicara tentang proses dan hasil pengawasan yang telah dilalui. Banyak hal yang mesti dievaluasi terkait proses perencanaan sebelum tahapan misal soal regulasi, SE yang terkadang lahir setelah tahapan selesai.

1. Profil Bawaslu Provinsi Bengkulu

Provinsi Bengkulu terletak di bagian Barat Pulau Sumatera, secara geografis terletak pada 2°16" – 03°31" LS dan 101° 01' -103°41' BT dengan batas :

- Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Provinsi Lampung
- Sebelah Barat dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan

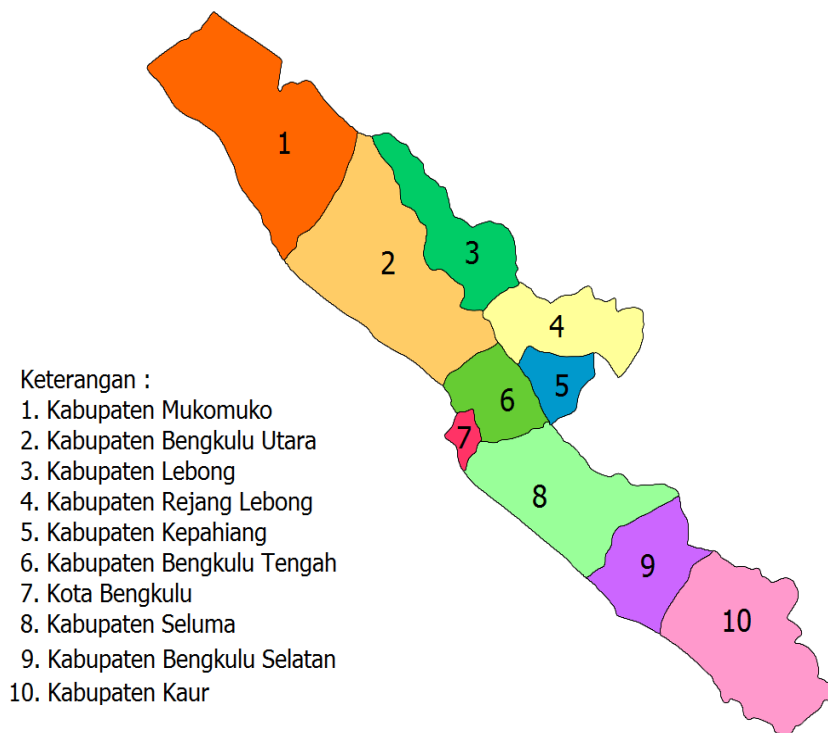
Wilayah bagian Barat Provinsi Bengkulu berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan memiliki pantai yang panjangnya ± 576 km dan wilayah bagian Timur kondisinya berbukit-bukit dengan dataran tinggi yang subur. Luas wilayah Provinsi Bengkulu mencapai lebih kurang 1.978.870 Ha atau 19.788,7 kilometer persegi. Wilayahnya memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 kilometer.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, dari keseluruhan luas wilayah Bengkulu tersebut, dibagi dalam 10 kabupaten/kota yang luasnya tidak sama. Kabupaten yang paling luas yaitu kabupaten Bengkulu Utara yaitu sekitar 4,424.60 Km² atau sekitar 22,21 % dari luas Provinsi Bengkulu. Sedangkan kabupaten yang luasnya paling kecil yaitu kota Bengkulu yaitu hanya sekitar 144,52 atau 0,74 % dari luas keseluruhan Provinsi Bengkulu. Bengkulu juga memiliki beberapa pulau kecil

baik yang berpenghuni seperti Pulau Enggano, serta pulau-pulau yang tidak berpenghuni seperti Pulau Mega, Pulau Tikus dan pulau-pulau kecil lainnya.¹

Secara administrasi pemerintahan, Provinsi Bengkulu terbagi menjadi 9 kabupaten dan 1 kota, yang terdiri dari 127 kecamatan dan Jumlah desa/kelurahan 1.517 desa/kelurahan. Berdasar data tersebut maka daerah yang paling banyak pembagian administrasi pemerintahan yaitu kabupaten Bengkulu Utara yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 224 Desa. Sedangkan pembagian administrasi paling sedikit yaitu kota Bengkulu hanya 9 Kecamatan dan 67 Kelurahan.

Gambar 1. Peta Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu

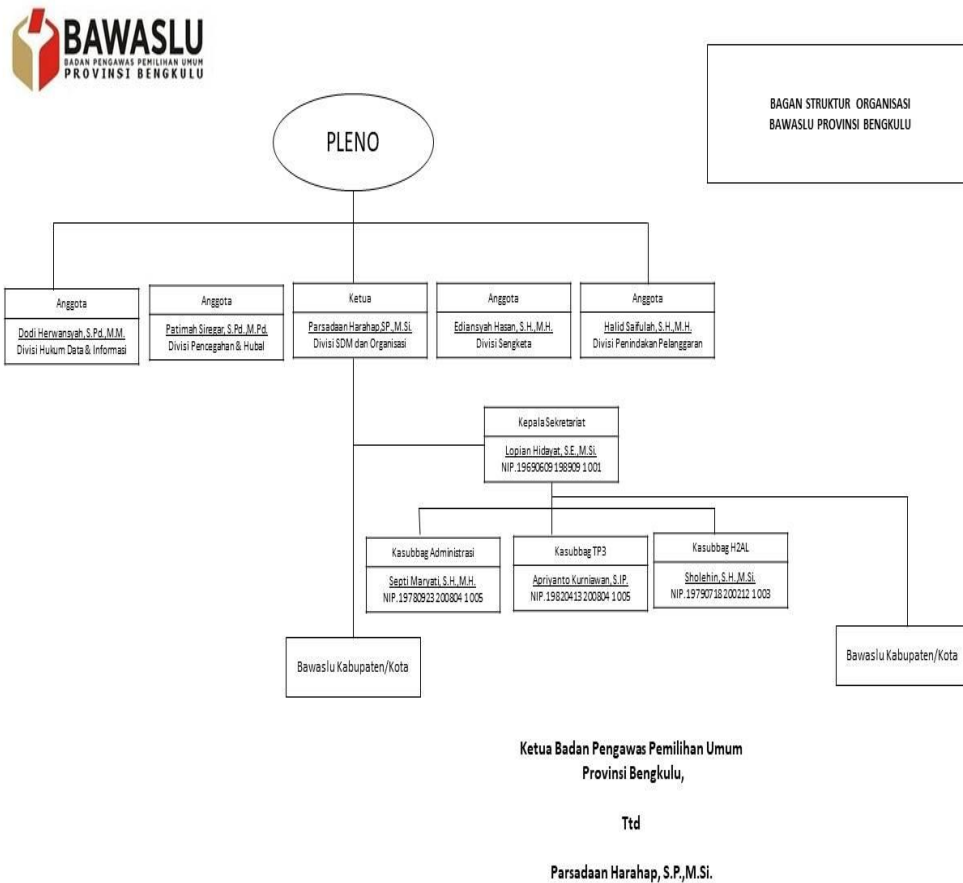


Tabel 1. Rincian Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu

Kabupaten/Kota	Ibukota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
Kota Bengkulu	Bengkulu	9	65
Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	10	114
Kepahiang	Kepahiang	8	95

Rejang Lebong	Curup	15	123
Lebong	Tubei	12	83
Mukomuko	Mukomuko	15	135
Bengkulu Utara	Argamakmur	19	144
Seluma	Tais	14	139
Bengkulu Selatan	Manna	11	115
Kaur	Bintuhan	15	133
Jumlah		128	1.146

Gambar 2. Struktur Bawaslu Provinsi Bengkulu



2. Dukungan Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Bawaslu Provinsi Bengkulu menggunakan dana APBN. Dana tersebut digunakan untuk operasional Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu desa/kelurahan dan Pengawas TPS se-Provinsi Bengkulu.

B. TUJUAN LAPORAN

Adapun tujuan penulisan laporan akhir pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2019 antara lain:

1. Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Melaksanakanevaluasi terhadap seluruh tahapan Pemilihan Umum;
3. Sebagai bahan dokumentasi tertulis terhadap proses pengawasan setiap tahapan pemilu;
4. Sebagai bahan otokritik terhadap tugas pengawasan dalam rangka pengutan proses pengawasan pemilu di masa yang akan datang.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
3. PKPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan KPU Nomor:174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
8. Keputusan KPU Nomor: 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Setiap Kabupaten/ Kota di setiap Provinsi;
9. Keputusan KPU Nomor:205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
10. Keputusan KPU Nomor:233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 tentang pelaksanaan Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia nomor: 001/PS.REG/BAWASLU/XII2017 dan nomor: 002/PS.REG/BAWASLU/XII2017;
11. Surat KPU RI Nomor :580/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 Perihal Pelaksanaan Penerimaan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik di KPU/KIP Kabupaten/Kota;
12. Surat KPU RI Nomor :585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 Perihal Pendaftaran akhir Parpol peserta Pemilu tahun 2019;
13. Surat KPU RI Nomor :31/PL.01.1-SD/03/KPU/I/2018 Perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan dengan Metode Sampel;

14. Surat Bawaslu RI Nomor :0121/K.Bawaslu/PM.00.00/l/2018 Perihal Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penulisan akhir laporan akhir pengawasan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dibagi kedalam 5 Bab sebagai berikut:

1. Bab Pertama berisikan tentang Pendahuluan serta Landasan Hukum dan Peraturan yang ada.
2. Bab Kedua berisikan Persiapan Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019.
3. Bab Ketiga berisikan tentang Fokus Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019.
4. Bab Keempat berisikan Dinamika dan Persoalan Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019.
5. Bab Kelima berisikan tentang Evaluasi dan Masukan Terhadap Pelaksanaan Pengawasan.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

A. PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

a. Kerawanan-Kerawan dan IKP

Daftar pemilih yang akurat, komperhensif dan mutakhir merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam melaksanakan demokrasi electoral. Dengan adanya daftar pemilih yang akurat akan meningkatkan kualitas proses demokrasi electoral dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Melakukan pendaftaran pemilih lebih awal dapat mengantisipasi kemungkinan kehilangan hak pilih seseorang secara lebih cepat dan terukur sebelum pemungutan suara berlangsung, sehingga dapat meminimalisir sengketa pada hari pemilihan. Kesalahan atau kurang akuratnya data pemilih akan berdampak langsung terhadap kelengkapan administrasi pemilu dan legitimasi pemilu.

Proses pemutakhiran daftar pemilih juga akan menjelaskan jumlah pemilih pada suatu wilayah akan memberi kontribusi pada pembentukan daerah pemilihan. Pemutakhiran daftar pemilih juga akan membantu tahapan pemilu selanjutnya karena sudah mengalokasikan dan mengorganisir pemilih pada masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selanjutnya Data pemilih dan daftar pemilih adalah pintu masuk dalam sebuah tahapan Pemilu, sebab Pemilu tidak akan bisa berjalan tanpa pemilih, maka penting bagi Bawaslu Provinsi Bengkulu mendeteksi kerawanan-kerawan yang akan terjadi sebelum proses pemuktahiran, disamping itu juga sering kali timbul '*anekdot*' daftar pemilih ini adalah daftar yang tidak pernah tuntas, karna sering

menjadi masalah dikemudian hari dan dan diujung Pemilu, dan terjadi gugatan yang menyalahkan daftar pemilih, disini Bawaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan indek kerawan pemilu yang terjadi di Provinsi Bengkulu.

Diagram 1. IKP Dimensi Partisipasi Pemilih

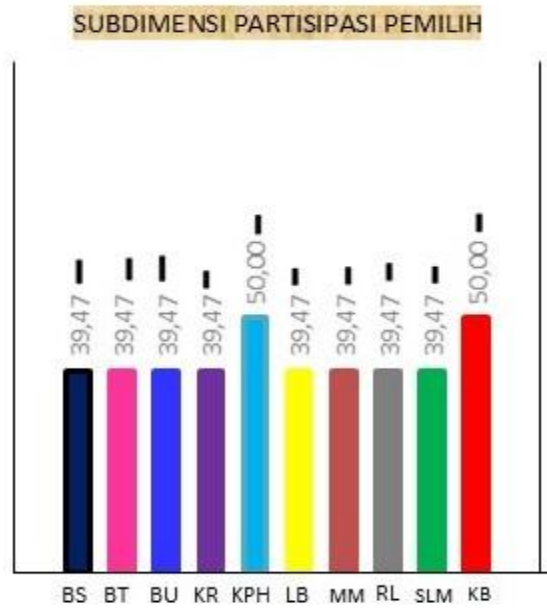


Diagram diatas menunjukan dalam subdimensi partisipasi pemilih seluruh kabupaten masuk dalam katagori sedang.

Diagram 2. IKP Dimensi Penyelenggara Yang Bebas dan Adil, Sub Dimensi Hak Pilih



Dalam IKP Sub dimensi penyelenggara yang bebas dan adil didapatkan data kerawanan tinggi pada sub dimensi hak pilih terdapat dua, Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu dengan angka Kabupaten Kaur 81.82 dan Kota Bengkulu dengan angka 72.73.

Tabel 2. IKP Tahapan dan Sub Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

NO	IKP Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih
1.	Proses cokolit tidak sesuai prosedur, hanya melihat data RT tanpa faktual
2.	Data pemilih tidak komprehensif, akurat dan mutakhir
3.	Pemilih eksodus didaerah perbatasan
4.	Pemilih potensial yang tidak memiliki E-KTP
5.	Daftar pemilih yang tidak ditempel ditempat-tempat strategis
6.	Pemilih baru yang tidak melapor ke RT setempat
7.	Pemilih di lapas (Lembaga Pemasarakatan)
8.	Pemilih yang sudah masuk masa pensiun
9.	NIK Ganda
10.	Pemilih di perusahaan dan pabrik
11.	Tugas Belajar

b. Perencanaan Pengawasan

Penyusunan daftar pemilih sesuai dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Dimulai tanggal 25 Maret 2017 penyerahan data pemilih dari KPU ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan berakhir 28 Agustus 2018 masa pemasukan data DPK.

Dalam penyusunan Daftar Pemilih, Bawaslu Provinsi Bengkulu selalu membuat perencanaan-perencanaan proses pengawasan, baik proses pemuktahiran daftar pemilih sampai ke proses pleno ditingkat kecamatan dan sampai dengan proses rekapitulasi tingkat Provinsi,

langkah Bawaslu dalam proses pengawasan daftar pemilih melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan rapat kerja teknis sebelum pelaksanaan pleno ditingkat provinsi, hal ini bertujuan membahas permasalahan yang dihadapi
- 2) Mengumpulkan Koordinator Divisi Pengawasan Hubmas dan Hubla Kabupaten/Kota dalam rangka menginventarisir masalah yang terdapat di Kabupaten/Kota masing-masing, setiap Kabupaten/Kota mempersentasikan hasil dan masalah, setelah itu tim Bawaslu Provinsi Bengkulu merumuskan DIM (Daftar Infentaris Masalah)
- 3) Mengumpulkan data melalui email daftar pemilih yang bermasalah, kegandaan, pemilih, pemilih lapas, pemilih 17 tahun yang belum memiliki E-KTP
- 4) Mempelajari alat kerja dan Surat Edaran dari Bawaslu Republik Indonesia

2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih Dan Daftar Pemilih

a. Pencegahan

Dalam hal bentuk pencegahan Bawaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan dalam tertulis dan bentuk lisan, selain itu juga Bawaslu Provinsi Bengkulu aktif dalam memberikan himbaun kepada KPU Provinsi Bengkulu terhadap Daftar Pemilih dan Intruksi ke Kabupaten/Kota terkait daftar pemilih antara lain:

- 1) Surat intruksi ke Panwaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Nomor 037/K.BE/PM.02/4/2018 Tanggal 16 April 2018 Perihal Pengawasan Pencocokan dan Pnelitian Pemuktahiran Data Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2019
- 2) Surat Intruksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu Nomor 132/K.BE/PM.00.01/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018 Perihal

Pengawasan penyempurnaan daftar pemilih tetap hasil perbaikan pertama (DPTHP-1) pemilu tahun 2019

- 3) Surat Himbauan Nomor : 077/K.BE/PM.02/6/2018 Tanggal 19 Juni 2019 sehubungan dengan telah dilakukan proses pengawasan daftar hasil pemuktahiran (DPHP) dan penetapan daftar pemilih sementara di Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Bengkulu dan surat dari Ketua KPU Provinsi Bengkulu nomor : 794/PP.09-SD/17/KPU-Prov/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018 perihal : Hasil pengawasan penyusunan rekapitulasi DPHP dan penetapan DPS, maka dapat kami sampaikan sebagai berikut :
 - a) Masih banyak daftar pemilih potensial non KTP Elektronik yang terdapat di hampir seluruh Kabupaten agar dapat menjadi perhatian khusus bagi KPU Provinsi Bengkulu beserta jajarannya agar tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.
 - b) Memastikan jajaran KPU Provinsi Bengkulu sudah mengumumkan DPS sejak tanggal 18 Juni 2018 sebagaimana ketentuan PKPU No.5 Tahun 2018.
- 4) Surat Himbaun Nomor 016/K.BE/PM.01.01/I/2019 tanggal 21 Januari 2019, terkait penggunaan formulir model A.5-KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain sesuai ketentuan pemilihan tersebut harus melapor ke jajaran KPU paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara agar dapat memilih ke TPS yang diinginkan.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Provinsi Bengkulu merekomendasikan perbaikan DPT di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu

menyampaikan rekomendasi perbaikan DPT terakhir pada tanggal 12 April 2019 kepada KPU Provinsi Bengkulu Rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Bengkulu Hasil tindaklanjut KPU Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

- 2) Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap penetapan DPT tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2018 di Bengkulu, DPT yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah DPT Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu

Nama Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	
	Laki-Laki	Perempuan
Bengkulu Tengah	41.725	40.363
Bengkulu Selatan	58.542	57.098
Rejang Lebong	100.379	99.259
Bengkulu Utara	105.532	101.452
Kaur	46.368	44.258
Seluma	71.723	68.284
Mukomuko	64.794	61.506
Lebong	39.030	37.873
Kepahiang	56.872	53.950
Kota Bengkulu	115.592	118.160
TOTAL	700.557	682.203

- 3) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap penetapan DPTHP 1 tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2018 di Bengkulu, DPTHP 1 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah DPTHP 1 Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu

Nama Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	
	Laki-Laki	Perempuan
Bengkulu Tengah	41.717	40.354
Bengkulu Selatan	58.265	56.871
Rejang Lebong	100.160	99.053
Bengkulu Utara	103.966	100.009

Kaur	46.048	43.938
Seluma	71.187	67.729
Mukomuko	63.643	60.380
Lebong	38.322	37.092
Kepahiang	56.364	53.437
Kota Bengkulu	115.059	117.678
TOTAL	694.731	676.541

- 4) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap penetapan DPTHP 2 tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2018 di Bengkulu, DPTHP 2 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah DPTHP 2 Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu

Nama Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	
	Laki-Laki	Perempuan
Bengkulu Tengah	41.710	40.404
Bengkulu Selatan	58.886	57.618
Rejang Lebong	101.696	100.574
Bengkulu Utara	107.290	103.398
Kaur	45.682	43.537
Seluma	70.593	67.310
Mukomuko	64.844	61.572
Lebong	38.932	37.677
Kepahiang	55.767	52.809
Kota Bengkulu	123.838	126.511
TOTAL	709.238	691.410

- 5) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap penetapan DPTHP 3 tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2018 di Bengkulu, DPTHP 3 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Jumlah DPTHP 3 Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu

Nama Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	
	Laki-Laki	Perempuan
Bengkulu Tengah	41.708	40.415
Bengkulu Selatan	58.535	57.242
Rejang Lebong	102.245	101.091
Bengkulu Utara	106.930	103.184

Kaur	45.893	43.671
Seluma	70.480	67.213
Mukomuko	64.780	61.469
Lebong	39.268	37.957
Kepahiang	55.678	52.727
Kota Bengkulu	122.725	125.897
TOTAL	708.242	690.866

6) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap penetapan DPTB 1 tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2019 di Bengkulu, DPTB 1 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Jumlah DPTB 1 Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu

Nama Kabupaten/Kota	Jumlah DPTB Keluar (Yang Mengurus di Daerah Asal)		Jumlah DPTB Keluar (Yang Mengurus di Daerah Tujuan)	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Bengkulu Tengah	10	20	97	76
Bengkulu Selatan	6	20	234	189
Rejang Lebong	117	75	167	158
Bengkulu Utara	965	777	243	248
Kaur	10	14	166	97
Seluma	92	53	88	111
Mukomuko	113	34	231	232
Lebong	79	31	77	61
Kepahiang	11	10	144	98
Kota Bengkulu	292	175	473	500
TOTAL	1695	1209	1920	1770

7) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap penetapan DPTB 2 tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2019 di Bengkulu, DPTB 2 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

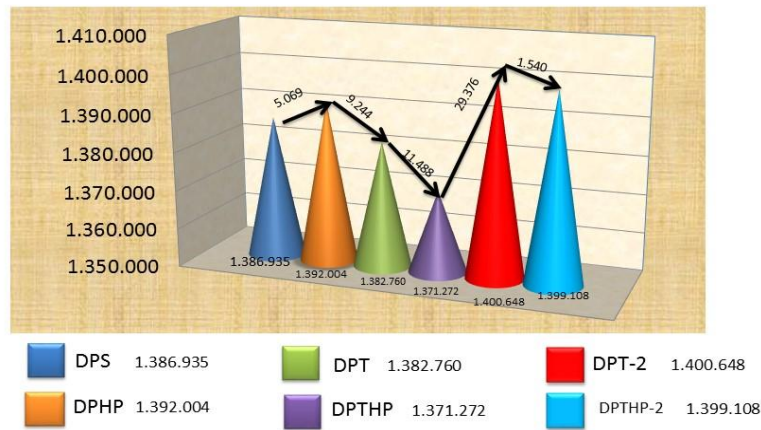
Tabel 8. Jumlah DPTB 2 Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu

Nama Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	
	Laki-Laki	Perempuan
Bengkulu Tengah	41.708	40.415
Bengkulu Selatan	58.535	57.242
Rejang Lebong	102.245	101.091

Bengkulu Utara	106.930	103.184
Kaur	45.893	43.671
Seluma	70.480	67.213
Mukomuko	64.780	61.469
Lebong	39.268	37.957
Kepahiang	55.678	52.727
Kota Bengkulu	122.725	125.897
TOTAL	708.242	690.866

Diagram 3. Pemuktahiran Data Pemilih

PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH



Gambar diatas menggambarkan proses pemuktahiran daftar pemilih di Provinsi Bengkulu dari tahapan DPS sampai dengan DPTH-2 terakhir yang berjumlah 1.399.108, dan dalam setiap proses pemuktahiran daftar pemilih terjadi perubahan data masuk dan keluar.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub Tahapan PemuktahiranData Pemilih dan Daftar Pemilih

a. Temuan

Dalam proses coklit sampai dengan proses rekapitulasi Bawaslu Provinsi Bengkulu beserta jajaran telah menemukan pelanggaran, pelanggaran tersebut antara lain, pemilih yang belum terdata, pemilih ganda, pemilih meninggal dunia masih masuk dalam DPT, pemilih

potensial yang belum memiliki *E-KTP*, temuan-temun ini Bawaslu secara berjenjang sudah melakukan rekomendasi-rekomendasi ke KPU sesuai jajaran dan ke instansi lain seperti dukcapil.

b. Rekomendasi

Dalam hal rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu dari jajaran Provinsi sampai dengan Kecamatan telah melakukan rekomendasi terkait temuan yang didapatkan dilapangan, contoh pemilih yang sudah meninggal masih masuk kedalam daptar pemilih, Panwaslu Kecamatan sudah menyampaikan ke PPK Kecamatan melalui pleno, sehingga pada saat pleno ditingkat Kabupaten/Kota data sudah bersih, walaupun di Kecamatan masih tertinggal data yang belum direkomendasikan, Bawaslu Kabupaten/Kota akan merekomendasikan data yang belum bersih ke KPU Kabupaten/kota melalui Pleno tingkat Kabupaten/Kota. Selanjutnya untuk rekomendasi di level Bawaslu Provinsi Bengkulu data relatif bersih, sehingga tidak ada lagi rekomendasi tertulis hanya rekomendasi lisan dan itu tertuang dalam FORM A kronologi dan data yang disampaikan.

c. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi

Tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu. Dari jajaran Bawaslu sampai dengan jajaran Pengawas Desa Kelurahan, semua ditindak lanjuti oleh jajaran KPU dari tingkat bawah sampai dengan tingkat Provinsi.

4. Dinamika Dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

- a. Pengiriman laporan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Link Aplikasi hal menjadi kendala bagi Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk melakukan cek dan ricek hasil pengawasan
- b. Keterlambatan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengirim Laporan

- c. Alat kerja yang dibuat oleh Bawaslu Republik Indonesia menjadi panduan dan Alat ukur dalam melakukan Pengawasan Setiap tahapan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan Permintaan Laporan dari Bawaslu RI terkadang tidak sesuai dengan jadwal.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

- a. Alat kerja, SE, regulasi hendaknya keluar sebelum tahapan
- b. Akurasi data dari PDK, Kecamatan belum sinkron
- c. Masih lemahnya sdm di level bawah
- d. Di level bawah belum mampu membuat inventaris masalah
- e. Pemahaman regulasi yang masih lemah

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK

1. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Tahapan dan Sub Verifikasi Partai Politik

Tujuan pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2019 adalah: a. Memastikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu melaksanakan tahapan verifikasi peserta pemilu sesuai dengan aturan; b. Memastikan Partai Politik tingkat Provinsi Bengkulu memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dan c. Untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pada tahapan verifikasi peserta pemilihan umum.

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Indeks kerawanan Pemilu dibagi kedalam tiga tingkatan yaitu: kategori rendah digambarkan dengan skor 0,00 – 33,00; kategori sedang adalah skor indeks kerawanan pada interval 33,01 – 66,00; dan indeks yang berada pada angka 66,01 – 100,00 dikategorikan kerawanan tinggi.

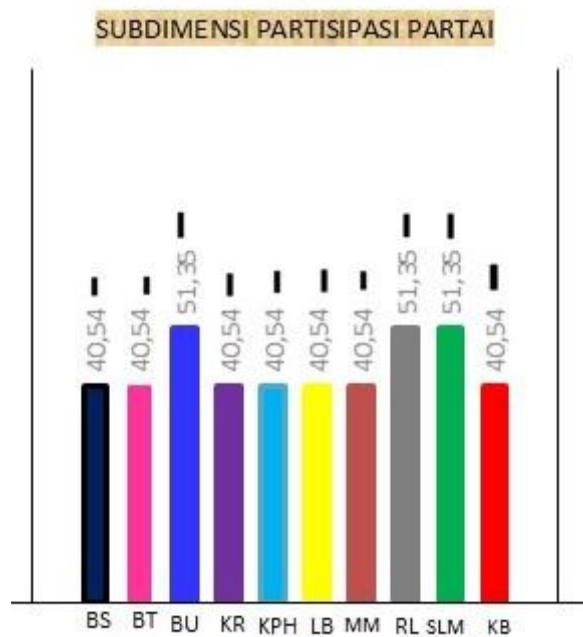
Indeks kerawanan pemilu Provinsi Bengkulu secara keseluruhan berada dalam kategori kerawanan sedang yaitu sebesar 50,37. Jika dibandingkan dengan IKP Nasional sebesar 49,63, IKP Provinsi

Bengkulu masih lebih tinggi 0,74. Hal-hal yang dianggap rawan pada tahapan verifikasi Partai Politik berdasarkan karakteristik klaster adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Kerawanan-Kerawanan dan IKP Tahapan Verifikasi Partai Politik

No	Kerawanan
1	Tidak terpenuhinya kuota perempuan 30%
2	Tidak adanya keterwakilan kelompok disabilitas
3	Kepengurusan dan keanggotaan ganda Partai Politik
4	Tidak adanya keterwakilan kelompok minoritas

Diagram 4. Sub Dimensi Partisipasi Partai



Berdasarkan grafik diatas, Indeks kerawan pemilu subdimensi partisipasi Partai Politik tingkat Provinsi Bengkulu rata-rata berada pada angka 43,78. Apabila dilihat per Kabupaten tampak jelas bahwa 3 (tiga) kabupaten yaitu kabupaten Bengkulu Utara, Rejang Lebong dan Seluma memiliki angka lebih tinggi dari rata-rata Provinsi yaitu 51,35. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi Partai Politik di ketiga Kabupaten tersebut pada subtahapan verifikasi Partai Politik

masih kurang dibandingkan dengan 7 (tujuh) Kabupaten lainnya yang rata-rata 40,54.

b. Perencanaan Pengawasan

Kerja-kerja pengawasan lembaga pengawas pemilu menjadi tolak ukur sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilu. Mulai dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, dan Pengawas Kelurahan/Desa harus bisa memastikan pelaksanaan peraturan dan undang-undang kepemiluan, sehingga pemilu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan azas pemilu luber dan jurdil. Bawaslu Provinsi Bengkulu tidak hanya fokus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan saja, namun juga mengawasi penyelenggara pemilu dan peserta pemilu.

Perencanaan pengawasan merupakan hal sangat penting dilakukan sebelum pengawasan dilaksanakan. Peningkatan kapasitas Pengawas Pemilu oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu merupakan langkah awal yang berfungsi untuk mempersiapkan pengawas dalam melakukan pengawasan verifikasi Partai Politik. Kegiatan tersebut mencakup briefing staff yang dilaksanakan sebelum pelaksanaan pengawasan sub tahapan verifikasi Partai Politik dilaksanakan. Tujuannya agar pengawas memahami secara teknis dalam melakukan pengawasan. Untuk meningkatkan kapasitas staff komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu memberikan arahan terkait ketaatan KPU Provinsi Bengkulu sebagai penyelenggara yang difokuskan pada:

- 1) Kebenaran dan ketepatan pada proses
- 2) Keterbukaan dan transparansi pada proses
- 3) Ketepatan waktu
- 4) Ketidak berpihakan terhadap Partai Politik manapun dan

5) Kepatuhan kepada Peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan PKPU Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, subtahapan Verifikasi Partai Politik dimulai tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan 5 Februari 2018.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik

a. Pencegahan

Terdapat dua strategi yang dijalankan oleh Bawaslu dalam mengawasi proses pemilu, *pertama melakukan pencegahan dan kedua penindakan pelanggaran*. Strategi pencegahan dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang sudah dipetakan sebelumnya terhadap potensi atau indikasi awal terjadinya pelanggaran.

Strategi pencegahan tersebut dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama kelembagaan, mendorong sinergi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu, mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemilu, sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan upaya pencegahan seperti pemetaan potensi pelanggaran, menentukan fokus pengawasan, penyusunan rencana kerja pengawasan dan evaluasi.

Langkah-langkah pencegahan dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam rangka memaksimalkan kerja pengawasan adalah sebagai berikut:

1) Melakukan koordinasi baik secara informal maupun formal dengan KPU Provinsi dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan

- verifikasi peserta pemilu serta petapotensikerawanan pelanggaranPemilu;
- 2) Menyampaikan surat himbaun kepada KPU Provinsi, partai politik dan pemerintah daerah agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu;
 - 3) Menyampaikansaran perbaikan kepada KPU Provinsi dan jajarannyaapabilaterdapatkekeliruan ataukelalaian;
 - 4) Mengingatkan secara tegas kepada partai politik calon peserta pemilu tingkat Provinsi serta KPU Provinsi tentang aturan dan sanksi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu;
 - 5) Rapat Stakeholder pengawasan pemilu Legislatif dengan instansi daerah, KPU dan pihak terkait lainnya untuk memaksimalkan persiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019;
 - 6) Melakukan pengawasan melekat terhadap kegiatan Bimbingan Teknis, Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu terkait tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu tahun 2019;
 - 7) Mempublikasikan melalui media massa tentang adanya kecenderungan atau indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu;
 - 8) Melibatkan semua pihak untuk berperan aktif mengawasi penyelenggaraanpengawasan;
 - 9) Melakukankegiatanlainsepanjangtidakbertentangan denganketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam hal pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu mengeluarkan surat intruksi ke Kabupaten/Kota terkait tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu tahun 2019 :

- 1) Surat Nomor 197/ Bawaslu Prov.BE./PM/00/02/10/2017, tgl. 2 Okt-2017 Perihal Instruksi Pengawasan Pendaftaran Partai Politik;
- 2) Surat Nomor 200/ Bawaslu Prov.BE./PM/00/02/X/2017, tgl. 3 Okt-2017 Perihal Instruksi Pengawasan Pendaftaran Partai Politik.

Surat ini bertujuan untuk melakukan pengawasan pendaftaran parpol pada tanggal 3-16 Oktober 2017, dan meminta Panwaslu Kabupaten/Kota agar :

- a) Menyampaikan peta kerawanan dengan indikator penyelenggara pemilu dan peserta;
 - b) Meminta Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan Form A beserta laporan foto dan dokumentasi:
 - c) Meminta Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan form pengawasan pendaftaran parpol:
 - d) Meminta Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan salinan daftar nama anggota Partai Politik yang mendaftar *by name by adres*.
- 3) Surat Nomor 333/BAWASLU PROV BE/PM.01/12/2017 tgl. 13 Des.2017 Perihal Intruksi kepada Panwas Kab/kota.

Selain itu juga Bawaslu Provinsi Bengkulu melaksanakan rapat koordinasi dan Supervisi terkait verifikasi faktual Partai Politik, antara lain :

- 1) Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu untuk Pengawasan Verifikasi Faktual Peserta Pemilu Tahun 2019 Paska Putusan Mahkamah Konstitusi 2-4 Februari 2018
- 2) Menghadiri undangan KPU Provinsi Bengkulu Nomor :184/pl.01.1-und/17/Prov/I/2018 Tanggal 30 Januari 2018 acara penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan

perempuan dan domisili kantor 12 (dua belas) partai politik calon peserta pemilu tahun 2019 tingkat Provinsi Bengkulu. Tanggal 31 Januari 2018.

- 3) Supervisi Ke Kabupaten terkait Verifikasi Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 30 Januari 2018
- 4) Supervisi Ke Kabupaten terkait Verifikasi Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 31 Januari 2018
- 5) Supervisi Verifikasi Faktual Kepengurusan, Kantor Tetap dan Keanggotaan Partai Politik Pasca Putusan MK. Ke Kabupaten Lebong 1 Februari 2018.

Pengawasan terhadap partai politik calon Peserta Pemilu yang telah melengkapidokumen persyaratan keanggotaanPartaiPoltikyang meliputi:

- 1) Kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU dengan cara mencocokkan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum dalam formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2 PARPOL dengan salinan bukti kartu tanda anggota partai politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan.
- 2) Jangka waktu pelaksanaan dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari setelah batas akhir waktu pendaftaran;
- 3) Dalam hal terdapat dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat dilakukan verifikasi faktual oleh KPU.
- 4) Memastikan penyampaian salinan berita acara hasil verifikasi kepada Partai Politik palinglama 2 (dua)hari setelah verifikasi berakhir.

Selain dari itu Bawaslu Provinsi Bengkulu juga memberikan himbauan kepada KPU Provinsi Bengkulu yaitu:

- 1) Surat Nomor 196/BAWASLU PROV BE/PM.02/10/2017 tgl. 2 Okt 2017 perihal himbauan agar KPU Prov. Bengkulu mengintruksikan

kepada KPU Kab/Kota agar memberikan akses data kepada Panwas Kab/kota.

2) Surat Nomor 334/BAWASLU PROV BE/PM.02/12/2017 tgl. 14 Des. 2017 perihal himbauan agar KPU memberikan jadwal Verifikasi faktual Partai Politik.

3) Surat Nomor 029/K.BE/02/3/2018 tgl. 12 Maret 2018 perihal himbauan kepada KPU Prov. Bengkulu agar mensosialisasikan Partai Politik Peserta Pemilu berikut Nomor Urutnya ke masyarakat luas.

Dalam hal verifikasi Partai Politik tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi mengawasi keberadaan kantor tetap Parpol, kepengurusan, surat keterangan keterwakilan 30 % perempuan, surat domisili kantor.

Berikut hasil verifikasi partai politik di provinsi Bengkulu :

1) Verifikasi Faktual Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

Minggu Tanggal 17 Desember 2017 Tim Bawaslu Provinsi Bengkulu di pimpin Kasubbag TP3 Bawaslu Provinsi Bengkulu Bapak Apriyanto Kurniawan, S.IP dan dua orang Staf TP3 Bawaslu Provinsi Bengkulu Debisi Ilhodi, s.sos, Afif Pratama, S.Kom, melaksanakan pengawasan langsung verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2019. Pertemuan di Kantor DPW Partai Perindo yang terletak di Jl. Mayjen Sutoyo RT.03, RW 02 Kel Tanah Patah Kec. Ratu agung Kota Bengkulu. Pukul 09.45 WIB pertemuan berlangsung di Aula Pertemuan Kantor Perindo dimana yang hadir pada pertemuan, dari KPU Provinsi Bengkulu Anggota Zainan Sagiman, SH, Aris Munandar. Berserta tim pokja Aldi, Irsad, Karyo, Hamza. Dari DPW Partai Perindo Sekretaris Yurman Hamedi, SIP, Wakil Ketua Meriyani, S.Ikom, Wakil Sekretaris Ermiwati, A.Md, Bendahara Jejen Sukrillah, S.Pd serta staf Kantor DPW Partai Perindo. Sambutan pertama oleh Zainan Sagiman, SH, menjelaskan kedatangan dan menjelaskan proses verifikasi faktual, sambutan selanjutnya dari Sekretaris Partai Perindo menerangkan berkas siap untuk diverifikasi dan Sekretaris juga

menerangkan Ketua DPW Partai Perindo Dirwan Mahmud, SH berhalangan hadir dikarenakan tgl 14 Desember 2017 berangkat ke Jogja menjadi wali nikah keponakan. Berkas pertama yg diteliti :

- a) Surat domisili Kantor dan pernyataan status Kantor dan berkasnya lengkap
- b) Surat keterwakilan perempuan dalam pengurus partai berkasnya lengkap dan kouta perempuan lebih dari 30 %
- c) Pencocokan KTP dan KTA atas nama H.Yurman Hamedi,S.IP Meriyani,S.Ikom Ermiwati,A.Md dalam hal ini lengkap dan cocok kecuali atas nama Jejen Sukrillah,S.Pd Bendahara DPW Perindo KTP asli tidak ada hanya foto kopi KTP dan surat keterangan sudah melaksanakan perekaman E-KTP oleh Kantor Camat Muarah Bangkahulu. Setelah kegiatan penelitian tim Bawaslu mencek isi kantor. Pukul 10.15 WIB acara ditutup dan dilanjutkan foto bersama mengkahiri kegiatan.

Selanjutnya Senin Tanggal 18 Desember 2017 Tim Bawaslu Provinsi Bengkulu di pimpin Kasubbag TP3 Bawaslu Provinsi Bengkulu Bapak Apriyanto Kurniawan, S.IP dan tiga orang Staf TP3 Bawaslu Provinsi Bengkulu Debisi Ilhodi, s.sos, Afif Pratama,S.Kom,dan Yuri Rahmat Diansyah melaksanakan Pengawasan Verikasi Faktual Kepengurusan Ketua DPW Parpol Persatuan Indonesia (PERINDO) a.n Darwan Mahmud, SH. Pertemuan di Kantor KPU Provinsi Bengkulu. Pukul 12.00 WIB pertemuan berlangsung di Aula Pertemuan Kantor KPU Provinsi Bengkulu dimana yang hadir pada pertemuan, dari KPU Provinsi Bengkulu Anggota Aris Munandar, Berserta tim pokja Aldi, Irsad, Karyo, Hamza. Dari DPW Partai Perindo Ketua Darwan Mahmud, SH,Wakil Ketua Meriyani,S.Ikom, Wakil Sekretaris Ermiwati,A.Md, Bendahara Jejen Sukrillah,S.Pd. Sambutan pertama oleh Aris Munandar menjelaskan kedatangan dan menjelaskan proses verifikasi faktual. Selanjutnya untuk diverifikasi adalah Ketua

DPW Partai Perindo Dirwan Mahmud, SH. Berkas pertama yg diteliti adalah pencocokan KTP dan KTA a.n Dirwan Mahmud, SH.

Saat Proses Verifikasi ada ketidakcocokan KTA dengan Sipol yang dimiliki KPU. Setelah melakukan verifikasi berlanjut ternyata No KTA dan KTP Dirwan Mahmud, SH Tertukar, kemudian setelah Sipol di print yang terbaru. dan dicocokkan kembali No KTA dan No KTP Dirwan Mahmud, SH. Ternyata hasilnya Cocok/Sama dan hasilnya MS, setelah itu Pukul 12.30 WIB acara ditutup dan dilanjutkan foto bersama mengakhiri kegiatan.

2) Verifikasi Faktual Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Minggu Tanggal 17 Desember 2017 Tim Bawaslu Provinsi Bengkulu di hadiri langsung oleh Staf Bawaslu Provinsi Bengkulu Bapak Afzan Fachlevi, S.Kep, Elvis Masril, S.E. Armansyah, Amd.Kom Mico Yudistira, S.H. Andri Tresna Gumilar, S.Si. Yuri Rahmat Diansyah melaksanakan pengawasan langsung verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2019. Pertemuan dikantor DPW partai PSI yang terletak di Jl Letkol Santoso No. 12 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Pukul 10.00 wib pertemuan berlangsung di aula pertemuan kantor PSI dimana yang hadir pada pertemuan, dari Anggota KPU Provinsi Bapak Eko Sugianto, Ibu Siti Baroroh, Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Bapak Siswanto, Kasubbag Hukum dan empat orang staf KPU Provinsi Bengkulu. Dari dpw partai PSI Ketua yaitu Bapak Muharram dan sekretaris Reni Sartika, Bendahara Nopita Sari. Sambutan pertama oleh Ibu Siti Baroroh menjelaskan kedatangan dan menjelaskan proses verifikasi faktual, sambutan selanjutnya dari Ketua partai PSI menerangkan berkas siap untuk diverifikasi.

Berkas pertama yg diteliti :

- a) Surat domisili kantor dan pernyataan status kantor dan berkasnya lengkap

b) Surat keterwakilan perempuan dalam pengurus partai berkasnya lengkap

c) Pencocokan KTP dan KTA atas nama Bapak Muharram dan sekretaris Reni Sartika, Bendahara Nopita Sari dan Septa Hartono, Wahyu Vietra Taupi, Herry Febrian, Yuricke Sasmita Aryani, setelah dilakukan Verifikasi bahwa ketujuh orang tersebut mempunyai KTP dan KTA yang Asli dan Benar, tim juga sempat mengecek perlengkapan yang ada dikantor PSI, layaknya seperti Kantor pada umumnya. Tepat pukul 11.12 wib acara ditutup dan dilanjutkan foto bersama mengkahiri kegiatan.

3) Verifikasi Faktual Partai (BERKARYA)

Minggu Tanggal 31 Desember 2017 Tim Bawaslu Provinsi Bengkulu di hadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Ibu Patimah Siregar, M.Pd., Aistensi Bawaslu Provinsi Bengkulu Bapak Dadi Sukadi, S.E. dan staf Bawaslu Provinsi Bengkulu Afzan Fachlevi, S.Kep, Andri Tresna Gumilar, S.Si. melaksanakan pengawasan langsung verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2019. Pertemuan dikantor dpw partai Berkarya yang terletak dijalan Nala Anggut Bawah Bengkulu RT 04 RW 01 No.59 Kelurahan Anggut Bawah Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Pukul 13.10 wib pertemuan berlangsung di Sekretariat pertemuan kantor Berkarya dimana yang hadir pada pertemuan, dari Anggota KPU Provinsi Zainan Sagiman, Bapak Aries Munandar, Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Bapak Siswanto , Kabbag Umum dan Kasubbag Hukum dan empat orang staf KPU Provinsi Bengkulu. Dari DPW Partai Berkarya Ketua Sekretaris, Anggota, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara hadir semua, Kata Sambutan pertama oleh Bapak Zainan Sagiman menjelaskan kedatangan dan menjelaskan proses verifikasi faktual, sambutan selanjutnya dari Ketua partai Berkarya

menerangkan berkas siap untuk diverifikasi. Berkas pertama yg diteliti :

- a) Surat domisili kantor dan pernyataan status kantor dan berkasnya lengkap.
- b) Surat keterwakilan perempuan dalam pengurus partai berkasnya lengkap
- c) Pencocokan KTP dan KTA Ketua, Sekretaris, Anggota, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara. Tepat pukul 13.45 wib acara ditutup dan dilanjutkan foto bersama mengkahiri kegiatan.

4) Verifikasi Faktual Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)

Selasa, 2 Januari 2018 Tim Bawaslu Provinsi Bengkulu di hadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Patimah Siregar, M.Pd., Kasubbag TP3 Bawaslu Provinsi Bengkulu Apriyanto Kurniawan, S.IP dan Staf Bawaslu Provinsi Bengkulu Bapak Debisi Ilhodi, S.Sos, Afzan Fachlevi, S.Kep, Afif Pratama, S.Kom. melaksanakan pengawasan langsung terkait hasil verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2019. Pertemuan di kantor KPU Provinsi Bengkulu, Acara langsung dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu Bapak Irwansyah, dan didampingi keempat Anggota KPU Provinsi Bapak Eko Sugianto, Ibu Siti Baroroh, Bapak Aries Munandar dan Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Bapak Siswanto, beserta tim dari KPU Provinsi Bengkulu Kabbag, Kasubbag, Staf yang ada dilingkungan KPU Provinsi Bengkulu. Dari DPW partai Garuda dan partai Berkarya masing-masing dihadiri oleh 2 (dua) orang, tepat pukul 14.05 ketua KPU Provinsi Bengkulu membuka acara secara resmi, ketua KPU Provinsi Bengkulu memberikan penjelasan bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2017 lalu, dokumen Papol tersebut dinyatakan memenuhi

syarat (MS), kemudian Ketua KPU Provinsi Bengkulu menyampaikan kepada parpol agar terus selalu aktif dan menjalin hubungan yang harmonis khususnya ditingkat KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dan kemudian Ketua KPU Provinsi Bengkulu berpesan jika ada parpol yang ingin melakukan perbaikan dokumen masih ada waktu jika diperlukan. Kemudian tepat pada pukul 14.15 wib penyerahan BA hasil hasil Verikasi Faktual Parpol Calon Peserta Pemilu 2019, yang diawali oleh partai Garuda, dilanjutkan partai Berkarya, kemudian yang terakhir kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu yang langsung diterima oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Ibu Patimah Siregar, M.Pd. yang disaksikan oleh tim dari Bawaslu Provinsi Bengkulu, LO dari kedua Partai, Polda yang diwakili oleh tim intel. Setelah acara penyerahan dokumen hasil tersebut selesai, acara ditutup pada pukul 14.22 wib. Kemudian dilanjutkan dengan acara Foto bersama.

5) Verifikasi Faktual Partai Demokrat (DEMOKRAT)

Pada hari Minggu Tanggal 28 Januari 2018 Tim Bawaslu Provinsi Bengkulu di hadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Ibu Patimah Siregar, M.Pd., Kasubbag TP3 Bapak Apriyanto Kurniawan,S.IP, Asistensi Bawaslu Provinsi Bengkulu Bapak Irvan Yudha Oktara,SH dan staf Bawaslu Provinsi Bengkulu Debisi Ilhodi,S.Sos, Elvis Masril,SE, dan Yopi Guantara Tanjung,S.AB. Telah melaksanakan pengawasan langsung verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2019. Pertemuan di kantor DPD Partai Demokrat yang terletak dijalan P. Natadirja No.48 Kota Bengkulu. Pukul 09.30 wib. Yang hadir pada pertemuan, dari Anggota KPU Provinsi Bengkulu Ibu Siti Baroroh, Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Bapak Siswanto , Kabbag Data dan empat orang staf KPU Provinsi Bengkulu. Dari DPD Partai Demokrat dihadiri Ketua Edison Simbolon, Bendahara DPD Ibu

Yani Setianingsih beserta jajaran pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu. Sambutan pertama oleh Ketua DPD Demokrat menyampaikan siap untuk dilaksanakan verifikasi faktual sesuai keputusan MK, Sambutan Kedua oleh KPU Provinsi Bengkulu Ibu Siti Baroroh menyampaikan proses dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual, terakhir sambutan dari Bawaslu Provinsi Bengkulu Ibu Patimah Siregar menyampaikan Bawaslu dalam mengawasi verifikasi faktual memastikan prosesnya sesuai prosedur sesuai peraturan UU dan PKPU.

Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan berkas, adapun berkas/dokumen yang diteliti sebagai berikut :

- a) Surat domisili kantor dan pernyataan status kantor dan berkasnya lengkap;
- b) Surat keterwakilan perempuan dalam pengurus partai berkasnya lengkap;
- c) Pencocokan KTP dan KTA Pengurus DPD Partai Demokrat (Ketua, Sekretaris, Bendahara);

Proses Pecocokan KTP dan KTA Ketua, Sekretaris dan Bendahara :

- a) Pencocokan KTP dan KTA Ketua DPD Partai Demokrat atas nama Edison Simbolon dalam hal ini terjadi perbedaan NIK di KTP Asli dengan NIK di sipol hasilnya BMS
- b) Pencocokan KTP dan KTA Bendahara DPD Partai Demokrat atas nama Yani Setianingsih hasilnya MS
- c) Sedangkan sekretaris Demokrat ada perbedaan SK di sipol dengan SK baru yang ditunjukkan oleh pengurus Demokrat Provinsi Bengkulu, di SK sipol masih atas nama Riza Nisbach sedangkan di SK terbaru dijabat Plt atas nama Charil Guswendi Abdul Muluk. Dan dalam pertemuan Charil Guswendi Abdul Muluk pun tidak hadir karena sedang menjalankan umroh dibuktikan Oleh surat pernyataan dan biro perjalanan travel

umroh. Tepat pukul 10.15 wib acara ditutup dan dilanjutkan foto bersama mengkahiri kegiatan.

Selanjutnya Selasa Tanggal 30 Januari 2018 Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Patimah Siregar, M.Pd., Kasubbag TP3 Apriyanto Kurniawan,S.IP dan staf Debisi Ilhodi,S.Sos. Melaksanakan pengawasan langsung verifikasi faktual Kepengurusan an Chairil Guswendi Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Bengkulu yang pada verifikasi tanggal 28 Januari 2018 tidak dapat hadir dikarenakan sedang melaksanakan umroh. Saat video call dari pihak KPU Provinsi yang hadir Ketua KPU Irwan Saputra dan dua orang Anggota Siti Baroroh dan Zainan Sagiman. verifikasi faktual dilakukan dengan video call dari Bengkulu ke Arab Saudi dan hasilnya MS. Kemudian juga tim dari Bawaslu mendapatkan salinan SK terbaru dari DPP Partai Demokrat. Pukul 12.40 Wib tim Bawaslu Provinsi Bengkulu kembali kekantor.

6) Verifikasi Faktual Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Minggu Tanggal 28 Januari 2018Pukul 13.30 Wib Tim Bawaslu Provinsi Bengkulu yang di hadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Ediansyah Hasan, S.H.,M.H., Kasubbag SDMIbu Septi Maryati, S.H.,M.H., Asistensi Bawaslu Provinsi BengkuluBapak Firnandes Maurisyah, S.H.,M.H. dan staf Bawaslu Provinsi BengkuluAfzan fachlevi, S.Kep., Parada Andika, S.Kom., dan Andri Tresna Gumilar, S.Si.Telah melaksanakan pengawasan langsung verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2019. Pertemuan di kantorDPD GERINDRA Provinsi Bengkuluyang terletak dijalan Raden Patah No.7 Pagar Dewa Kota Bengkulu.Tiba dilokasi Pukul 13.50Wib, yang hadir pada pertemuan dari Anggota KPU Provinsi Bengkulu

Bapak Zainan Sagiman dan Bapak Aris Munandar serta Bapak Kabbag Data dan Kasubbag Hukum sertatiga orang staf KPU Provinsi Bengkulu. Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPD GERINDRA Provinsi Bengkulu beserta jajaran pengurus DPD GERINDRA Provinsi Bengkulu. Sambutan pertama oleh Ketua DPD GERINDRA Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa mereka sudah siap untuk dilaksanakan verifikasi faktual sesuai keputusan MK, Kemudian Anggota KPU Provinsi Bengkulu Bapak Zainan Sagiman langsung menyampaikan proses dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual, terakhir sambutan dari Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Ediansyah Hasan, S.H.,M.H., menyampaikan bahwa Bawaslu akan mengawasi verifikasi faktual dan memastikan prosesnya sesuai prosedur yang ada diperaturan UU dan PKPU.

Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan berkas, adapun berkas/dokumen yang diteliti sebagai berikut :

- a) Surat domisili kantor dan pernyataan status kantor dan berkasnya lengkap;
- b) Surat keterwakilan perempuan dalam pengurus partai berkasnya lengkap;
- c) Pencocokan KTP dan KTA Pengurus DPD GERINDRA (Ketua, Sekretaris, Bendahara);

Proses Pecocokan KTP dan KTA Ketua, Sekretaris dan Bendahara :

- a) Pencocokan KTP dan KTA Ketua DPD GERINDRA Provinsi Bengkulu dan dinyatakan MS
- b) Pencocokan KTP dan KTA Bendahara DPD GERINDRA Provinsi Bengkulu dan dinyatakan MS
- c) Pencocokan KTP dan KTA Sekretaris DPD GERINDRA Provinsi Bengkulu dan dinyatakan MS

7). Verifikasi Faktual Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Pada Hari Minggu Tanggal 28 Januari 2018 Tim Bawaslu Provinsi Bengkulu di hadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Bapak Parsadaan Harahap, S.IP., M.Si., Kasubbag HPP Bapak Sholehin, S.H., M.Si., Asistensi Bawaslu Provinsi Bengkulu Ibu Devi Herdiati, S.Pd.I dan staf Bawaslu Provinsi Bengkulu Afif Pratama S.Kom., Armansyah, A.Md.Kom., Mico Yudhistira, S.H. telah melaksanakan pengawasan langsung verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2019. Pertemuan dikantor DPD partai Golkar yang terletak dijalan Asahan No.04 Rt.006/Rw.002 Kel.Padang HaraPAN Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu. Pukul 09.00 wib pertemuan berlangsung di Sekretariat pertemuan kantor Golkar dimana yang hadir pada pertemuan, dari Ketua dan Anggota KPU Provinsi Irwan Saputra ,S.Ag., MM., Eko Sugianto, SP.,M.Si., Kabbag Umum dan Kasubbag Hukum dan empat orang staf KPU Provinsi Bengkulu. Dari DPD partai Golkar yang hadir PLT. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, Sekretaris DPD Partai Golkar H. Ahmad Bakri, Bendahara DPD Partai Golkar Yulianti dan Anggota Kepengurusan lainnya, Sambutan pertama oleh PLT. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, yang menjelaskan Kesiapan DPD Partai Golkar dalam pemeriksaaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan tempat kantor DPD Partai Golkar, dan dilanjutkan dengan Sambutan Ketua KPU Provinsi Bengkulu yang menjelaskan kedatangan dan mekanisme proses verifkasi faktual, pada saat pelaksanaan verifikasi faktual oleh pihak KPU Provinsi Bengkulu adapun berkas yang diverifikasi sebagai berikut :

- a) Surat domisili kantor dan pernyataan status kantor : Berkasnya Lengkap
- b) Surat keterwakilan perempuan dalam pengurus partai : Berkasnya Lengkap
- c) Pencocokan KTP dan KTA :

- 1) PLT. Ketua DPD partai Golkar :Cocok
- 2) Sekretaris DPD partai Golkar : Perbedaan No KTA Asli dan No KTP di Sipol
- 3) Bendahara DPD partai Golkar : KTA belum dibawa pada saat verifikasi, dan perbaikan akan di tunggu sampe pukul 16.00 Wib di Kantor KPU Provinsi Bengkulu, pada pukul 16.00 Wib Yang bersangkutan diwakili LO datang ke KPU Untuk membawa KTA tsb, dan dinyatakan : Cocok

8). Verifikasi Faktual Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

Pada hari Minggu Tanggal 28 Januari 2018 pada pukul 09.30 Wib Tim Bawaslu Provinsi Bengkulu di hadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Ediansyah Hasan, S.H.,M.H., Kasubbag SDM Ibu Septi Maryati, S.H.,M.H., Asistensi Bawaslu Provinsi Bengkulu Bapak Firnandes Maurisyah, S.H.,M.H. dan staf Bawaslu Provinsi Bengkulu Afzan fachlevi, S.Kep., Parada Andika, S.Kom., dan Andri Tresna Gumilar, S.Si bergerak menuju DPW NASDEM Provinsi Bengkulu.Untuk melaksanakan pengawasan langsung verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2019. Pertemuan di kantor DPW NASDEM Provinsi Bengkulu yang terletak di jalan kolonel berlian Malabro Kota Bengkulu.Tepat Pukul 10.00 wibTim Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Tim KPU Provinsi Bengkulu sampai di lokasi Kantor DPW NASDEM Provinsi Bengkulu, disana Tim Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Tim KPU Provinsi Bengkulu disambut Langsung oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPW NASDEM Provinsi Bengkulu beserta jajaran pengurus DPW NASDEM Provinsi Bengkulu. dari Anggota KPU Provinsi Bengkulu Bapak Zainan Sagiman dan Bapak Aris Munandar serta Bapak Kabbag Data dan Kasubbag Hukum serta tiga orang staf KPU Provinsi Bengkulu. Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPW NASDEM Provinsi Bengkulu beserta jajaran pengurus DPW NASDEM

Provinsi Bengkulu. Sambutan pertama dibuka oleh Ketua DPW NASDEM Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa mereka sudah siap untuk dilaksanakan verifikasi faktual sesuai keputusan MK, Kemudian Anggota KPU Provinsi Bengkulu Bapak Zainan Sagiman langsung menyampaikan proses dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual, terakhir sambutan dari Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Ediansyah Hasan, S.H.,M.H., menyampaikan bahwa Bawaslu akan melakukan pengawasan melekat dalam proses verifikasi faktual dan memastikan prosesnya sesuai prosuder yang ada diperaturan UU dan PKPU.

Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan berkas, adapun berkas/dokumen yang diteliti sebagai berikut :

- 1) Surat domisili kantor dan pernyataan status kantor dan berkasnya lengkap;
 - 2) Surat keterwakilan perempuan dalam pengurus partai berkasnya lengkap;
 - 3) Pencocokan KTP dan KTA Pengurus DPW NASDEM (Ketua, Sekretaris, Bendahara);
 - a. Pencocokan KTP dan KTA Ketua DPW NASDEM Provinsi Bengkulu dan dinyatakan MS
 - b. Pencocokan KTP dan KTA Bendahara DPW NASDEM Provinsi Bengkulu dan dinyatakan MS
 - c. Pencocokan KTP dan KTA Sekretaris DPW NASDEM Provinsi Bengkulu dan dinyatakan MS
- 9). Verifikasi Faktual Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Pada Hari Minggu Tanggal 28 Januari 2018 Tim Bawaslu Provinsi Bengkulu di hadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Bapak Parsadaan Harahap, S.IP., M.Si., Kasubbag HPP Bapak Sholehin, S.H., M.Si., Asistensi Bawaslu Provinsi Bengkulu Ibu Devi Herdiati, S.Pd.I dan staf Bawaslu Provinsi Bengkulu Afif Pratama

S.Kom., Armansyah, A.Md.Kom., Mico Yudhistira, S.H. telah melaksanakan pengawasan langsung verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2019. Pertemuan dikantor DPD partai PDIP yang terletak di jalan Raflesia No.77 Nusa Indah Kota Bengkulu. Pukul 14.00 wib pertemuan berlangsung di Sekretariat pertemuan kantor Golkar dimana yang hadir pada pertemuan, dari Ketua dan Anggota KPU Provinsi Irwan Saputra ,S.Ag., MM., Eko Sugianto, SP.,M.Si., Kabbag Umum dan Kasubbag Hukum dan empat orang staf KPU Provinsi Bengkulu. Dari DPD partai PDIP yang hadir Ketua DPD Partai PDIP Provinsi Bengkulu, Sekretaris DPD Partai PDIP, Bendahara DPD Partai PDIP dan Anggota Kepengurusan lainnya, Kata Sambutan pertama oleh Ketua DPD Partai PDIP Provinsi Bengkulu, yang pada pokoknya menjelaskan Kesiapan DPD Partai PDIP dalam pemeriksaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan tempat kantor DPD Partai PDIP, dan dilanjutkan dengan Sambutan Ketua KPU Provinsi Bengkulu yang menjelaskan kedatangan dan mekanisme proses verifikasi faktual, pada saat pelaksanaan verifikasi faktual oleh pihak KPU Provinsi Bengkulu adapun berkas yang diverifikasi sebagai berikut :

- a) Surat domisili kantor dan pernyataan status kantor dan berkasnya lengkap
- b) Surat keterwakilan perempuan dalam pengurus partai berkasnya lengkap
- c) Pencocokan KTP dan KTA :
 - 1) Ketua DPD partai PDIP :Cocok
 - 2) Sekretaris DPD partai PDIP : Perbedaan No KTA Asli dan No KTP di Sipol
 - 3) Bendahara DPD partai PDIP : Cocok. Tepat pukul 14.49 wib acara ditutup dan dilanjutkan foto bersama mengakhiri kegiatan.

10). Verifikasi Faktual Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Pada hari Senin Tanggal 28 Januari 2018 Tim Bawaslu Provinsi Bengkulu di hadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Ibu Patimah Siregar, M.Pd., Kasubbag TP3 Bapak Apriyanto Kurniawan,S.IP, Asistensi Bawaslu Provinsi Bengkulu Bapak Irvan Yudha Oktara,SH dan staf Bawaslu Provinsi Bengkulu Debisi Ilhodi,S.Sos, Elvis Masril,SE, dan Yopi Guantara Tanjung,S.AB. Telah melaksanakan pengawasan langsung verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2019. Pertemuan di kantor DPD Partai HANURA yang terletak di Jl. P. Natadirja No.23 RT.04 RW.01 Kel.Jalan Gedang Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu. Pukul 15.40 Wib. Yang hadir pada pertemuan, dari Anggota KPU Provinsi Bengkulu Ibu Siti Baroroh, Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Bapak Siswanto, Kabbag Data dan empat orang staf KPU Provinsi Bengkulu. Dari DPD Partai HANURA dihadiri Ketua Musilihan DS, Sekretaris Usin Abdiansyah Putra Sembiring, Bendahara Dannie Sammadhi beserta jajaran pengurus DPD Partai HANURA Provinsi Bengkulu. Sambutan pertama oleh Ketua DPD HANURA menyampaikan terima kasih banyak atas kedatangan KPU Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Provinsi Bengkulu DPD HANURA siap untuk dilaksanakan verifikasi faktual sesuai keputusan MK, Sambutan Kedua oleh KPU Provinsi Bengkulu Ibu Siti Baroroh menyampaikan proses dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual, terakhir sambutan dari Bawaslu Provinsi Bengkulu Ibu Patimah Siregar menyampaikan Bawaslu dalam mengawasi verifikasi faktual mamastikan prosesnya sesuai prosuder sesuai peraturan UU dan PKPU.

Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan berkas,adapun berkas/dokumen yang diteliti sebagai berikut :

- a) Surat domisili kantor dan pernyataan status kantor dan berkasnya lengkap;

- b) Surat keterwakilan perempuan dalam pengurus partai berkasnya lengkap;
- c) Pencocokan KTP dan KTA Pengurus DPD Partai HANURA (Ketua, Sekretaris, Bendahara);
 - 1) Pencocokan KTP dan KTA Ketua DPD Partai HANURA atas nama Muslihan DS hasilnya MS
 - 2) Pencocokan KTP dan KTA Sekretaris DPD Partai HANURA atas nama Usin Abdiansyah Putra Sembiring hasilnya MS
 - 3) Pencocokan KTP dan KTA Bendahara DPD Partai HANURA atas nama Dannie Sammadhi hasilnya MS.

Tepat pukul 16.20 wib acara ditutup dan dilanjutkan foto bersama mengakhiri kegiatan.

11). Verifikasi Faktual Partai Amanat Rakyat (PAN)

Senin pagi Tanggal 29 Januari 2018, pada pukul 08.45 wib Tim Bawaslu Provinsi Bengkulu di hadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Ediansyah Hasan, S.H.,M.H., Kasubbag SDM Ibu Septi Maryati, S.H.,M.H., Asistensi Bawaslu Provinsi Bengkulu Bapak Firnandes Maurisyah, S.H.,M.H. dan staf Bawaslu Provinsi Bengkulu Afzan fachlevi, S.Kep., Parada Andika, S.Kom., dan Andri Tresna Gumilar, S.Si langsung menuju DPW PAN Provinsi Bengkulu. Tiba dilokasi Pada Pukul 08.45Wibuntuk melaksanakan pengawasan langsung verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2019. Pengawasan dilakukan di kantor DPW PAN Provinsi Bengkulu yang terletak dijalan S.Parman Tanah Patah Kota Bengkulu.Yang hadir pada pertemuan tersebut, dari Anggota KPU Provinsi Bengkulu Bapak Zainan Sagiman dan Bapak Aris Munandar serta Bapak Kabbag Data dan Kasubbag Hukum serta tiga orang staf KPU Provinsi Bengkulu.Sesampai disana Tim dari KPU Provinsi Bengkulu dan Tim

Bawaslu Provinsi Bengkulu disambut langsung oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPW PAN Provinsi Bengkulu beserta jajaran pengurus DPW PAN Provinsi Bengkulu. Setelah beberapa waktu kemudian Ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu langsung memberikan kata sambutan pertama untuk menyampaikan bahwa mereka menyambut hangat Tim dari KPU Provinsi Bengkulu dan Tim Bawaslu Provinsi Bengkulu sebagai Verifikator dan Pengawasan melekat khususnya Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu juga menyampaikan bahwa DPW PAN Provinsi Bengkulu sudah siap untuk dilaksanakan verifikasi faktual oleh KPU Provinsi Bengkulu berdasarkan hasil keputusan MK beberapa hari yang lalu, Kemudian Anggota KPU Provinsi Bengkulu Bapak Zainan Sagiman langsung menyampaikan proses dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual dimana mereka pada hari tersebut adalah sebagai tim verifikasi dan bukan sebagai komisioner KPU Provinsi Bengkulu, sehingga hasilnya nanti akan di plenokan di KPU Provinsi Bengkulu. Terakhir sambutan dari Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Ediansyah Hasan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu akan memastikan dan akan melakukan pengawasan melekat terhadap verifikasi faktual dan akan memastikan prosesnya sesuai prosedur yang ada di peraturan UU dan PKPU.

Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan berkas, adapun berkas/dokumen yang diteliti sebagai berikut :

- a) Surat domisili kantor dan pernyataan status kantor dan berkasnya lengkap;
- b) Surat keterwakilan perempuan dalam pengurus partai berkasnya lengkap;
- c) Pencocokan KTP dan KTA Pengurus DPW PAN Provinsi Bengkulu (Ketua, Sekretaris, Bendahara);

- 1) Pencocokan KTP dan KTA Ketua DPW PAN Provinsi Bengkulu dan dinyatakan MS
- 2) Pencocokan KTP dan KTA Bendahara DPW PAN Provinsi Bengkulu dan dinyatakan MS
- 3) Pencocokan KTP dan KTA Sekretaris DPW PAN Provinsi Bengkulu dan dinyatakan MS

12). Verifikasi Faktual Partai Bulan Bintang (PBB)

Pada hari Senin Tanggal 29 Januari 2018 Tim Bawaslu Provinsi Bengkulu di hadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap, S.P., M.Si. Kasubbag H2AL Bapak Sholehin, S.H. M.Si, Asistensi Bawaslu Provinsi Bengkulu Devi Herdianti, S.Pd,I, dan staf Bawaslu Provinsi Bengkulu, telah melaksanakan pengawasan langsung verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2019. Pertemuan di kantor DPW Partai Bulan Bintang yang terletak di jalan Kapuas Raya Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu pukul 14.00 WIB. Tim Verifikator KPU Provinsi Bengkulu di hadiri Ketua dan anggota KPU Provinsi Bengkulu Irwan Saputra dan Siti Baroroh di dampingi Kabag, Kasubbag dan Staf Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu berjumlah 9 orang. Dari DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PBB di hadiri Ketua, Seketaris, Bendaharabeserta jajaran pengurus DPW PBB Provinsi Bengkulu. Sambutan pertama oleh Ketua DPW PBB menyampaikan siap untuk dilaksanakan verifikasi faktual sesuai keputusan MK, Sambutan Kedua oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan Bawaslu dalam mengawasi verifikasi faktual mamastikan prosesnya sesuai prosedur sesuai dengan peraturan, terakhir sambutan dari Ketua KPU Provinsi Bengkulu menyampaikan proses dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual.

Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan berkas, adapun berkas/dokumen yang diteliti sebagai berikut :

- a) Surat domisili kantor dan pernyataan status kantor dan berkasnya lengkap;
- b) Surat keterwakilan 30% perempuan dalam pengurus partai berkasnya lengkap;
- c) Pencocokan KTP dan KTA Pengurus DPW Partai PBB (Ketua, Sekretaris, Bendahara) tidak ada perbedaan ;

Pukul 15.25 wib acara ditutup dan dilanjutkan foto bersama mengakhiri kegiatan

13). Verifikasi Faktual Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Pada hari Senin Tanggal 29 Januari 2018 Tim Bawaslu Provinsi Bengkulu di hadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Ibu Patimah Siregar, M.Pd., Kasubbag TP3 Bapak Apriyanto Kurniawan,S.IP, Asistensi Bawaslu Provinsi Bengkulu Bapak Irvan Yudha Oktara,SH dan staf Bawaslu Provinsi Bengkulu Debisi Ilhodi,S.Sos, Elvis Masril,SE, dan Yopi Guantara Tanjung,S.AB. Telah melaksanakan pengawasan langsung verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2019. Pertemuan di kantor DPW PKB yang terletak di Jl. Danau RT.001 RW.001 Kel. Dusun Besar Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu. Yang hadir pada pertemuan, dari Anggota KPU Provinsi Bengkulu Eko Sugianto, Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Bapak Siswanto, Kabbag Hukum dan empat orang staf KPU Provinsi Bengkulu. Dari DPW PKB dihadiri Ketua Heliardo, Sekretaris Jauhari Salim, Bendahara Subhan Amin beserta jajaran pengurus DPW PKB Provinsi Bengkulu. Sambutan pertama oleh Ketua DPW PKB menyambut baik kedatangan KPU dan Bawaslu Provinbsi Bengkulu dan siap untuk dilaksanakan verifikasi faktual, Sambutan Kedua oleh KPU Provinsi Bengkulu Eko Sugianto menyampaikan proses dan

mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual yang akan di verifikasi adalah KTP, KTA Ketua Sekretaris dan Bendahara, Pernyataan 30 % perempuan dan kantor partai. terakhir sambutan dari Bawaslu Provinsi Bengkulu Ibu Patimah Siregar menyampaikan Bawaslu dalam mengawasi verifikasi faktual mamastikan prosesnya sesuai prosuder sesuai peraturan UU dan PKPU.

Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan berkas, adapun berkas/dokumen yang diteliti sebagai berikut :

- a) Surat domisili kantor dan pernyataan status kantor dan berkasnya lengkap;
- b) Surat keterwakilan perempuan dalam pengurus partai berkasnya lengkap;
- c) Pencocokan KTP dan KTA Pengurus DPW PKB (Ketua, Sekretaris, Bendahara);
 - 1) Pencocokan KTP dan KTA Ketua DPW PKB atas nama Heliardo hasilnya MS
 - 2) Pencocokan KTP dan KTA Sekretaris DPW PKB atas nama Jauhari Salim hasilnya MS
 - 3) Pencocokan KTP dan KTA Bendahara DPW PKB atas nama Subhan Amin dalam hal ini ada perbedaan antara no KTA yang di input di sipol dengan no KTA yang dimiliki hasilnya BMS
 - 4) Tepat pukul 10.30 wib acara ditutup dan dilanjutkan foto bersama mengakhiri kegiatan.

14). Verifikasi Faktual Partai Keadiln Persatuan Indonesia (PKPI)

Pada hari Senin Tanggal 29 Januari 2018 Tim Bawaslu Provinsi Bengkulu di hadir langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap, S.P., M.Si. Kasubbag H2AL Bapak Sholehin, S.H. M.Si, Asistensi Bawaslu Provinsi Bengkulu Devi Herdianti, S.Pd,I, dan staf Bawaslu Provinsi Bengkulu, telah melaksanakan pengawasan

langsung verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2019. Pertemuan di kantor DPD Partai Demokrat yang terletak di Jalan Batanghari No. 55 RT. 12 RW. 03 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu pukul 09.30 WIB. Tim Verifikator KPU Provinsi Bengkulu dihadiri Ketua dan anggota KPU Provinsi Bengkulu Irwansyah Putra dan Siti Baroroh didampingi Pejabat dan Staf Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu berjumlah 9 orang. Dari DPP (Dewan Pimpinan Provinsi) PKPI dihadiri Ketua Hermedi Rian, Sekretaris Sofyan Hosen, Bendahara Dameria R. Sipayung beserta jajaran pengurus DPP PKPI Provinsi Bengkulu. Sambutan pertama oleh Ketua PKPI menyampaikan siap untuk dilaksanakan verifikasi faktual sesuai keputusan MK, Sambutan Kedua oleh Ketua KPU Provinsi menyampaikan proses dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual, terakhir sambutan dari Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan Bawaslu dalam mengawasi verifikasi faktual memastikan prosesnya sesuai prosedur sesuai peraturan UU dan PKPU.

Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan berkas, adapun berkas/dokumen yang diteliti sebagai berikut :

- a) Surat domisili kantor dan pernyataan status kantor dan berkasnya lengkap;
- b) Surat keterwakilan 30% perempuan dalam pengurus partai berkasnya lengkap;
- c) Pencocokan KTP dan KTA Pengurus DPP Partai PKPI (Ketua, Sekretaris, Bendahara);
 - 1) Pencocokan KTP dan KTA Ketua DPP (Dewan Pimpinan Provinsi) PKPI atas nama Hermedi Rian tidak terjadi perbedaan.

- 2) Pencocokan KTP dan KTA sekretaris DPP (Dewan Pimpinan Provinsi) PKPI atas nama Syofyan Hosen tidak terjadi perbedaan
- 3) Pencocokan KTP dan KTA Bendahara DPP (Dewan Pimpinan Provinsi) PKPI atas nama Yusna Rosita dalam hal ini yang bersangkutan hanya memiliki surat keterangan perekaman EKTP yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tidak terjadi perbedaan.

Sedangkan Tepat pukul 10.15 wib acara ditutup dan dilanjutkan foto bersama mengakhiri kegiatan.

15). Verifikasi Faktual Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Pada hari Senen Tanggal 29 Januari 2018 Tim Bawaslu Provinsi Bengkulu di hadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Ibu Patimah Siregar, M.Pd., Kasubbag TP3 Bapak Apriyanto Kurniawan,S.IP, Asistensi Bawaslu Provinsi Bengkulu Bapak Irvan Yudha Oktara,SH dan staf Bawaslu Provinsi Bengkulu Debisi Ilhodi,S.Sos, Elvis Masril,SE, dan Yopi Guantara Tanjung,S.AB. Telah melaksanakan pengawasan langsung verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2019. Pertemuan di kantor DPW PKS yang terletak di Jl. Indra Giri RT.003/RW.01 Kel.Padang Harapan Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu. Yang hadir pada pertemuan, dari Anggota KPU Provinsi Bengkulu Eko Sugianto, Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Bapak Siswanto, Kabbag Hukum dan empat orang staf KPU Provinsi Bengkulu. Dari DPW PKS dihadiri Ketua Sujono, Sekretaris Alamsyah, Bendahara Herizal Apriansyah beserta jajaran pengurus DPW PKS Provinsi Bengkulu sebanyak 22 orang. Sambutan pertama oleh Ketua DPW PKS menyambut baik kedatangan KPU dan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan siap untuk dilaksanakan verifikasi faktual, Sambutan Kedua oleh KPU Provinsi Bengkulu Eko Sugianto menyampaikan

proses dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual yang akan di verifikasi adalah KTP, KTA Ketua Sekretaris dan Bendahara, Pernyataan 30 % perempuan dan kantor partai. Terakhir sambutan dari Bawaslu Provinsi Bengkulu Ibu Patimah Siregar menyampaikan Bawaslu dalam mengawasi verifikasi faktual memastikan prosesnya sesuai prosedur sesuai peraturan UU dan PKPU dan memastikan semua tahapan terawasi.

Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan berkas, adapun berkas/dokumen yang diteliti sebagai berikut :

- a) Surat domisili kantor dan pernyataan status kantor dan berkasnya lengkap;
- b) Surat keterwakilan perempuan dalam pengurus partai berkasnya lengkap;
- c) Pencocokan KTP dan KTA Pengurus DPW PKS (Ketua, Sekretaris, Bendahara);
 - 1) Pencocokan KTP dan KTA Ketua DPW PKS atas nama Sujono hasilnya MS
 - 2) Pencocokan KTP dan KTA Sekretaris DPW PKS atas nama Alamsyah hasilnya MS
 - 3) Pencocokan KTP dan KTA Bendahara DPW PKS atas nama Herizal Apriansyah hasilnya MS.

Tepat pukul 15.43 wib acara ditutup dan dilanjutkan foto bersama mengakhiri kegiatan.

16).Verifikasi Faktual Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Pada hari Senin Tanggal 29 Januari 2018, pada pukul 13.30 wib Tim Bawaslu Provinsi Bengkulu di hadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Ediansyah Hasan, S.H.,M.H., Kasubbag SDM Ibu Septi Maryati, S.H.,M.H., Asistensi Bawaslu Provinsi Bengkulu Bapak Firnandes Maurisyah, S.H.,M.H. dan staf Bawaslu

Provinsi Bengkulu Afzan Fachlevi, S.Kep., Parada Andika, S.Kom., dan Andri Tresna Gumilar, S.Si bergerak menuju DPW PPP Provinsi Bengkulu. Untuk melaksanakan pengawasan langsung verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2019. Pertemuan di kantor DPW PPP Provinsi Bengkulu yang terletak di Jalan Sutoyo No.19 Tanah Patah Kota Bengkulu. Yang hadir pada pertemuan tersebut, dari Anggota KPU Provinsi Bengkulu Bapak Zainan Sagiman dan Bapak Aris Munandar serta Bapak Kabag Data dan Kasubbag Hukum serta tiga orang staf KPU Provinsi Bengkulu. Sesampai disana Tim dari KPU Provinsi Bengkulu dan Tim Bawaslu Provinsi Bengkulu disambut langsung oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPW PPP Provinsi Bengkulu beserta jajaran pengurus DPW PPP Provinsi Bengkulu. Kemudian beberapa waktu kemudian, sambutan pertama oleh Ketua DPW PPP Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa selamat datang kepada KPU Provinsi Bengkulu dan Tim Bawaslu Provinsi Bengkulu dan menjelaskan bahwa mereka sudah siap untuk dilaksanakan verifikasi faktual sesuai keputusan MK, Kemudian Anggota KPU Provinsi Bengkulu Bapak Zainan Sagiman langsung menyampaikan proses dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual, terakhir sambutan dari Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Ediansyah Hasan, S.H.,M.H., menyampaikan bahwa Bawaslu akan melakukan pengawasan melekat terhadap verifikasi faktual dan memastikan prosesnya sesuai prosedur yang ada di Peraturan UU dan PKPU.

Selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan berkas, adapun berkas/dokumen yang diteliti sebagai berikut :

- a) Surat domisili kantor dan pernyataan status kantor dan berkasnya lengkap;
- b) Surat keterwakilan perempuan dalam pengurus partai berkasnya lengkap;

- c) Pencocokan KTP dan KTA Pengurus DPW PPP (Ketua, Sekretaris, Bendahara);
 - 1) Pencocokan KTP dan KTA Ketua DPW PPP Provinsi Bengkulu dan dinyatakan MS
 - 2) Pencocokan KTP dan KTA Bendahara DPW PPP Provinsi Bengkulu dan dinyatakan MS
 - 3) Pencocokan KTP dan KTA Sekretaris DPW PPP Provinsi Bengkulu dan dinyatakan MS
 - 4) Setelah dihitung untuk kuota perempuan partai PPP hanya 29,16 % kuota perempuan sehingga tidak mencukupi 30 % kuota perempuan.

3. Hasil-hasil Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik

a. Temuan

- 1) Berdasarkan hasil pengawasan langsung yang dilakukan pada saat sosialisasi PKPU Nomor 11 tahun 2017, pada hari Jum'at tanggal 29 September 2017 di Hotel Santika Bengkulu terdapat Partai Politik yang tidak hadir.
- 2) Partai Politik belum patuh dalam melengkapi dan atau memperbaiki dokumen persyaratan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU.
- 3) Banyak Partai Politik yang menyerahkan dokumen persyaratan di hari-hari terakhir batas waktu yang telah ditetapkan.
- 4) Pada saat verifikasi faktual kepengurusan, ada pengurus Partai Politik yang tidak mempersiapkan KTP elektronik/Suket dari Disdukcapil serta adanya perbedaan NIK pada KTP elektronik dan NIK yang tertera pada KTA.

- 5) Pada saat verifikasi faktual ada pengurus Partai yang tidak hadir dengan alasan tertentu.

b. Rekomendasi

- 1) Berdasarkan temuan pada saat sosialisasi PKPU Nomor 11 tahun 2017 terdapat Partai Politik yang tidak hadir maka diterbitkan surat rekomendasi nomor 195/BAWASLU PROV.BE/PM.02/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 kepada KPU Provinsi Bengkulu; Perihal Rekomendasi untuk melakukan sosialisasi kembali terkhusus kepada Partai Politik yang belum hadir pada saat sosialisasi dilakukan.
- 2) Partai Politik kiranya patuh dalam melengkapi dan atau memperbaiki dokumen persyaratan sesuai jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU.
- 3) Partai Politik kiranya lebih efektif dalam hal waktu penyerahan dokumen persyaratan partai politik, yakni tidak penyerahan kelengkapan dokumen persyaratan atau perbaikan pada hari-hari terakhir batas waktu yang telah ditetapkan.
- 4) Pengurus Partai Politik yang tidak bisa menunjukkan KTP elektronik direkomendasikan untuk datang ke KPU dengan membawa KTP elektronik atau suket dari Disdukcapil.
- 5) Pengurus Partai Politik yang tidak ada di kantor pada saat verifikasi faktual direkomendasikan untuk datang ke KPU dengan membawa KTP elektronik, KTA dan SK sebagai pengurus di tingkat Provinsi.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

- 1) Berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 195/BAWASLU PROV.BE/PM.02/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017, maka KPU Provinsi Bengkulu melakukan

sosialisasi kembali khususnya kepada Partai Politik yang belum hadir pada sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Santika. Sosialisasi susulan sesuai rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu dilaksanakan di kantor KPU Provinsi Bengkulu pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017.

- 2) Berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu pengurus Partai Politik yang tidak bisa menunjukkan KTP elektronik pada saat verifikasi faktual akhirnya datang ke KPU dengan membawa KTP elektronik dan dianggap memenuhi syarat.
- 3) Pengurus Partai Politik yang berhalangan hadir pada saat verifikasi faktual atas rekomendasi Bawaslu akhirnya datang ke KPU dengan membawa dokumen persyaratan dan dinyatakan memenuhi syarat.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Verifikasi Partai Politik

Pengawasan bertujuan untuk memastikan tahapan sesuai dengan peraturan dan undang-undang. Untuk memastikan hal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku tentunya menghadapi tantangan yang menjadi dinamika dalam melakukan pengawasan tahapan Verifikasi Partai Politik tahun 2019. Lemahnya aturan dan perbedaan pemahaman/penafsiran terhadap regulasi menimbulkan dinamika antara penyelenggara dan peserta pemilu.

Persoalan yang dihadapi Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengawasan verifikasi partai Politik peserta pemilu 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Bawaslu Provinsi Bengkulu tidak dapat mengakses Sipol, sehingga tidak dapat memastikan bahwa jumlah anggota pada F2 Parpol yang diserahkan Partai Politik adalah benar dan sesuai dengan yang terdapat pada Sipol.

- b. Kurangnya akses data pada saat proses pelaksanaan verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2019.
- c. Pada saat verifikasi faktual kepengurusan, ada pengurus Partai Politik yang tidak mempersiapkan KTP elektronik/Suket dari Disdukcapil serta adanya perbedaan NIK pada KTP elektronik dan NIK yang tertera pada KTA.
- d. Bawaslu menghadapi tantangan yang sangat besar dalam melaksanakan tugas pengawasan. Tantangan tersebut terkait dengan permasalahan yang beragam yang akan muncul seperti politik uang, kompetisi antar partai-partai besar persaingan sesama calon legislatif yang berasal dari satu partai dan lain-lain. Hal tersebut akan berpotensi memunculkan banyaknya penyimpangan yang harus diantisipasi oleh pengawas Pemilu.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Verifikasi Partai Politik

Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan pada tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu tahun 2019, ada beberapa hal yang menjadi bahan evaluasi untuk menentukan kebijakan selanjutnya yaitu:

- a) Kurangnya bimbingan teknis khusus pada tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik tahun 2019
- b) Alat kerja pengawasan disampaikan pada waktu masuknya tahapan.
- c) Perbawaslu tentang pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik baru dikeluarkan pada akhir Januari 2018 pasca putusan MK, sedangkan pengawasan sudah dimulai pada bulan Oktober 2017.

C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon Anggota DPD/ DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

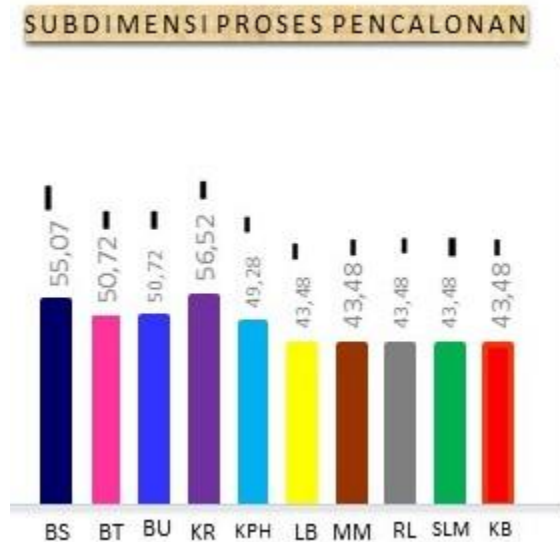
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Anggota DPD/ DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Indeks kerawanan Pemilu dibagi kedalam tiga tingkatan yaitu: kategori rendah digambarkan dengan skor 0,00 – 33,00; kategori sedang adalah skor indeks kerawanan pada interval 33,01 – 66,00; dan indeks yang berada pada angka 66,01 – 100,00 dikategorikan kerawanan tinggi.

Indeks kerawanan pemilu Provinsi Bengkulu secara keseluruhan berada dalam kategori kerawanan sedang yaitu sebesar 50,37. Jika dibandingkan dengan IKP Nasional sebesar 49,63, IKP Provinsi Bengkulu masih lebih tinggi 0,74

Diagram 5. Sub Dimensi Proses Pencalonan



Berdasarkan grafik diatas, Indek kerawan pemilu subdimensi proses pencalonan tingkat Provinsi Bengkulu rata-rata berada pada angka 47,97. Apabila dilihat per Kabupaten tampak jelas bahwa 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu

Tengah, Bengkulu Utara, Kaur, dan Kepahiang yang mana memiliki angka lebih tinggi dari rata-rata Provinsi yaitu 47,97. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat proses pencalonan tingkat Provinsi Bengkulu di 5 (lima) Kabupaten tersebut pada subtahapan pencalonan tingkat Provinsi Bengkulu masih sebandingkan dengan 5 (lima) Kabupaten/kota lainnya yang rata-rata 43,48.

b. Perencanaan Pengawasan

1) Bimbingan Teknis

Tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan kewenangan Bawaslu Provinsi Bengkulu tidak melakukan pengawasan terhadap pendaftaran melainkan pada pelaksanaan verifikasi dukungan calon anggota DPD. Bawaslu Provinsi Bengkulu mengadakan bimbingan teknis terkait pengisian alat kerja pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan se-Provinsi Bengkulu dilakukan di Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu. Bimbingan teknis dilakukan satu kali yaitu sebelum masuknya tahapan verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD RI.

2) Koordinasi

Koordinasi adalah hal yang sangat penting harus dilakukan dan dijaga oleh jajaran pengawas demi tercapainya kualitas pengawasan yang baik dan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pada tahapan verifikasi dukungan calon anggota DPD RI. Koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Bengkulu dilakukan kepada:

- a) Bawaslu RI yang merupakan lembaga di atas Bawaslu Provinsi Bengkulu.

- b) KPU Provinsi Bengkulu selaku pelaksana verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD RI.
- c) LO calon perseorangan DPD RI.
- d) Pihak RT/RW pendukung demi memastikan bahwa pendukung tersebut sesuai dengan dokumen kependudukan.
- e) Pihak media. Media adalah partner penting jajaran pengawas hal ini untuk mendapatkan informasi dari berbagai elemen masyarakat terkait dengan pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon DPD RI.

3) Supervisi

Secara *locus* pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi dukungan calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu dilakukan oleh Pengawas Pemilu Kelurahan, Panwaslu Kecamatan dan wajib disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu yang bertujuan untuk memastikan pedoman teknis pengawasan dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan serta melihat langsung pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD RI yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan se-Provinsi Bengkulu. Adapun kegiatan supervisi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada Panwaslu Kecamatan beserta Pengawas Pemilu Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a) Supervisi ke Panwaslu Kecamatan Kampung Melayu, Selebar dan Gading Cempaka dilakukan pada tanggal 30 Mei 2018.
- b) Supervisi ke Panwaslu Kecamatan Singaran Pati, Muara Bangkahulu, Singaran Pati pada tanggal 5 Juni 2018.
- c) Supervisi ke Panwaslu Kecamatan Ratu Samban, Ratu Agung, Teluk Segara pada tanggal 7 Juni 2018.

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon Anggota DPD/DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

a. Pencegahan

Melakukan supervisi dengan *locus* pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi dukungan calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu dilakukan oleh Pengawas Pemilu Kelurahan, Panwaslu Kecamatan dan wajib disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu yang bertujuan untuk memastikan pedoman teknis pengawasan dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan serta melihat langsung pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD RI yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan se-Provinsi Bengkulu. Adapun kegiatan supervisi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada Panwaslu Kecamatan beserta Pengawas Pemilu Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Supervisi ke Panwaslu Kecamatan Kampung Melayu, Selebar dan Gading Cempaka dilakukan pada tanggal 30 Mei 2018.
2. Supervisi ke Panwaslu Kecamatan Singaran Pati, Muara Bangkahulu, Singaran Pati pada tanggal 5 Juni 2018.
3. Supervisi ke Panwaslu Kecamatan Ratu Samban, Ratu Agung, Teluk Segara pada tanggal 7 Juni 2018.

b. Aktivitas Pengawasan

1) Pengumuman Pendaftaran

KPU Provinsi Bengkulu melakukan pengumuman pendaftaran Pencalonan Anggota DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Jadwal Pemilu 2019 tertuang dalam Peraturan PKPU Nomor 7 tahun 2017 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. Pemungutan suara Pileg 2019 akan berlangsung serentak dengan Pilpres 2019 yaitu pada 17 April 2019. Meski serentak, pendaftaran calon legislatif dibuka lebih dahulu daripada capres. Pendaftaran calon legislatif untuk anggota DPRD Provinsi Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dibuka pada tanggal 4 Juli – 17 Juli 2018.

2) Pendaftaran dan Penyerahan Syarat Pendaftaran serta Penerimaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan

Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan langsung pada tahapan Pendaftaran dan penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan oleh Partai Politik kepada KPU Provinsi Bengkulu. Pendaftaran dilakukan oleh LO (*Liaison officer*) yang mendapat mandat dari pengurus masing-masing partai politik. Adapun kegiatan pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Pengawasan pendaftaran dan penyerahan syarat pendaftaran serta penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan

No	Kegiatan Pengawasan	Tanggal	Keterangan
1.	Pengawasan langsung pendaftaran I	16 Juli 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Politik PKB Mendaftar pukul 11.35 wib dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) dengan diberikannya Form Model TT. 2. PKS Mendaftar pukul 14.36 wib dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) dengan diberikannya Form Model TT 3. Demokrat Mendaftar pukul 14.36 wib, namun berkas dari parpol Demokrat dikembalikan oleh KPU Provinsi Bengkulu dengan dikeluarkannya Berita Acara Pengembalian karena terdapat dokumen syarat pengajuan bakal calon belum memenuhi syarat. 4. Nasdem

			Mendaftar pukul 14.36 wib dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) dengan diberikannya Form Model TT.
2	Pengawasan langsung pendaftaran II	17 Juli 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAN Mendaftar pukul 08.28 wib dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) dengan diberikannya Form Model TT. 2. Demokrat Mendaftar pukul 08.30 wib dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) dengan diberikannya Form Model TT. 3. Perindo Mendaftar pukul 10.58 wib dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) dengan diberikannya Form Model TT. 4. Hanura Mendaftar pukul 14.10 wib dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) dengan diberikannya Form Model TT. 5. Golkar Mendaftar pukul 14.35 wib dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) dengan diberikannya Form Model TT. 6. PPP Mendaftar pukul 15.05 wib dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) dengan diberikannya Form Model TT. 7. PKPI Mendaftar pukul 15.40 wib dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) dengan diberikannya Form Model TT. 8. Berkarya Mendaftar pukul 15.38 wib dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) dengan diberikannya Form Model TT. 9. PDIP Mendaftar pukul 20.28 wib dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) dengan diberikannya Form Model TT. 10. Gerindra Mendaftar pukul 21.07 wib dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) dengan diberikannya Form Model TT. 11. PBB

			<p>Mendaftar pukul 21.34 wib dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) dengan diberikannya Form Model TT.</p> <p>12. Garuda Mendaftar pukul 22.53wib dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) dengan diberikannya Form Model TT.</p> <p>13. PSI Mendaftar pukul 23.13 wib dan dinyatakan memenuhi syarat (MS) dengan diberikannya Form Model TT.</p>
3	Pengawasan Penyerahan hasil verifikasi berkas pencalonan anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada pemilihan umum tahun 2019	21 Juli 2018	Dihadiri oleh seluruh Partai Politik peserta Pemilu diruang RPP KPU Provinsi Bengkulu. Berkas pencalonan dibagikan kemasing-masing LO agar melengkapi kekurangan berkas. Masa perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota serta pengajuan bakal calon pengganti pada tanggal 22-31 Juli 2018.
4	Perbaikan Daftar Calon dan Syarat calon anggota serta pengajuan bakal calon pengganti pada pemilihan umum 2019	27 Juli 2018	Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan perbaikan syarat pada Bacaleg yang diusung.
5	Pengawasan perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota serta pengajuan calon pengganti DPRD Provinsi Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2019	30 Juli 2018	<p>1. Partai Perindo Melakukan registrasi pukul 10.39 wib dengan menyerahkan berkas perbaikan daftar calon dan diterima oleh KPU Provinsi Bengkulu dan dikeluarkannya Model TT.Pd perbaikan.</p> <p>2. PDIP Melakukan registrasi pukul 13.16 wib dengan menyerahkan berkas perbaikan daftar calon. Berkas diterima dan dikeluarkannya Form Model TT.Pd perbaikan.</p> <p>3. Partai Gerindra Melakukan registrasi pukul 19.30 wib dengan menyerahkan berkas perbaikan daftar calon. Berkas diterima dan dikeluarkannya Form Model TT.Pd perbaikan.</p>
6	Pengawasan perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota serta pengajuan calon pengganti DPRD Provinsi Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2019	31 Juli 2018	<p>1. PBB Pukul 16.39 wib Melakukan registrasi dan dilanjutkan penyerahan berkas perbaikan daftar calon dan diperiksa oleh KPU Provinsi Bengkulu. PBB melakukan penggantian calon sebanyak 2 orang dan 1 tidak melengkapi berkas.</p> <p>2. Demokrat</p>

			<p>Pukul 17.36 wib melakukan registrasi dan menyerahkan berkas perbaikan daftar calon. Partai demokrat melakukan penggantian calon sebanyak 1 orsng</p> <p>3. PSI Pukul 19.20 wib melakukan registrasi dan menyerahkan berkas perbaikan daftar calon. PSI melakukan penggantian calon sebanyak 5 orang.</p> <p>4. Partai Nasdem Pukul 19.30 wib melakukan registrasi dan menyerahkan berkas perbaikan daftar calon . Partai Nasdem melakukan penggantian calon sebanyak 2 orang.</p> <p>5. Partai Gokar Pukul 20.02 wib melakukan registrasi dan menyerahkan berkas perbaikan daftar calon.</p>
7	Penyampaian hasil verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi daftar calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada Pemilihan Umum 2019	7 Agustus 2018	Melakukan pengawasan langsung terkait penyampaian hasil verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi daftar calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada pemilu tahun 2019. Dihadiri 15 LO Partai Politik, PBB tidak menghadiri acara tersebut.
8	Melakukan pengawasan penetapan DCS Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada pemilihan umum 2019	2 September 2018	KPU Provinsi Bengkulu menetapkan DCS
9	Melakukan pengawasan penetapan DCT Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada Pemilihan Umum 2019	20 September 2018	Melakukan pengawasan pleno penetapan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Bengkulu dihadiri oleh 16 LO Partai Politik tingkat Provinsi Bengkulu. KPU Provinsi Bengkulu menetapkan DCT Anggota DPRD tingkat Provinsi Bengkulu sebanyak 617 orang dari 16 Partai Politik tingkat Provinsi Bengkulu.

Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pencegahan terhadap pendaftaran anggota DPRD Provinsi Bengkulu dengan memberikan surat himbauan.

3) Pengawasan Verifikasi kelengkapan administrasi Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu

a) Pelaksanaan

Verifikasi kelengkapan administrasi daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2018

b) Pengawasan

Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh LO Partai Politik ke KPU Provinsi Bengkulu. KPU Provinsi Bengkulu mengeluarkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

4) Perbaikan Daftar Calon Dan Syarat Calon Serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Provinsi Bengkulu

a) Pelaksanaan

Verifikasi kelengkapan administrasi daftar Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018.

b) Pengawasan

Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Kota yang dilakukan oleh LO Partai Politik ke KPU Provinsi Bengkulu. KPU Provinsi Bengkulu mengeluarkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Bawaslu Provinsi Bengkulu meneliti kelengkapan dokumen pengajuan perbaikan persyaratan bakal calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam pengawasan verifikasi anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pencegahan berupa himbauan. Adapun himbauan tersebut sesuai dengan Surat nomor 270/K.BE-

10/PM.01.02/VIII/2018 ditujukan untuk Ketua KPU Provinsi Bengkulu perihal verifikasi terhadap perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu.

5) Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara

Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Bengkulu oleh KPU Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 8 agustus 2018 sampai 12 Agustus 2018. Pada hari sabtu tanggal 11 Agustus 2018 bertempat di KPU Provinsi Bengkulu Pukul 13.57 Wib, KPU Provinsi Bengkulu telah melaksanakan Rapat Pleno Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) orang dari 16 (enam belas) Partai Politik Tingkat Provinsi Bengkulu terinci dalam 7 (empat) daerah pemilihan yang terdiri dari bakal calon sesuai masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

Tabel 11. Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Provinsi Bengkulu

NO	PARTAI	JUMLAH DCS
1	PKB	44
2	GERINDRA	40
3	PDIP	45
4	GOLKAR	45
5	NASDEM	45
6	GARUDA	26
7	BERKARYA	25
8	PKS	45
9	PERINDO	41
10	PPP	45
11	PSI	28
12	PAN	45
13	HANURA	44
14	DEMOKRAT	45

15	PBB	39
16	PKPI	25
	JUMLAH	627

6) Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap

Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan Rapat Pleno Penetapan Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2019, hari Kamis Tanggal 20 September 2018 pukul 11.40 Wib bertempat di Kantor KPU Provinsi Bengkulu. KPU Provinsi Bengkulu menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Bengkulu sebanyak 617 (enam ratus tujuh belas) dari 16 Partai Politik Tingkat Provinsi Bengkulu.

Tabel 12. Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Bengkulu

NO	PARTAI	JUMLAH DCT
1	PKB	44
2	GERINDRA	40
3	PDIP	43
4	GOLKAR	45
5	NASDEM	45
6	GARUDA	23
7	BERKARYA	25
8	PKS	45
9	PERINDO	40
10	PPP	44
11	PSI	28
12	PAN	45
13	HANURA	44
14	DEMOKRAT	45
15	PBB	36
16	PKPI	25
	JUMLAH	617

7) Melakukan Pengawasan (Tahapan Reguler)

a) Pendaftaran Pencalonan Anggota DPD RI

KPU Provinsi Bengkulu melakukan pengumuman pendaftaran Pencalonan Anggota DPD RI Peserta Pemilu 2019 sesuai dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Jadwal Pemilu 2019 tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. Pemungutan suara Pileg 2019 akan berlangsung serentak dengan Pilpres 2019 yaitu pada 17 April 2019. Meski serentak, pendaftaran calon legislatif dibuka lebih dahulu daripada capres. Pendaftaran calon legislatif untuk DPD RI dilakukan di KPU Provinsi Bengkulu. Bawaslu Provinsi Bengkulu hanya mengawasi Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh PPK/PPS yang dilakukan pada tanggal 30 Mei – 19 Juni 2018.

b) Verifikasi Faktual Syarat Dukungan

Pengawasan verifikasi syarat dukungan Anggota DPD Provinsi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu pada tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018, sebanyak 14 Bakal Calon Anggota DPD Provinsi Bengkulu.

Bawaslu Provinsi Bengkulu hanya melakukan pengawasan terhadap Verifikasi Faktual Syarat Dukungan DPD Provinsi yang tidak dapat ditemui. KPU Provinsi Bengkulu mendatangkan pendukung anggota DPD Provinsi tersebut ke KPU Provinsi Bengkulu . Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Daftar Calon Sementara Anggota DPD Provinsi Bengkulu

NO	NAMA BAKAL CALON ANGGOTA DPD
1	Sultan Bachtiar Najamudin
2	Riri Damayanti
3	Hermen Malik
4	Heri Budianto
5	Fatrolazi
6	Eni Khairani

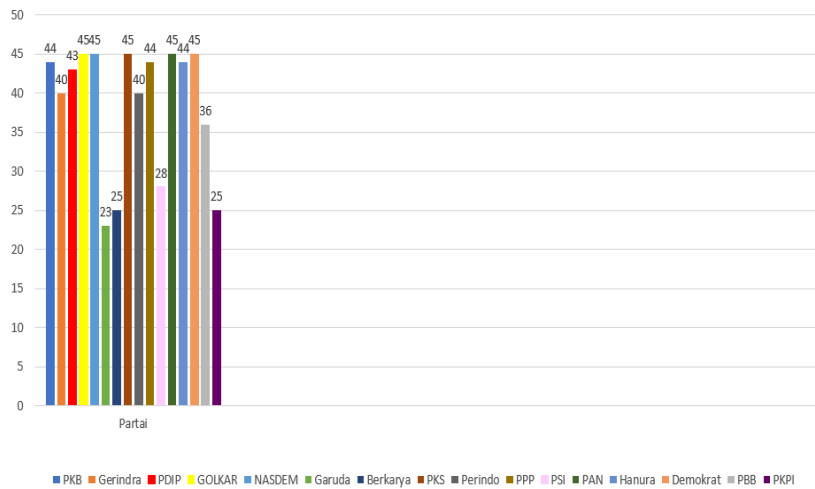
7	H.Elffy Hamidy Marah Sudin
8	Cupli Risman
9	Barlian
10	H. Ahmad Kanedi
11	Adri Liyusno
12	Abdul Rauf Tika
13	Abdul Haris Ma'mun
14	Emilia Puspita

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu dan yang telah melengkapi syarat maka ditetapkan peserta yang lolos menjadi calon tetap anggota DPD Provinsi Bengkulu adalah seperti yang tertera dalam tabel berikut :

Tabel 14. Daftar Calon Tetap Anggota DPD Provinsi Bengkulu

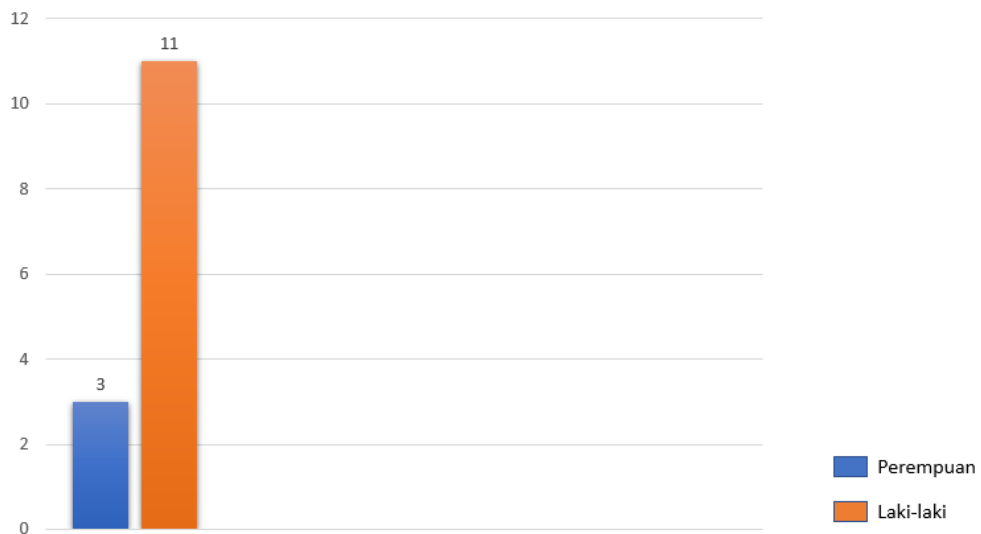
NO	NAMA CALON ANGGOTA DPD
1	Sultan Bachtiar Najamudin
2	Riri Damayanti
3	Hermen Malik
4	Fatrolazi
5	Eni Khairani
6	H.Elffy Hamidy Marah Sudin
7	Barlian
8	H. Ahmad Kanedi
9	Abdul Rauf Tika
10	Abdul Haris Ma'mun
11	Emilia Puspita

Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Bengkulu

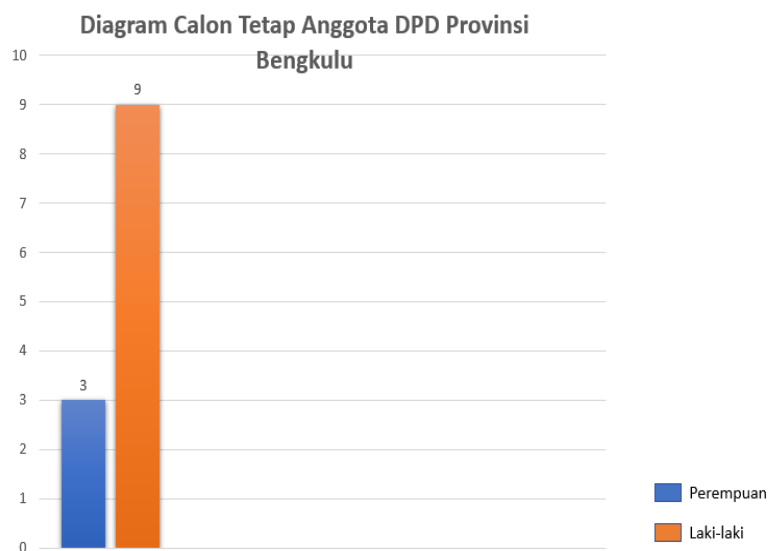


Berdasarkan grafik diatas, Indeks kerawan pemilu subdimensi proses pencalonan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu rata-rata berada pada angka 38. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat proses pencalonan tingkat Provinsi Bengkulu tersebut pada subtahapan pencalonan tingkat Provinsi Bengkulu masih memiliki partisipasi yang cukup tinggi dengan berbanding jumlah tetinggi yaitu 45.

Diagram Calon Sementara Anggota DPD Provinsi Bengkulu



Berdasarkan grafik diatas, Indek kerawan pemilu subdimensi proses pencalonan anggota DPD Provinsi Bengkulu berada pada jumlah angka 14 (empat belas) calon sementara anggota DPD Provinsi Bengkulu, dengan menunjukan bahwa tingkat proses pencalonan tingkat Provinsi Bengkulu tersebut pada subtahapan pencalonan tingkat Provinsi Bengkulu masih memiliki partisipasi yang cukup tinggi dengan berbanding jumlah laki-laki 11 (sembilan) orang dan jumlah perempuan 3 (tiga) orang yang mana akan memperebutkan 4 (empat) kursi.



Berdasarkan grafik diatas, Indek kerawan pemilu subdimensi proses pencalonan anggota DPD Provinsi Bengkulu berada pada jumlah angka 11 (sebelas), calon tetap anggota DPD Provinsi Bengkulu dengan menunjukan bahwa tingkat proses pencalonan tingkat Provinsi Bengkulu tersebut pada subtahapan pencalonan tingkat Provinsi Bengkulu masih memiliki partisipasi yang cukup tinggi dengan berbanding jumlah laki-laki 9 (sembilan) orang dan jumlah perempuan 3 (tiga) orang.

3. Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota

Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu :

a. Persiapan Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPRD Provinsi Bengkulu

1) Bimbingan Teknis

Tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu. Bawaslu Provinsi Bengkulu mengadakan bimbingan teknis pengawasan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu kepada tim pengawasan yang bertujuan agar hasil pengawasan sesuai dengan fokus pengawasan yang telah ditentukan dan menambah kapasitas jajaran pengawas.

2) Koordinasi

Koordinasi adalah hal yang sangat penting harus dilakukan dan dijaga oleh jajaran pengawas demi tercapainya kualitas pengawasan yang baik dan hal ini untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pada tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Bengkulu dilakukan kepada :

- a) Bawaslu Republik Indonesia yang merupakan lembaga di atas Bawaslu Provinsi Bengkulu.
- b) KPU Provinsi Bengkulu selaku pelaksana pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu
- c) LO Partai Politik.
- d) Pihak Kepolisian terkait informasi-informasi yang sedang terjadi.
- e) Pihak media. Media adalah partner penting jajaran pengawas hal ini untuk mendapatkan informasi dari berbagai elemen masyarakat terkait dengan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu.

3) Supervisi

Pada tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu melakukan supervisi kepada Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan terkait dengan salah satu syarat yaitu calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu harus terdaftar sebagai pemilih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak KPU Provinsi Bengkulu/PPS.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota

a. Tantangan Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam Melakukan Pengawasan

Adapun tantangan Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD RI adalah sebagai berikut :

- 1) Ada tim verifikator ketika ingin melakukan verifikasi faktual tidak menghubungi pengawas baik Panwaslu Kecamatan maupun Pengawas Pemilu Kelurahan pada saat pengawas menghubungi sudah melakukan verifikasi bahkan ada yang sudah selesai.
- 2) Masih ada jajaran PPK dan PPS yang menjadi tim verifikator kurang terbuka terhadap data, PPL mengalami kesulitan ketika meminta data terkait hasil verifikasi.

b. Persoalan Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Dukungan Calon Anggota DPD RI

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Bengkulu beserta Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Kelurahan terhadap pelaksanaan verifikasi dukungan bahwa terdapat persoalan mendasar yaitu banyak pendukung yang tidak dapat ditemui pada saat tim verifikator datang ke rumah, sehingga membuat dukungan berkurang dan LO dan/atau calon anggota DPD RI melakukan perbaikan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota

a. Evaluasi

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap tahapan verifikasi faktual terhadap dukungan calon anggota DPD yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu secara regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Masukan

1) Rekomendasi kepada KPU Provinsi Bengkulu

Pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD di Provinsi Bengkulu hendaknya langsung bertemu dengan yang bersangkutan sehingga dapat dikonfirmasi dukungan yang diberikan.

2) Rekomendasi kepada Peserta Calon perseorangan

Kepada peserta Pemilu 2019 calon perseorangan (DPD) menyampaikan dukungan menggunakan data yang akurat sehingga pada saat verifikasi dukungan tidak terdapat dukungan yang tidak memenuhi syarat.

3) Masukan Kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu

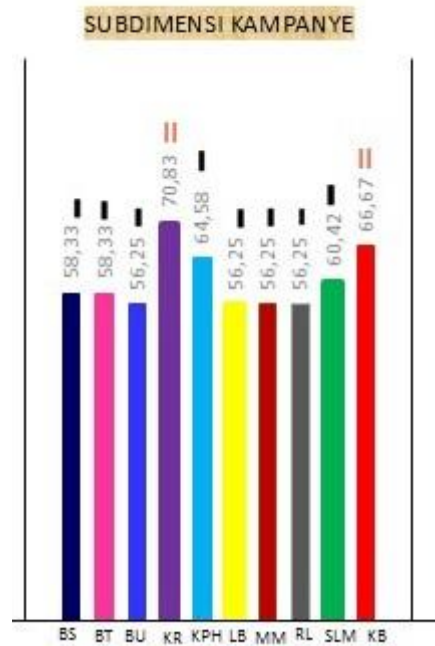
Terkait pengawasan, Bawaslu Provinsi Bengkulu sebaiknya mengadakan BIMTEK terkait pengawasan kepada Koordinator divisi dan staf se-Kabupaten/Provinsi Bengkulu sehingga terjadi keseragaman baik dalam teknis atau pelaporan pengawasan.

D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Diagram 6. IKP Dimensi Penyelenggara Yang Bebas dan Adil, Sub Dimensi Kampanye.



Bahwa dalam Indeks Kerawan Pemilu (IKP) terlihat dalam subdimensi Penyelenggaran yang bebas dan adil untuk Subdimensi Kampanye, dimana terdapat kerawan sedang dan kerawanan tinggi. Untuk kerawanan sedang terdapat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rajang Lebong, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten Seluma. Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu termasuk didalam kerawanan Tinggi.

Tabel 15. Kerawanan- Kerawanan dan IKP Tahapan Kampanye

No.	IKP 2019 Pelaksanaan Pengawasan tahapan kampanye
1.	Dimensi Konteks Sosial Politik
	<ul style="list-style-type: none"> a. Keberpihakan Penyelenggara b. Abai terhadap tanggung Jawab c. Penyalahgunaan wewenang
2.	Dimensi Penyelenggara Pemilu Yang Bebas Dan Adil
	<ul style="list-style-type: none"> a. Kampanye di luar jadwal b. Penanyangan Iklan Kampanye diluar jadwal c. Materi kampanye bersifat SARA d. Materi kampanye mengandung ujaran kebencian e. Materi kampanye mengandung HOAKS f. Praktik politik uang g. Penggunaan fasilitas Negara h. Konflik antar peserta dan pendukung i. Pelanggaran dana kampanye

b. Perencanaan pengawasan

Pengawasan tahapan kampanye menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Sebagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap :

- 1) Persiapan Kampanye.
- 2) Pelaksanaan Kampanye.
- 3) Dalam Melakukan Pengawasan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS.

Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk Pemilihan Pilpres,Cawapres,DPD, DPRD RI, DPRD Provinsi melaksanakan persiapan kampanye. Pengawasan sebagaimana dimaksud untuk memastikan :

- 1) Penyusunan jadwal waktu dan lokasi kampanye oleh KPU Provinsi dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pasangan calon dan Pemerintah Negara dan daerah ;
- 2) Penetapan jadwal waktu dan lokasi Kampanye dilakukan secara adil dan profesional;

- 3) Perencanaan percetakan bahan kampanye dilaksanakan sesuai dengan jumlah kepala keluarga pada daerah pemilihan untuk setiap calon;
- 4) Tim kampanye Pasangan Calon terdaftar di KPU serta tidak terdapat pihak yang dilarang sebagai tim kampanye.

Tabel 16. Program kegiatan pengawasan

No	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.	23 September 2018	13 April 2019
	a. Pelaksanaan Kampanye terbatas, Pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga.	23 September 2018	13 April 2019
	b. Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan mediamassa cetak dan elektronik	24 Maret 2019	13 April 2019
2.	Masa Tenang	14 April 2019	16 April 2019

2. Kegiatan Pengawasan tahapan dan subtahapan Kampanye

a. Pencegahan

Merujuk dalam IKP 2019 bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu berada dalam kategori sedang dengan nilai 50,37. Oleh karena itu Bawaslu Provinsi Bengkulu membuat Surat Himbauan dan intruksi terkait dengan kampanye Pemilu 2019 yaitu :

Tabel 17. Surat Himbauan dan Intruksi

No	Nomor Surat Tahun		Perihal
	2018	2019	
1.	009K.BE/PM.01.01/II/2018.		deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara secara s.erentak diseluruh Kabupaten Se-Provinsi Bengkulu

2.	064/K.BE/PM.02/5/2018		himbauan pelaksanaan tahapan massa kampanye 2019
3.	117/K.BE/PM.01.01/9/2018		Himbauan pimpinan partai politik se-Provinsi Bengkulu
4.	118/K.BE/PM.01.01/5/2018		Himbauan Ketua KPU Provinsi Bengkulu
5.	161/K.BE/PM.01.01/XII/2018		Surat himbauan Larangan Branding Mobil
6.	161/K.BE/PM.01.01/XII/2018		Himbauan larangan Branding Mobil
7.		00/K.BE/PM.01.01/I/2019	Himbauan kepala daerah dalam kampanye Capres No. Urut 01
8.		002/K.BE/PM.01.01/IV/2019	Himbauan tim kampanye daerah Paslon Capres No.01
9.		004/K.BE/PM.01.01/I/2019	Himbauan usulan personil Pokja Pelaksanaan kampanye dalam Pemilu 2019 di KPU Provinsi Bengkulu
10.		023/TU.03/II/2019	Undangan Ketua KPU Provinsi Bengkulu
11.		024/K.BE/PM.01.01/2/2019	Himbauan kegiatan kampanye di media massa
12.		025/K.BE/PM.01.01/2/2019	Himbauan ketua panitia Tanwir Muhammadiyah tidak ada politisi kampanye dalam bentuk apapun
13.		026/K.BE/PM.01.01/2/2019	Himbauan Pimpinan RB TV Bengkulu
14.		028/K.BE/PM.01.01/2/2019	Himbauan Gubernur Bengkulu
15.		032/K.BE/PM.01.01/II/2019	Intruksi: 1. Ketua Bawaslu Rejang Lebong 2. Ketua Bawaslu Bengkulu Tengah 3. Ketua Bawaslu Kepahiang 4. Ketua Bawaslu Bengkulu Utara 5. Ketua Bawaslu Lebong
16.		036/K.BE/PM.01.01/II/I/2019	Himbauan anggota DPD Dapil Provinsi Bengkulu
17.		087/TU.03.00/IV/2019	Undangan KAKAN Satuan Polisi Pengawasan Praja Provinsi Bengkulu Pelaksanaan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang
18.		041/K.BE/PM.01.01/IV/2019	Himbauan Pembersihan alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu
19.		040/K.BE/PM.01.01/IV/2019	Himbauan menginstruksikan kepada semua calon anggota DPR, DPRD Provinsi Bengkulu tidak memberikan semua bahan yang tidak tergolong dalam bahan kampanye

20.		042/K.BE/PM.01.01/I V/2019	Intruksi Patroli pengawasan Anti Politik Usang pasda Massa Tenang
21.		044/K.BE/PM.01.01/I V/2019	Surat himbauan Tim Kampanye calon Presiden dan wakil Presiden dan calon anggota DPR RI Dapil Provinsi Bengkulu

b. Aktivitas pengawasan

Fokus Pengawasan yang dilakukan :

1. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

a) Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan terhadap kampanye Pelantikan dan Pengukuhan DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Ketua Umum DPD Partai Golkar Airlangga Hartato, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Fredrickh Paulus beserta rombongan pada tanggal 14 April 2018 di Sport Center Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib . Dalam kegiatan ini tim pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu menemukan ada dugaan penyalahangunaan kendaraan dinas yang ditemukan sebanyak 14 unit pada saat acara pelantikan DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu, dimana nomor polisi kendaraan tersebut :

- 1) BD 1901 AY Jenis Mobil Daihatsu Xenia (Pemilik Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Pemprov Bengkulu.
- 2) BD 1264 PS Jenis mobil Toyota Fortuner.
- 3) BD 1164 YY Jenis Mobil Toyota Inova (Pemilik Elyandes Kadis Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah).
- 4) BD 1008 PS Jenis Mobil Pajero.
- 5) BD 1362 PS Jenis Mobil Toyota Fortuner Putih.
- 6) BD 1744 PS Jenis Mobil Pajero.
- 7) BD 1505 KY Jenis Mobil Toyota Avanza
- 8) BD 2 D Jenis Mobil Toyota Fortuner (Pemilik Aliantor Harahap Ketua DPRD Bengkulu Utara).

- 9) BD 1512 SR Jenis Mobil Toyota Hilux 02.17.
- 10) BD 1512 SR Jenis Mobil Toyota Fortuner 04.17.
- 11) BD 1970 PS Jenis Toyota Alphard (Pemilik Rohidin Mersyah PLt Gubernur).
- 12) BD 9155 AY Jenis Mobil Toyota Hilux
- 13) BD 47 Jenis Mobil Pajero (Plt Kadis PU Provinsi Bengkulu).
- 14) BD 1608 CY Jenis Mobil Toyota Rush (Ex DPRD Prov dimutasi ke Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu).

Selanjutnya juga ditemukan ucapan selamat dalam bentuk karangan bunga atas pelantikan DPD Partai Golkar provinsi Bengkulu dari ASN Pemda Provinsi Bengkulu atas nama :

- 1) Atisar Sulaiman ASN Provinsi Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu .
- 2) H. Gotri Suyanto Asisten Adm Umum.
- 3) Novian Andusti Sekdaprov.

Kampanye Pelantikan Partai Golkar dihadiri oleh Peserta kampanye berjumlah 500 orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin KPU, Kepolisian dan Bawaslu untuk melakukan kampanye Pelantikan Partai Golkar. Dalam kegiatan ini terdapat temuan penggunaan kendaraan dinas, diduga terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Temuan ini berlanjut ke Menteri Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Aparatur Sipil Negara.

- b) Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan terhadap kampanye SOFT Launching Program Desa terang terintegrasi KUR sektor produksi untuk wilayah Sumatera pada tanggal 20 Desember 2018 di Desa Sumber Sari Kec. Kabawetan

Kabupaten Kepahiang yang dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib. Kampanye SOFT Launching Program Desa terang terintegrasi KUR sektor produksi untuk wilayah Sumatera dihadiri oleh Bapak Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Bupati Kepahiang Hidayatullah, Sekda Provinsi Bengkulu, dan Kapolda Provinsi Bengkulu Peserta kampanye berjumlah 300 orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin KPU, Kepolisian, dan Bawaslu untuk melakukan kampanye SOFT Launching Program Desa terang terintegrasi KUR sektor produksi untuk wilayah Sumatera Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu.

- c) Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan terhadap kampanye kegiatan deklarasi pasangan capres dan cawapres No.urut 01 yang dilakukan oleh kepala daerah pada tanggal 13 Januari 2019 di Persada Bung Karno yang dilaksanakan mulai dari pukul 13.00 Wib sampai dengan pukul 17.23Wib Kampanye Calon Wakil Presiden No.Urut 01 dihadiri oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah merupakan Ketua Partai Golkar Provinsi Bengkulu, dan Sembilan (9) Bupati yaitu :
1. Bupati Lebong Rosjonsyah adalah ketua DPD PDIP Kabupaten Lebong
 2. Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi menjabat ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Rejang Lebong,
 3. Bupati Kepahiang Hidayatullah yang menjabat Ketua Partai Nasdem Kabupaten Kepahiang,
 4. Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli sebagai ketua DPW Partai Nasdem provinsi Bengkulu.
 5. Bupati Seluma Bundra Jaya ,
 6. Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi sebagai Ketua Partai Nasdem Bengkulu selatan ,
 7. Bupati Kaur Gusril selaku Ketua Partai Golkar Kabupaten Kaur,

8. Bupati Mukomuko Khoirul Huda, 9. Bupati Bengkulu Utara Mian sebagai Ketua PDIP Bengkulu Utara, Peserta kampanye berjumlah 500 orang dimana Kampanye tersebut ada pejabat setempat yang menggunakan mobil dinas yang telah diubah menjadi plat hitam bernopol BD 1655 PS jenis Toyota Hilux double kabin. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin kepada KPU, Kepolisian, Bawaslu untuk melakukan kampanye Calon Wakil Presiden No. Urut 01 Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Dalam kegiatan ini terdapat temuan penggunaan kendaraan dinas. Tetapi temuan ini tidak naik ke pengadilan karena berhenti di Sentra Gakkumdu.

- d) Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan terhadap kampanye Pelantikan Ketua DPW Partai Nasdem Dr. H. Ferry Ramli, SH, MH. yang dilakukan oleh DPW Partai Nasdem pada tanggal 21 Januari 2019 di Graze Hotel Bengkulu yang dilaksanakan mulai dari pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 14.23 wib. Kampanye DPW Partai Nasdem dihadiri oleh Peserta kampanye berjumlah 50 orang, tim pengawas sudah berada di lokasi memantau ruangan dan area disekitarnya, berdasarkan kesaksian hasil pengawasan terdapat mobil Dinas yang diubah menjadi plat hitam dengan Bernopol BD 1899 Ps, Jenis Toyota Fortunier berwarna Hitam. Berdasarkan kesaksian hasil pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawasan pada saat kegiatan DPW Partai Nasdem tepat di parkir Hotel Graze Bengkulu, kuat diduga Waka I DPRD Bengkulu Tengah Rico Zaryan Saputra, S.E. menggunakan kendaraan dinas yang nomor polisinya telah dirubah menjadi plat hitam dengan Bernopol 1889 PS, jenis Toyota Fortuner berwarna Hitam.

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin kepada KPU, Kepolisian dan Bawaslu untuk melakukan kampanye DPW Partai Nasdem Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Terdapat temuan penggunaan kendaraan dinas, dan ini dilimpahkan ke Bawaslu Kota dan Bawaslu kabupaten Benteng.

- e) Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan terhadap kampanye Calon Presiden No. urut 2 yang dilakukan oleh Tim Pemenangan No.Urut 2 pada tanggal 14 Maret 2019 di Kemuning Mercucuar Resto yang dilaksanakan mulai dari pukul 14.00 wib sampai dengan pukul 16.30 Wib Kampanye Calon Presiden No.urut 2 dihadiri oleh Bapak Prabowo Subianto Peserta kampanye berjumlah lebih kurang 1000 orangdimana dalam kampanye tersebut terdapat anak dibawah umur .Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin Kepada KPU, Kepolisiandan Bawaslu untuk melakukan kampanye Calon Presiden No.urut 2. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu.
- f) Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan terhadap kampanye Calon Wakil Presiden No.urut 1 yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Calon Wakil Presiden No.urut 1 pada tanggal 20 maret 2019 di Grage Hotel yang dilaksanakan mulai dari pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 16.00 wib Kampanye cawapres No.urut. 1 dihadiri oleh Bapak K.H. Ma'ruf Amin, Peserta kampanye berjumlah 2000 orang terdiri dari peserta dialog diantaranya IAIN Bengkulu, Para Santri Se-Provinsi Bengkulu, Forum Lintas Agama Se-Provinsi Bengkulu, Santri Pusantern Se-KotaBengkulu, Ibu-ibu Ikatan muslimah, Ansor

Pemuda, Persatuan Seluruh Gereja Se-Kota Bengkulu, dan tamu undangan lainnya. Dalam acara tersebut K.H.Ma'ruf Amin membicarakan masalah dialog kerukunan antar umat beragama. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin kepada KPU, Kepolisian dan Bawaslu untuk melakukan kampanye Calon Wakil Presiden No.urut 1. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu.

- g) Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan terhadap kampanye rapat umum partai Nasdem yang dilakukan oleh Panitia Pelaksanaan Partai Nasdem pada tanggal 28 Maret 2019 di Sport Center Pantai Panjang Kota Bengkulu yang dilaksanakan mulai dari pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 18.20 wib Kampanye dihadiri oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian RI (Engartiaso Lukita Beserta istri), Amelia Anggraini (anggota DPR RI), Rerie Lestari Moerdijat (anggota tinggi partai Nasdem), Rosdiana (istri jaksa agung Prasetio), Ferry Ramli (ketua DPW Nasdem), Penggurus DPW Partai Nasdem, serta Caleg DPR RI dan DPRD Provinsi dari partai Nasdem, Peserta kampanye berjumlah 500 orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu Peserta Pemilu/Tim Kampanye telah menyampaikan izin kepada KPU, kepolisian dan Bawaslu untuk melakukan kampanye rapat umum partai Nasdem Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu.
- h) Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan terhadap sosialisasi KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Ketua dan anggota KPPI pada tanggal 29 Maret 2019 di Simpang Lima Ratu Samban Kota Bengkulu yang dilaksanakan mulai dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 18.00 Wib dihadiri oleh Ketua dan anggota KPPI

Peserta Sosialisasi berjumlah 50 orang Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu Peserta Tim Sosialisasi KPPI telah menyampaikan izin kepada KPU, Kepolisian dan Bawaslu untuk melakukan Sosialisasi KPPI Berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu.

2. Pengawasan Patroli Politik Uang dan Massa Tenang

- a) Kegiatan Patroli Pengawasan Anti politik uang diawali dengan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada tanggal 12 April 2019, Pukul 08.00 Wib. Kegiatan Apel Patroli Pengawasan diikuti oleh seluruh staf Bawaslu Provinsi, Anggota Bawaslu dan Staf Bawaslu Kota Bengkulu dan seluruh Panwascam dan Pengawas Desa/Kelurahan se-Kota Bengkulu. Yang menjadi pembina pada Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang ini yaitu Bapak Ediansyah Hasan, S.H, M.H (Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu) dan yang bertugas sebagai Pemimpin Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang yaitu Zait Sanjani Midun (Pengawas Kelurahan Panorama Bengkulu). Kegiatan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang ini dilaksanakan di seluruh Indonesia, dimana Patroli Pengawasan ini dilaksanakan untuk menyatakan kesiapan Bawaslu dalam melaksanakan Pengawasan Masa Tenang dan hari Pemungutan dan Perhitungan Suara. Dimana kegiatan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pertama kali didalam sejarah Kepemiluan Indonesia Pemilihan Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden akan dipilih secara serentak.

b) Pengawasan di Masa Tenang.

Memasuki hari Masa tenang jelang pemilu pada 17 April 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng tim gabungan dari Satpol PP, melakukan penertiban hingga pencopotan terhadap sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpampang di sejumlah titik jalan pada Minggu pagi 14 April 2019. Selama masa tenang peserta pemilu dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apa pun. Masa tenang berlangsung selama tiga hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pada tanggal 13 – 14 April 2019 Anggota Bawaslu provinsi Bengkulu Dodi Herawasyah, S.Pd.,M.M. Melaksanakan Supervisi dan Patroli Pengawasan menghadapi masa tenang dan Tahapan Pungut Hitung di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada tanggal 14-15 April 2019 Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap,S.P.,M.Si Melakukan Supervisi Patroli Pengawasan Anti Politik di Kabupaten rejang Lebong. Pada tanggal 15-16 April 2019 Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Patimah Siregar, S.Pd., M.Pd Melakukan Supervisi Pengawasan Patroli Anti Politik Uang di Kabupaten Kaur.

3. Hasil-hasil Pengawasan tahapan subtahapan Kampanye

a. Temuan.

- 1) Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, sebanyak 1 (satu) perkara calon DPR RI Provinsi Bengkulu 2019.

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diajukan oleh Achmad Tarmizi Gumay pada tanggal 19 September 2018 Materi laporan yang diajukan oleh Pelapor adalah sebagai berikut Pada tgl 13 September 2018 Menteri Desa ,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi

Bengkulu, dalam kunjungan tersebut Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi RI melakukan pembekalan Bacaleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Bengkulu. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Bengkulu laporan yang diajukan oleh Pelapor memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 02/LP/PL/Prov/07.00/IX/2018. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Provinsi melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut:

Bahwa benar pada tanggal 13 hingga tanggal 15 September 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu pada bulan September tahun 2018, bertempat di Hotel Putri Gading Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya diwilayah hukum Provinsi Bengkulu, Lembaga Pemenangan Pemilu DPW Partai Kebangkitan Bangsa (LPP DPW PKB) Bengkulu menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan “Rakor dan Pembekalan Caleg PKB 2019”;

Bahwa berdasarkan laporan, hasil klarifikasi terhadap sdr. Febby selaku tenaga Ahli pada Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI dan sdr. Herliardo selaku pengurus DPW PKB Bengkulu, serta bukti-bukti lainnya, diketahui bahwa Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI dijabat oleh Sdr. Eko Putro Sandjojo, selain itu juga yang bersangkutan merupakan pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa dengan jabatan Bendahara Umum, bahkan yang bersangkutan juga merupakan Bakal Calon Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa dengan daerah Pemilihan Bengkulu;

Bahwa berdsasarkan hasil klarifikasi terhadap Sdr. Febby dan Sdr. Herliardo pada tanggal 13 September 2018 bertempat di Hotel Putri Gading Kota Bengkulu, diketahui Sdr.Eko Putro Sandjojo menghadiri kegiatan rakor dan Pembekalan Bacaleg Partai

Kebangkitan Bangsa. Adapun kedatangan yang bersangkutan (Terlapor) dalam acara tersebut dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Pengurus/Bendahara Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang mewakili Pengurus DPP Partai Kebangkitan Bangsa untuk membuka acara.

2) Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu, sebanyak 2 (dua) perkara calon DPR Provinsi Bengkulu 2019.

a) Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Ir. H. Firdaus Djaelani pada tanggal 2 September 2018 Materi laporan yang diajukan oleh Pelapor adalah sebagai berikut, “Bahwa Ir. H. Firdaus Djailani sebagai Bacaleg DPRD Provinsi Bengkulu Dapil V (Kabupaten Kepahiang) sudah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU Provinsi Bengkulu. Tetapi, di TMS-kan oleh KPU Provinsi Bengkulu melalui Surat Keputusan Nomor 1161/PL.01.1-SD/17/prov/VIII/2018”. Berdasarkan Pemeriksaan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Bengkulu laporan yang diajukan oleh Pelapor memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan Nomor 01/LP/PL/ADM./Prov.07.00/IX/2018. Berdasarkan Sidang Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 01/LP/PL/ADM./Prov.07.00/IX/2018 Bawaslu Provinsi Bengkulu membuat Putusan dengan Nomor 01/LP/PL/ADM/Prov.07.07.00/IX/2018 dengan amar Putusan “Menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana laporan Pelapor.”

b) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diajukan oleh Melyan Sori pada tanggal 4 Mei 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Pelapor adalah sebagai berikut Pada hari Jumat 3

1) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diajukan oleh Melyan Sori pada tanggal 15 Januari 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Pelapor adalah sebagai berikut pada hari minggu tgl 13 Januari 2019 bertempat di gedung persada bung karno tim kampanye daerah paslon presiden dan wapres no urut 01 Jokowi-Ma'ruf amin melaksanakan kegiatan Deklarasi Tim Kemenangan Daerah Prov. Bkl. Diduga adanya penggunaan fasilitas negara gedung persada bung karno oleh Gubernur Provinsi Bengkulu, dimana gedung tersebut milik Pemda Prov. Bengkulu. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Bengkulu laporan yang diajukan oleh Pelapor memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 01/LP/PP/Prov/07.00/I/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Provinsi melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut "Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan dihubungkan dengan Peraturan Daerah dan Surat Keputusan KPU diketahui kegiatan Tim Kampanye Daerah yang dilaksanakan di Gedung Persada Bung Karno pada tanggal 13 Januari 2019 tersebut adalah kegiatan resmi dan penggunaan gedung Persada Bung Karno oleh Tim Kampanye Daerah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin tidak menyalahi aturan dan dapat dibenarkan" Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 01/LP/PP/Prov/07.00/I/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilu.

2) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diajukan oleh Jonson Manik pada tanggal 18 Maret 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Pelapor adalah sebagai berikut Pada Hari Kamis, 14 Maret 2019 adanya dugaan keterlibatan Walikota Bengkulu, Mobnas BD 1382 CY, Mobnas 1329 CY serta ASN/PNS dalam Kampanye Capres #02, yang diduga meninggalkan jam dinas pada Kemuning Mercusuar Resto, Pantai Panjang Kota Bengkulu. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Bengkulu laporan yang diajukan oleh Pelapor memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 02/LP/PP/Prov/07.00/III/2019. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Provinsi melakukan kajian dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa dugaan walikota Bengkulu Sdr. Helmi Hasan telah menghadiri dan mengikuti kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh Badan Pemenangan Prabowo – Sandi Provinsi Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019, bertempat di kemuning Mercusuar Jalan Pariwisata No.09 – Pantai Panjang, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, tidak dapat diyakini kebenarannya serta tidak cukup bukti. Oleh karenanya, terhadap dugaan Walikota Bengkulu Sdr. Helmi Hasan “tidak menjalani cuti diluar tanggungan Negara” dalam melaksanakan kegiatan Kampanye Pemilu, juga tidak diyakini kebenarannya dan tidak cukup bukti;
- Bahwa terhadap dugaan pelanggaran dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pemenangan Prabowo-Sandi Provinsi Bengkulu, pada hari Kamis, tanggal 14

Maret 2019 di Kemuning Mercusuar, Jalan Pariwisata No.09 – Pantai Panjang, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, diduga terdapat penggunaan kendaraan Dinas, serta diduga terdapat beberapa orang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) ataupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menghadiri ataupun ikut serta dalam kegiatan tersebut “tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak Terlapor” serta “tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak cukup bukti”

- Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 02/LP/PP/Prov/07.00/III/2019 tersebut diatas telah dihentikan karena tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak cukup bukti.

3) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang diajukan oleh Agustam Rahman pada tanggal 13 April 2019 Materi laporan yang diajukan oleh Pelapor adalah sebagai berikut pada hari Minggu 13 April 2019 Pelapor mendapatkan pesan WA dari Sdr. Dempo Xler terkait dengan Maklumat Walikota Bengkulu yang berisi jika Capres #2 menang Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, Pelapor diminta untuk mempelajari Maklumat tersebut karena Maklumat tersebut "PALSU". Berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Bengkulu laporan yang diajukan oleh Pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan/atau materil.

b. Rekomendasi.

- 1) Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebanyak 1 (satu) perkara calon DPR RI Provinsi Bengkulu 2019.
Surat Tugas DPP partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 27441/DPP-03/VI/A.1/IX/2018 tanggal 11 September 2018 bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu telah dihentikan karena bukan merupakan Pelanggaran Pemilu
- 2) Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu, sebanyak 2 (dua) perkara calon DPR Provinsi Bengkulu. laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu telah dihentikan karena bukan merupakan Pelanggaran Pemilu.
- 3) Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebanyak 3 (tiga) perkara calon Presiden dan wakil Presiden Provinsi Bengkulu. laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu telah dihentikan karena bukan merupakan Pelanggaran Pemilu.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

- 1) Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu untuk DPR RI Provinsi Bengkulu , bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- 2) Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu untuk DPR Provinsi Bengkulu, bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- 3) Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu untuk calon Presiden dan wakil Presiden Provinsi Bengkulu, bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

4. Dinamika dan permasalahan tahapan dan subtahapan kampanye

- a. Tantangan Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengawasan.
Memasuki tahapan kampanye yang berpotensi tinggi terjadinya pelanggaran, Bawaslu meningkatkan strategi pengawasan. Berbagai

potensi pelanggaran dimasa kampanye menjadi fokus pengawasan Bawaslu. Potensi pelanggaran yang bisa terjadi pada masa kampanye , yakni penggunaan fasilitas pemerintah, dana kampanye, serta kampanye ditempat ibadah, fasilitas pemerintah dan pendidikan. Dalam menghadapi masa kampanye ini karena PILPRES dan PILEG dilaksanakan secara serentak. Jika pengawasan Bawaslu menemukan adanya dugaan pelanggaran harus dikaji , apakah temuan yang benar-benar memenuhi unsur pelanggaran.

Tahapan Kampanye tidak dapat dipisahkan dari dana kampanye ada 4 (empat) hal yang menjadi komponen yaitu :

1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
2. Laporan Awal dana Kampanye (LADK)
3. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran dana kampanye (LPPDK)

b. Persoalan dalam Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu tahun 2019.

Peserta kampanye dalam melakukan kampanye hanya menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan kampanye atau izin melaksanakan kampanye Pemilu yang diberikan oleh peserta Pemilu diserahkan kepolisian, Bawaslu hanya dapat tembusan dari surat peserta Pemilu yang melaksanakan Kampanye.

5. Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan dan subtahapan kampanye

Bawaslu Provinsi melaksanakan pengawasan terhadap tahapan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan kampanye peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu dalam hal meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau menyampaikan citra diri peserta pemilu. Dimana dalam evaluasi pelaksanaan pengawasan meliputi :

- a. Metode kampanye yang paling banyak dilakukan peserta pemilu adalah pertemuan tatap muka dengan menggelar kampanye di luar ruangan yang lokasinya lebih memudahkan untuk berkampanye yaitu dengan menunjungi pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga dan sejenisnya.
- b. Kampanye dengan cara pemasangan alat peraga kampanye (APK) menjadi pilihan calon dari partai politik, anggota DPD , DPR RI, DPRD Provinsi serta presiden dan wakil presiden. Alat peraga kampanye yang dipasang oleh peserta Pemilu berupa baliho, billboard, spanduk dan/atau umbul-umbul dan alat peraga lainnya dengan desain dan ukuran yang bervariasi.
- c. Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang mencakup : APK yang melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu APK yang diletakkan di lokasi yang dilarang, yaitu di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan.

D. PELAKSANAAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Berdasarkan indeks, kerawanan dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

- 1) Kategori Rendah, berada pada angka 0,00 – 33,00;
- 2) Kategori Sedang, berada pada angka 33,01 – 66,00;
- 3) Kategori Tinggi, berada pada angka 66,01 – 100,00.

Indek Kerawan Pemilu Provinsi Bengkulu berada dalam kategori kerawanan sedang yang berada di titik 50,37. Sedangkan IKP Nasional tahun 2019 sebesar 49,63.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pelaksanaan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilu 2019 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu, terdiri atas Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang menjadi fokus pengawasan baik dalam memastikan ketaatan prosedur terhadap pelaksanaan pengadaan hingga pendistribusian perlengkapan pemungutan suara Pemilu 2019. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut tertuang dalam Perbawaslu Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu.

Untuk Pemilu tahun 2019, hal-hal yang dianggap rawan dalam tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara :

- 1) Distribusi logistik pemungutan suara terlambat
- 2) Distribusi logistic pemungutan suara tertukar/hilang/tidak sesuai

3) Lokasi TPS yang sulit dijangkau

b. Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan PKPU Nomor 32 Tahun 2018, pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 berlangsung dari tanggal 17 April 2018 sampai dengan 17 Juni 2019.

Dengan adanya instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 0258/K.Bawaslu/PM.00.00/2/2019 tanggal 4 Februari 2019 dan beberapa point yang dianggap rawan dalam tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan melekat Kepada KPU Provinsi Bengkulu selaku instansi pemerintah yang bertanggung jawab penuh terhadap ketersediaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, mulai dari pencetakan surat suara, pengiriman logistic Pemilu, sampai kekurangan logistic Pemilu menjelang hari H pemungutan suara. Yang dilakukan Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam perencanaan pengawasan antara lain :

- 1) Penyusunan Jadwal Pengawasan
- 2) Pelaksanaan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait
- 3) Penyusunan Tim Pengawasan
- 4) Pemetaan Data Logistik, terdiri dari :
 - a) Data pemilih sebagai dasar pemetaan kebutuhan surat suara.
Untuk dapat mengetahui jumlah keseluruhan kebutuhan surat suara di wilayah kerja masing-masing daerah, Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran pengawas Pemilu menggunakan data pemilih terupate yang telah ditetapkan oleh KPU.
 - b) Data perusahaan sebagai sasaran pengawasan.
 - c) Jadwal pencetakan, dan jadwal distribusi.

5) Tracking Data perusahaan

Pengawas Pemilu memastikan perusahaan Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya tidak terafiliasi dengan Peserta Pemilu tertentu.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Pencegahan

Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu pada tahapan dan subtahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dengan cara mengumpulkan data melalui email yang dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-provinsi Bengkulu guna pencocokan dan pengakuratan data perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Selain itu Bawaslu Provinsi Bengkulu juga memberikan himbauan

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan, kegiatan Bawaslu diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Pengawasan Pencetakan

Dalam melakukan pengawasan pencetakan, tim pengawas dari Bawaslu Provinsi Bengkulu mengawasi terhadap kepatuhan penyelenggara dan perusahaan sebagaimana peraturan KPU. Kepatuhan. Kepatuhan tersebut diantaranya berupa :

- 1) Kepatuhan dalam menentukan pengadaan jenis, standar, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- 2) Kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dan dukungan perlengkapan lainnya terhadap kesesuaian standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPU ;
- 3) Ketepatan waktu pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya oleh perusahaan pemenang lelang ;
- 4) Kesesuaian jumlah Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya yang diproduksi dengan jumlah yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan pemenang lelang jika terdapat kelebihan atau kekurangan jumlah suara ;
- 5) Kepatuhan penyedia dalam melakukan pengamanan terhadap surat suara cetak lebih atau *reject* sebagaimana SOP yang telah ditetapkan ;
- 6) Memastikan terjaminnya pengamanan pada saat proses Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya.

Untuk memastikan kepatuhan-kepatuhan tersebut di atas maka Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan terhadap produksi Surat Suara yang dilakukan di PT. TEMPint, JL. Palmerah Barat No. 8 Jakarta Selatan pada tanggal 27 Februari 2019 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu, proses pencetakan surat suara di Jakarta tidak menemui kendala yang berarti. Pengawasan ini dilakukan oleh

team dari Bawaslu Provinsi Bengkulu yang terdiri dari anggota Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu ibu Patimah Siregar, M.Pd, Kasubbag TP3 bapak Apriyanto Kurniawan, S.IP, staf TP3 bapak Debisi Ilhodi, S.Sos. Setelah proses pencetakan selesai, maka surat suara untuk provinsi Bengkulu langsung dikemas dan dimuat dalam truk pengangkut yang akan dibawa ke kabupaten/kota yang telah ditetapkan.

Tabel 18. Alat Kerja Pengawasan Produksi Logistik

1. Identitas/Spesifikasi/Paket Pekerjaan Perusahaan Pencetakan Surat Suara²

Nama perusahaan pencetakan surat suara?	PT. TEMPRINT										
Konsorsium perusahaan?	Temprina Bekasi										
Alamat pabrik?	Jl.Palmerah Barat No.8 Jakarta Selatan										
Luas area pabrik?	10.000 M, 1 Hektar										
Jumlah total karyawan yang bertugas melakukan pencetakan surat suara?	Total 300 Orang, 1 Shif 100 Orang, dibagi 3 Shif per 8 Jam										
Jumlah mesin pencetakan?	3 Mesin Cetak										
Jumlah mesin plat (pembuatan master)?	3 Mesin Plat Master, Yang Aktif 2 Mesin										
Jumlah alat pemotong?	7 Mesin Alat Potong										
Jumlah alat pendukung lainnya?	5 Mesin Lipat dan 10 Mesin Pengikat										
Pengisian berdasarkan informasi dari Pabrik/Perusahaan											
Provinsi	Jumlah Dapil			Jumlah DPTHP2	Jumlah 2% dari DPT	Jumlah Surat Suara yang di Cetak					Total
	DPR	DPRD Prov	DPRD Kab/Kota			PWP	DPD	DPR	DPRD Prov	DPRD Kab/Kota	
Bengkulu	1	7	-	1.400.490	28.009	1.428.095	1.428.095	1.428.095	1.428.095	1.428.095	1.428.095

No	Daftar Pertanyaan	Hasil Pengawasan
1.	Bagaimana sistem kerja pencetakan surat suara di pabrik? (ex; pekerjaan dilakukan 24 jam/8jam, gambaran mekanisme mulai dari proses cetak, pengecekan/sortir surat suara rusak, pemotongan, penyimpanan sementara surat suara jadi, atau langsung pengepakan dan penyimpanan di gudang)	Produksi pencetakan surat suara selama 24 jam, dibagi dalam 3 shif, 1 shif selama 8 jam, dari pukul 08.00 wib – 16.00 wib begitu seterusnya. Waktu istirahat pekerja pabrik dari pukul 12.00 wib – 13.00 wib, waktu istirahat, mesin tetap jalan, akan tetapi mesin utama istirahat. Untuk surat suara rusak dikumpulkan sesuai dengan Provinsi, setelah itu dibuatkan BA Pemusnahan, baru itu dimusnakan.
2.	Bagaimana pabrik dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan pencetakan surat suara?	Keamanan Penjagaan BKO 2 Orang BRIMOB, Logistik dikawal Patwal. Pengamanan Internal pekerja, sebelum masuk kedalam arena pabrik diperiksa tidak boleh membawa barang apapun HP dll, begitu juga sebaliknya.
3.	Bagaimana kondisi gudang penyimpanan surat suara yang telah selesai cetak dari gangguan-gangguan yang dapat merusak surat suara?	Kondisi Gudang Aman dengan penjagaan Satpam Perusahaan dan Brimob
4.	Bagaimana perlakuan terhadap surat suara yang gagal cetak dan kapan pemusnahan surat suara yang gagal cetak?	Untuk surat suara rusak dikumpulkan sesuai dengan Provinsi, setelah itu dibuatkan BA Pemusnahan, setelah itu dimusnakan. Pemusnahan setelah selesai semua pencetakan.
<p>Temuan Hasil Pengawasannya Lainnya : Ditemukan pada saat kami pengawasan langsung ke pabrik pencetakan surat suara PT.Temprint ditemukan dua orang pekerja pabrik dibagian mesin pencetakan dibawah membawa HP, kami melihat langsung dua orang tersebut lagi main HP, temuan ini lokasi dilantai bawah, mesin pencetakan pada pukul 15.32 Wib, Tanggal 27 Februari 2019.</p>		

Tabel 19. Form Hasi Pengawasan Produksi Logistik

2. Form Isian Laporan Harian Pengawasan Langsung Pencetakan Surat Suara

<p>Pengawasan langsung pencetakan surat suara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Bawaslu Provinsi dapat melakukan pengawasan langsung secara berkala setiap harinya dengan mendatangi pabrik dan mengecek proses jalannya pencetakan surat suara. 2. Tim Bawaslu Provinsi diminta untuk memakai atribut dan dibekali surat tugas dalam melakukan pengawasan. 		
No	Daftar Pertanyaan	Hasil Pengawasan
1.	Apakah terdapat pihak lain (Tim KPU atau kepolisian) yang melakukan pengawasan di pabrik pencetakan surat suara?	Tidak ada. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus ada SPT baru bisa masuk. Sedangkan Kepolisian harus sesuai deng SPRINT.
2.	Apakah terdapat kendala dalam proses pencetakan?	Tidak Ada
3.	Apakah sudah terdapat surat suara yang telah selesai di cetak dan berapa surat suara yang telah dicetak (jenis surat suara, provinsi/dapil apa)?	Dalam Proses, Sampai tanggal 27 Februari 2019, Pukul 16.46 Wib baru menyelesaikan DPRD Provinsi sebanyak 3 Dapil.

4.	Berapa sisa surat suara yang belum selesai cetak (jenis surat suara, provinsi/dapil apa)?	4 Dapil DPRD Provinsi, Presiden dan Wakil Presiden, DPRI dan DPD.
5.	Apakah sudah terdapat surat suara yang gagal cetak atau rusak (jenis surat suara, provinsi/dapil apa)?	Ada, Ketahuan setelah proses sortir.
6.	Apakah terdapat proses pengepakan surat suara yang telah dicetak dan disortir? (Pengawas Pemilu memastikan tidak ada kesalahan dalam proses pengepakan)	Belum dilaksanakan

2) Pengawasan Pendistribusian

Dalam melakukan pengawasan pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu dan Dukungan Perlengkapan Lainnya, Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan berjenjang sesuai dengan jadwal pengiriman yang dilakukan oleh perusahaan hingga sampai dengan TPS. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- 7) Sebelum logistik Pemilu dikirim, terlebih dahulu Bawaslu Provinsi Bengkulu memastikan terdapat pemeriksaan terhadap barang yang akan dikirim ;
- 8) Pemeriksaan dilakukan dalam rangka memastikan apakah logistik Pemilu sudah sesuai dengan alokasi masing-masing masing-masing KPU yang akan menerima kiriman tersebut.

Dalam melakukan pengawasan pendistribusian logistik Pemilu, Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-provinsi Bengkulu juga melakukan koordinasi dengan pihak KPU dan Kepolisian.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten/Kota, logistik tiba di Provinsi Bengkulu dan langsung menuju Kabupaten dan Kota yang telah ditentukan yaitu:

- 1) Logistik untuk Kabupaten Rejang Lebong tiba di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 11 (sebelas) Maret 2019 pukul 15.30 WIB. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, logistik Pemilu dibawa dan disimpan di

- gudang KPU Kabupaten Rejang Lebong. Logistik Pemilu mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian.
- 2) Logistik untuk Kabupaten Lebong tiba di Kabupaten Lebong pada tanggal 11 (sebelas) Maret 2019 pukul 17.30 WIB. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Lebong, logistik Pemilu dibawa dan disimpan di gudang KPU Kabupaten Lebong. Logistik Pemilu mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian.
 - 3) Logistik untuk Kabupaten Mukomuko tiba di Kabupaten Mukomuko pada tanggal 12 (dua belas) Maret 2019 pukul 07.00 WIB. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Mukomuko, logistik Pemilu dibawa dan disimpan di gudang KPU Kabupaten Mukomuko. Logistik Pemilu mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian.
 - 4) Logistik untuk Kabupaten Bengkulu Utara tiba di Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 12 (dua belas) Maret 2019 pukul 03.15 WIB. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, logistik Pemilu dibawa dan disimpan di gudang KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Logistik Pemilu mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian.
 - 5) Logistik untuk Kabupaten Bengkulu Tengah tiba di Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 13 (tiga belas) Maret 2019 pukul 11.48 WIB. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, logistik Pemilu dibawa dan disimpan di gudang KPU Kabupaten Bengkulu Tengah. Logistik Pemilu mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian.
 - 6) Logistik untuk Kota Bengkulu tiba di Kota Bengkulu pada tanggal 13 (tiga belas) Maret 2019 pukul 11.50 WIB. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kota Bengkulu, logistik

Pemilu dibawa dan disimpan di gudang KPU Kota Bengkulu. Logistik Pemilu mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian.

- 7) Logistik untuk Kabupaten Kepahiang tiba di Kabupaten Kepahiang pada tanggal 13 (tiga belas) Maret 2019 pukul 15.30 WIB. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepahiang, logistik Pemilu dibawa dan disimpan di gudang KPU Kabupaten Kepahiang. Logistik Pemilu mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian.
- 8) Logistik untuk Kabupaten Kaur tiba di Kabupaten Kaur pada tanggal 14 (empat belas) Maret 2019 pukul 15.00 WIB. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Kaur, logistik Pemilu dibawa dan disimpan di gudang KPU Kabupaten Kaur. Logistik Pemilu mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian.
- 9) Logistik untuk Kabupaten Bengkulu Selatan tiba di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 14 (empat belas) Maret 2019 pukul 16.42 WIB. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, logistik Pemilu dibawa dan disimpan di gudang KPU Kabupaten Bengkulu Selatan. Logistik Pemilu mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian.
- 10) Logistik untuk Kabupaten Seluma tiba di Kabupaten Seluma pada tanggal 15 (lima belas) Maret 2019 pukul 11.15 WIB. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Seluma, logistik Pemilu dibawa dan disimpan di gudang KPU Kabupaten Seluma. Logistik Pemilu mendapatkan pengamanan dari pihak kepolisian.

3. Hasil-hasil Pengawasan dalam Tahapan dan subTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Temuan

Dari kegiatan pengawasan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tidak didapati/temuan pelanggaran dalam proses pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, tapi terdapat kekurangan logistik Pemilu di beberapa Kabupaten, antara lain :

1) Rejang Lebong

- Surat Suara Presiden dan Wakil Presien 79 lembar
- Surat Suara Pemilu DPR Dapil Bengkulu 385 lembar
- Hologram KPU 2019 sebanyak 243 pcs (untuk formulir plano)

2). Lebong

- Surat Suara Presiden dan Wakil Presien 58 lembar
- Surat Suara Pemilu DPD 103 lembar
- Surat Suara Pemilu DPR Dapil Bengkulu 35 lembar
- Surat Suara Pemilu DPRD Provinsi dapil Bengkulu 4 sebanyak 152 lembar
- Surat Suara Pemilu DPRD Kabupaten dapil 1 sebayak 77 lembar
- Surat Suara Pemilu DPRD Kabupaten dapil 2 sebayak 10 lembar
- Surat Suara Pemilu DPRD Kabupaten dapil 3 sebayak 5 lembar
- Hologram KPU 2019 sebanyak 386 pcs (untuk formulir plano)

3). Mukomuko

- Hologram KPU 2019 sebanyak 554 pcs (untuk formulir plano)
- Formulir C1 A4 DPRD Kabupaten dapil 3 sebanyak 1 set

4) Bengkulu Utara

- Surat Suara Presiden dan Wakil Presien 3 lembar

- Surat Suara Pemilu DPD 3 lembar
 - Surat Suara Pemilu DPR Dapil Bengkulu 23 lembar
 - Surat Suara Pemilu DPRD Kabupaten dapil 4 sebanyak 1 lembar
 - Formulir C1 A4 DPRD Kabupaten dapil 1 sebanyak 6 buku
 - Formulir C1 A4 DPRD Kabupaten dapil 2 sebanyak 6 buku
 - Formulir C1 A4 DPRD Kabupaten dapil 3 sebanyak 6 buku
 - Hologram KPU 2019 sebanyak 1.080 pcs (untuk formulir plano)
- 5) Bengkulu Tengah
- Formulir C1 Plano Pemilu DPR dapil Bengkulu sebanyak 4 lembar
 - Formulir C1 Plano Pemilu DPRD Provinsi dapil Bengkulu 2 sebanyak 1 lembar
 - Formulir C1 Plano Pemilu DPRD Kabupaten dapil 1 sebanyak 4 lembar
 - Formulir C1 Plano Pemilu DPRD Kabupaten dapil 2 sebanyak 4 lembar
 - Formulir C1 Plano Pemilu DPRD Kabupaten dapil 3 sebanyak 3 lembar
 - Formulir C1 Plano Pemilu DPRD Kabupaten dapil 4 sebanyak 3 lembar
- 6) Kota Bengkulu
- Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden 3 lembar
 - Surat Suara Pemilu DPD 3 lembar
- 7) Kepahiang
- Surat Suara Pemilu DPRD Kabupaten dapil 2 sebanyak 223 lembar
 - Surat Suara Pemilu DPRD Kabupaten dapil 4 sebanyak 129 lembar
- 8) Seluma

- Surat Suara Presiden dan Wakil Presien 415 lembar
- Surat Suara Pemilu DPR Dapil Bengkulu 529 lembar
- Surat Suara Pemilu DPRD Kabupaten dapil 1 sebanyak 48 lembar
- Surat Suara Pemilu DPRD Kabupaten dapil 2 sebanyak 4 lembar
- Surat Suara Pemilu DPRD Kabupaten dapil 3 sebanyak 95 lembar
- Formulir C1 Plano PPWP sebanyak 4 set
- Formulir C1 Plano DPD sebanyak 10 set
- Formulir C1 Plano DPR RI sebanyak 14 roll
- Formulir C1 Plano DPRD Kab/Kota dapil 1 sebanyak 7 roll
- Formulir C1 Plano DPRD Kab/Kota dapil 3 sebanyak 4 roll
- Formulir C1 Plano DPRD Kab/Kota dapil 4 sebanyak 5 roll
- Formulir C1 A4 DPRD Kab/Kota dapil 4 sebanyak 10 buku
- Stiker Hologram KPU 2019 sebanyak 1671 pcs untuk Plano

Tabel 20. Keterpenuhan Logistik Pemilihan Umum 2019 Provinsi Bengkulu

PROVINSI	JUMLAH TPS	JUMLAH DPTHP -3	JENIS LOGISTIK	TOTAL KEBUTUHAN LOGISTIK	LOGISTIK		HASIL SORTIR YANG SUDAH DITERIMA (JUMLAH)		TOTAL KEKURANGAN LOGISTIK	KET
					YANG SUDAH DITERIMA	YANG BELUM DITERIMA	KONDISI BAIK	KONDISI TDK LAYAK/RUSAK		
BENGGULU		248.622	SS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	1.429.646	1.429.464	2.027	1.427.047	266	4.702	
			SS DPD	1.429.646	1.431.047	829	1.428.937	254	3.440	
			SS DPR RI	1.429.646	1.430.263	1.090	1.426.185	1.407	3.984	
			SS DPRD PROVINSI	1.430.646	1.431.252	2.282	1.327.863	2.027	4.725	
			SS DPRD KAB/KOTA	2.076.730	2.079.565	1.921	2.072.777	3.581	6.515	
			KOTAK SUARA	32.266	32.379	6	27.865	167	122	
			BILIK SUARA	22.522	20.400	348	17.758	0	3.213	
			SEGEL	722.961	654.690	64.108	568.834	1.041	60.585	
			TINTA	12.330	12.286	10	10.588	108	132	
			JUMLAH	8.586.393	8.521.346	72.621	8.307.854	8.851	87.418	

b. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada KPU untuk segera melengkapi dan menyalurkan kekurangan logistik di setiap kabupaten yang membutuhkan penambahan.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

KPU Provinsi menyambut baik rekomendasi penambahan logistik yang diberikan oleh Bawaslu dengan mengirimkan tim bergerak ke Jakarta tempat pencetakan dan pengadaan logistik Pemilu 2019.

4. Dinamika dan Permasalahan dalam Tahapan dan SubTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Adapun dinamika dan permasalahan yang dihadapi Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam Pengawasan Tahapan dan subTahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yaitu distribusi logistik pemungutan suara sedikit lambat karena lokasi TPS yang sulit dijangkau, serta cuaca yang tidak menentu yang sedikit banyak mempengaruhi proses pendistribusian dan pengawasan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Keberhasilan dalam pengawasan tahapan ini yang dilakukan Bawaslu dimana diketahui sejak dini kekurangan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sehingga dapat dilengkapi secepat mungkin.

E. PELAKSANAAN TAHAPAN DANA KAMPANYE

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Untuk Pemilu tahun 2019, hal-hal yang dianggap rawan dalam tahapan dana kampanye di provinsi Bengkulu antara lain :

- 1) Pelanggaran dana kampanye
- 2) Keterlibatan Partai Politik dalam melaporkan dana kampanye

b. Perencanaan Pengawasan

Berdasarkan UU 7 Tahun 2017 pasal 334 ayat (1) yang berbunyi: Pasangan Calon dan tim kampanye di tingkat pusat wajib memberikan laporan awal Dana Kampanye Pasangan Calon dan tim kampanye kepada KPU paling lama 14 (empat belas) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Pasal 334 ayat (2) berbunyi : Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Sedangkan untuk Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Berdasarkan PKPU 32 Tahun 2018, penyampaian LADK dan rekening Khusus dana Kampanye tanggal 23 September 2018, penyampaian LPSDK pada tanggal 2 Januari 2019, dan penyampaian LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik pada tanggal 26 April 2019 sampai dengan 2 Mei 2019.

Dengan adanya beberapa point yang dianggap rawan dalam pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu mengagendakan pengawasan melekat di KPU Provinsi Bengkulu selaku instansi pemerintah yang menerima laporan dari peserta Pemilu mengenai dana kampanye. Selain itu Bawaslu Provinsi Bengkulu memberikan Surat Himbauan kepada peserta Pemilu

mengenai laporan dana kampanye yang tertuang dalam Surat Himbauan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu menyampaikan bentuk tertulis dan tidak tertulis. Dalam bentuk tidak tertulis, Bawaslu Provinsi Bengkulu secara aktif mengingatkan ke KPU Provinsi Bengkulu untuk menghimbau peserta Pemilu 2019 untuk segera menyerahkan LADK, LPSDK, maupun LPSDK sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Secara tertulis, Bawaslu Provinsi Bengkulu aktif memberikan himbauan –himbauan mengenai laporan dana kampanye peserta Pemilu 2019.

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor : S-1623.A/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu mengagendakan pengawasan langsung proses penyerahan LADK di kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Bawaslu Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan beberapa himbauan mengenai dana kampanye, yaitu :

- 1) Himbauan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 017/K.BE/PM.01.01/I/2019
- 2) Himbauan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 053/K.BE/PM.01.01/IV/2019
- 3) Himbauan Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 158/K.BE/PM.01.01/XII/2018

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan melekat ke kantor KPU Provinsi Bengkulu pada waktu peserta pemilu memberikan laporan LPADK, LPSDK, dan LPPDK dengan daftar sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan langsung proses penyerahan LADK peserta Pemilihan Umum 2019
2. Melakukan pengawasan langsung proses penyerahan LPSDK peserta Pemilihan Umum 2019 ;
3. Melakukan pengawasan langsung proses penyerahan LPPDK peserta Pemilihan Umum 2019 .

Tabel 24. LPPDK peserta Pemilu 2019 :

(DK. 01) FORM PENGAWASAN PELAYANAN KPU				
KEPADA PESERTA PEMILUPADA PENYAMPAIAN LPPDK				
NO	Provinsi	PELAYANAN PENERIMAAN LPPDK PESERTA PEMILU ⁱ		
		KPU Menyediakan <i>Helpdesk</i> ⁱⁱ (<i>Iya/Tidak</i>)	KPU Menerima LPPDK lebih dari pukul 18.00 WIB (<i>Iya/Tidak</i>)	Waktu/hari/Tgl/Bln/th ⁱⁱⁱ
1.	Bengkulu	Ya	Tidak	29 April s.d 2 Mei 2019 08.00 Wib s.d 18.00 Wib

(DK. 02) FORM PENGAWASAN PENYERAHAN LPPDK								
PESERTA PEMILU KEPADA KPU								
NO	Provinsi	JenisPemilu ^{iv}	PartaiPolitik ^v	Penyerahan LPPDK Peserta Pemilu Kepada KPU ^{vi}				
				Menyerahkan ^{vii}	Tidak Menyerahkan ^{viii}	Tepatwaktu ^{ix}	Terlambat ^x	Waktu/hari/Tgl/Bln/th ^{xi}
1	Bengkulu	DPRDPROVINSI	PKB	Menyerahkan	-	Tepat	-	Selasa, 30 April 2019 (15.16 Wib)
2			GERINDRA	Menyerahkan	-	Tepat	-	Kamis, 2 Mei 2019 (10.10 Wib)
3			PDIP	Menyerahkan	-	Tepat	-	Senin, 29 April 2019 (09.18 Wib)
4			GOLKAR	Menyerahkan	-	Tepat	-	Rabu, 1 Mei 2019 (09.37 Wib)
5			NASDEM	Menyerahkan	-	Tepat	-	Rabu, 1 Mei 2019 (10.00 Wib)
6			GARUDA	Menyerahkan	-	Tepat	-	Rabu, 1 Mei 2019 (16.00 Wib)
7			BERKARYA	Menyerahkan	-	Tepat	-	Kamis, 2 Mei 2019 (15.30 Wib)
8			PKS	Menyerahkan	-	Tepat	-	Senin, 29 April 2019 (10.56 Wib)
9			PERINDO	Menyerahkan	-	Tepat	-	Selasa, 30 April 2019 (09.39 Wib)
10			PPP	Menyerahkan	-	Tepat	-	Rabu, 1 Mei 2019 (15.35 Wib)
11			PSI	Menyerahkan	-	Tepat	-	Kamis, 2 Mei 2019 (17.35 Wib)
12			PAN	Menyerahkan	-	Tepat	-	Rabu, 1 Mei 2019 (13.45 Wib)
13			HANURA	Menyerahkan	-	Tepat	-	Selasa, 30 April 2019 (13.30 Wib)
14			DEMOKRAT	Menyerahkan	-	Tepat	-	Selasa, 30 April 2019 (08.00 Wib)
15			PBB	Menyerahkan	-	Tepat	-	Rabu, 1 Mei 2019 (10.58 Wib)
16			PKPI	Menyerahkan	-	Tepat	-	Senin, 29 April 2019 (13.55 Wib)

(DK. 03) FORM PENGAWASAN																
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK)																
NO	JenisPemilu	PartaiPolitik	Kepatuhan Pelaporan LPPDK		Uang dalam Pembukaan Rekening	Jumlah Penerimaan Sumbangan				Pengeluaran						Saldo LPPDK
			Melapor	Tidak Melapor		Jumlah sumbangan dari Partai Politik ⁱⁱ	Jumlah sumbangan dari Peseorangan	Jumlah sumbangan dari Kelompok ⁱⁱⁱ	Jumlah sumbangan dari Badan Usaha	Jumlah (Rp) dari Pertemuan Terbatas ^{iv}	Jumlah (Rp) dari Pertemuan Tatap Muka ^v	Jumlah (Rp) dari RapatUmum ^{vi}	Jumlah (Rp) dari APK ^{vii}	Jumlah (Rp) dari Bahan Kampanye ^{viii}	Jumlah (Rp) dari Kegiatan Lainnya ^{ix}	
1	DPRD PROVINSI	PKB	Melapor	-	-	0	752.335.000	0	0	0	0	0	0	0	752.335.000	0
2		GERINDRA	Melapor	-	-	416.374.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	416.374.000	0
3		PDIP	Melapor	-	-	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000.000	0
4		GOLKAR	Melapor	-	250.000	1.950.970.028	0	0	0	0	0	0	0	0	1.950.970.028	0
5		NASDEM	Melapor	-	250.000	226.326.600	250.000	0	0	0	0	0	0	0	226.326.600	0
6		GARUDA	Melapor	-	-	7.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.375.000	1.000.000
7		BERKARYA	Melapor	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		PKS	Melapor	-	-	1.780.500.000	0	0	0	0	0	0	17.000.000	0	1.746.400.000	17.100.000
9		PERINDO	Melapor	-	-	401.552.100	0	0	0	0	0	0	0	0	400.552.100	1.000.000
10		PPP	Melapor	-	-	620.136.500	0	0	0	0	0	0	0	0	620.136.500	0
11		PSI	Melapor	-	100.000	49.700.000	49.700.000	0	0	0	0	0	41.600.000	0	0	8.100.000
12		PAN	Melapor	-	100.000	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	0
13		HANURA	Melapor	-	-	0	194.655.500	0	0	0	0	0	0	0	194.655.500	0
14		DEMOKRAT	Melapor	-	80.099	202.025.320	0	0	0	0	0	0	0	0	202.025.320	0
15		PBB	Melapor	-	249.322.14	11.975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	11.975.000	250.000
16		PKPI	Melapor	-	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0

(DK. 04) FORM PENGAWASAN PENYERAHAN LPPDK							
KPU KEPADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)							
NO	Provinsi	JenisPemilu ^{xx}	PartaiPolitik ^{xxi}	Penyerahan LPPDK KPU Kepada KAP ^{xxii}			
				Menyerahkan ^{xxiii}	Tidak Menyerahkan ^{xxiv}	KAP	Waktu/hari/Tgl/Bln/th ^{xxv}
1	Bengkulu	DPRD PROVINSI	PKB	Menyerahkan	-	Yanuar dan Riza	Selasa, 30 April 2019 (15.50 Wib)
2			GERINDRA	Menyerahkan	-	Selamet Rianto, Aryanto dan Rekan	Kamis, 2 Mei 2019 (10.42 Wib)
3			PDIP	Menyerahkan	-	Suherman	Senin, 29 April 2019 (09.38 Wib)
4			GOLKAR	Menyerahkan	-	Tribowo Yulianti	Rabu, 1 Mei 2019 (09.57 Wib)
5			NASDEM	Menyerahkan	-	Abdul Rasyid	Rabu, 1 Mei 2019 (10.35 Wib)
6			GARUDA	Menyerahkan	-	Penata dan Rekan	Rabu, 1 Mei 2019 (16.30 Wib)
7			BERKARYA	Menyerahkan	-	Suparman, Bambang Ganis	Kamis, 2 Mei 2019 (15.48 Wib)
8			PKS	Menyerahkan	-	Darman Usman	Senin, 29 April 2019 (11.26 Wib)
9			PERINDO	Menyerahkan	-	Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan	Selasa, 30 April 2019 (09.56 Wib)
10			PPP	Menyerahkan	-	Wijdjojo Kusuomo, Ruchendi Mardjito Rrushadi dan Rekan	Rabu, 1 Mei 2019 (15.55 Wib)
11			PSI	Menyerahkan	-	Ishak Saleh Suwondo dan Rekan	Kamis, 2 Mei 2019 (17.47 Wib)
12			PAN	Menyerahkan	-	Muhammad Adi	Rabu, 1 Mei 2019 (14.15 Wib)

13			HANURA	Menyerahkan	-	Krisnawan Nugroho dan Fahmy	Selasa, 30 April 2019 (13.55 Wib)
14			DEMOKRAT	Menyerahkan	-	Hartman Sundjaya	Selasa, 30 April 2019 (08.40 Wib)
15			PBB	Menyerahkan	-	Asvriwangi dan Rekan	Rabu, 1 Mei 2019 (11.28 Wib)
16			PKPI	Menyerahkan	-	Sabar dan Rekan	Senin, 29 April 2019 (14.25 Wib)

(DK. 05)

PENGAWASAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

TANGGAL PENGAWASAN:

No	Provinsi	JenisPemilu	PartaPolitik	Nama KAP	Alamat	Kebenaran Alamat	Tgl Tanda Tangan Kontrak	Jumlah Kontrak	Jumlah Auditor	Keterangan dan Data lainnya
1	Bengkulu	DPRDProvinsi	PKB	Yanuar dan Riza	Gedung DPK PT. Jamsostek, Jl. Tangkas Baru No.1 Gatot Subroto Jakarta Selatan	-	-	358.754.000	2 Orang	KAP melakukan audit terhadap 10 dokumen LPPDK
2			GERINDRA	Selamat Rianto, Aryanto dan Rekan	Fatmawati Festival Blok b-11 Jl. RS. Jl.Fatmawai Nomor 50 Jakarta	-	-	362.450.000	4 Orang	KAP melakukan audit terhadap 10 dokumen LPPDK
3			PDIP	Suherman	Jl.KS Tubun Nomor 31 A Rawa Laut Bandar Lampung	-	-	359.645.000	4 Orang	KAP melakukan audit terhadap 10 dokumen LPPDK
4			GOLKAR	Tribowo Yulianti	JL. MT Haryono Nomor 548 Semarang	-	-	359.810.000	9 Orang	KAP melakukan audit terhadap 10 dokumen LPPDK
5			NASDEM	Abdul Rasyid	Jl. Sulaksana Baru VII, Nomor 02 Bandung	-	-	362.450.000	2 Orang	KAP melakukan audit terhadap 10 dokumen LPPDK
6			GARUDA	Penata dan Rekan	Jl. Warung Buncit Raya, Nomor 101 G Pejanten Barat Pasar Minggu, Jakarta Selatan	-	-	240.240.000	4 Orang	KAP melakukan audit terhadap 10 dokumen LPPDK
7			BERKARYA	Suparman, Bambang Ganis	Jl. Ciputat Raya Nomor 40 Pondok pinang Kebayoran lama	-	-	362.450.000	4 Orang	KAP melakukan audit terhadap 10 dokumen LPPDK
8			PKS	Darman Usman	Jl. Dempo Raya Nomor 11 F Sawah Lebar Ratu Agung Kota Bengkulu	-	-	357.445.000	2 Orang	KAP melakukan audit terhadap 10 dokumen LPPDK

9			PERINDO	Sriyadi Elly Sugeng dan Rekan	Rukan Tanjung Mas Raya, Blok B 1 Nomor 22 Tanjung Barat Jagakarsa, Jakarta	-	-	360.250.000	3 Orang	KAP melakukan audit terhadap 10 dokumen LPPDK
10			PPP	Wijdjojo Kusuomo, Ruchendi Mardjito Rrushadi dan Rekan	Jl. Beruang Raya Nomor 48 Semarang	-	-	362.450.000	4 Orang	KAP melakukan audit terhadap 10 dokumen LPPDK
11			PSI	Ishak Saleh Suwondo dan Rekan	Jl. HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	-	-	330.935.000	1 Orang	KAP melakukan audit terhadap 10 dokumen LPPDK
12			PAN	Muhammad Adi	Jl. S. Parman, Nomor 59 Padang Jati Bengkulu	-	-	350.075.000	3 Orang	KAP melakukan audit terhadap 10 dokumen LPPDK
13			HANURA	Krisnawan Nugroho dan Fahmy	Jl. Gatot Subroto, Kav, 32-34 Jakarta	-	-	362.450.000	4 Orang	KAP melakukan audit terhadap 10 dokumen LPPDK
14			DEMOKRAT	Hartman Sundjaya	Ruko Kav, C komplek Marga Cipta Jl. Bodogol Bandung	-	-	362.450.000	2 Orang	KAP melakukan audit terhadap 10 dokumen LPPDK
15			PBB	Asvriwangi dan Rekan	Jl. Pelumpang Semper Nomor 52 Koja Jakarta Utara	-	-	299.420.000	6 Orang	KAP melakukan audit terhadap 10 dokumen LPPDK
16			PKPI	Sabar dan Rekan	Jl. Saturnus Utara Nomor 4 Margahayu Raya, Bandung	-	-	362.450.000	3 Orang	KAP melakukan audit terhadap 10 dokumen LPPDK

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Dalam kegiatan pengawasan tahapan dan subtahapan dana kampanye, Bawaslu Provinsi Bengkulu tidak menemukan pelanggaran dalam proses penyerahan laporan LADK, LPSDK, maupun LPPDK. Sampai batas waktu terakhir penyerahan laporan LPSDK, terdapat beberapa peserta pemilu yang tidak menyerahkan laporan LPSDK ke KPU Provinsi Bengkulu. Peserta yang tidak menyerahkan laporan LPPDK itu berasal dari calon DPD RI dapil Provinsi Bengkulu yaitu Emilia Puspita, S.H dan Abdul Rauf Tika.

b. Rekomendasi

Bawaslu Provinsi Bengkulu tidak memberikan rekomendasi apapun ke KPU Provinsi Bengkulu dalam tahapan dan subtahapan dana kampanye.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan subtahapan Dana Kampanye

Dalam menyampaikan LADK, LPSDK, maupun LPPDK masih banyak peserta pemilu yang masih belum memahami pembuatan laporan tersebut sehingga berulang kali peserta pemilu berkoordinasi dengan KPU mengenai pembuatan laporan dana kampanye. Jadi dalam melakukan pengawasan, Bawaslu Provinsi Bengkulu berulang kali menurunkan tim ke KPU untuk melakukan pengawasan yang ternyata ada sebagian peserta Pemilu hanya melakukan koordinasi pembuatan laporan dana kampanye ke KPU.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye

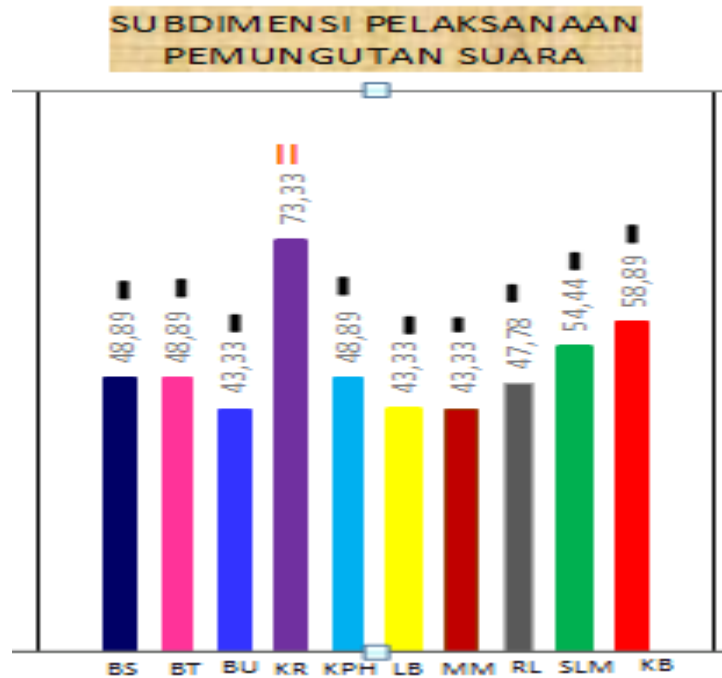
Dalam Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye, Bawaslu Provinsi Bengkulu berhasil melakukan pengawasan dengan baik sehingga pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan ini dapat dihindarkan.

F. PELAKSANAAN PENGAWAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA

1. Pelaksanaan Pengawasan:

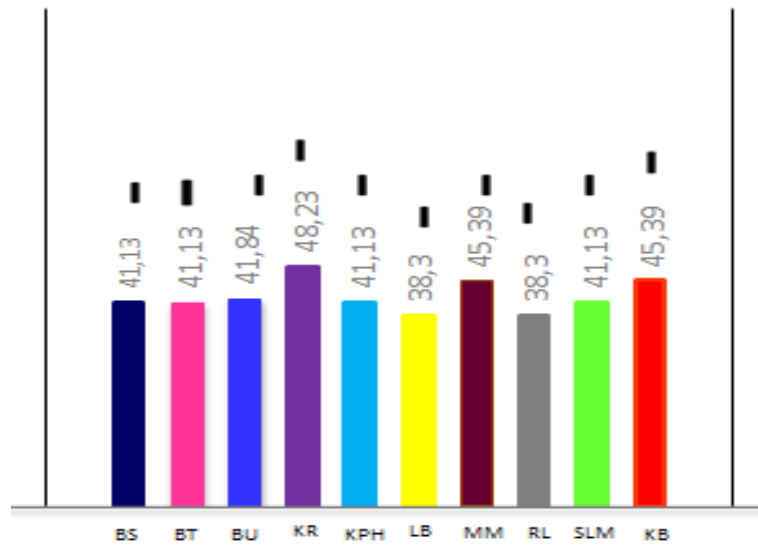
a. Kerawanan-Kerawanan dalam IKP 2018

Didalam Indeks Kerawan Pemilu 2018 pada Subdimensi Pelaksanaan Pemungutan Suara cenderung memiliki kerawanan rendah tetapi terdapat Kabupaten/Kota yang memiliki kecenderungan Kerawanan Tinggi yaitu kabupaten Kaur. Adapun diagram subdimensi pelaksanaan pemungutan suara adalah sebagai berikut.



Selain sub dimensi pelaksanaan pemungutan suara, ada juga sub dimensi penyelenggara pemilu yang bebas dan adil. Pada sub dimensi ini, Kabupaten/Kota Bengkulu cenderung memiliki kerawanan rendah.

SUBDIMENSI PENYELENGGARA



b. Kerawanan-kerawanan dan IKP 2019

No	IKP	Keterangan
1.	Dimensi Konteks Sosial Politik	40,00 (Kerawanan Sedang)
	a. Terjadi Kerususan paska perhitungan	
	b. Keberpihakan Penyelenggara	
	c. Abai terhadap tanggung Jawab	
	d. Pelanggaran Standar Pelaksana	
	e. Penyalahgunaan Wewenang	
2.	Dimensi Penyelenggara yang Bebas dan Adil	53,70 (Kerawanan Sedang)
	a. Hilangnya hak Pilih	
	b. Proses Penghitungan Tidak Terbuka	
	c. Proses penghitungan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan	

	d. Rekapitulasi Suara tidak tepat waktu	
	e. Rekapitulasi Tidak Akurat	
	f. Penetapan Hasil Tidak Tepat Waktu	
	g. Penetapan Hasil Tidak Akurat	
	h. Rekapitulasi Suara Tidak Akurat	
	i. Terjadi gugatan terhadap hasil Pemilu oleh Caleg di internal Partai	
	j. Terjadi Gugatan Hasil Pemilu di MK	
	k. Tidak Efektifnya Peran Saksi Perwakilan Peserta Pemilu	
	l. Tidak Adanya Pemantau Pemilu	
	m. Penerusan laporan dugaan pelanggaran pidana tidak ditindaklanjuti	
3.	Dimensi Partisipasi Politik	49,00 (Kerawanan Sedang)
	a. Partisipasi di bawah target KPU (77,5%)	
	b. Lokasi TPS yang sulit dijangkau	
	c. Rendahnya partisipasi peserta Pemilu untuk mematuhi aturan Pemilu	

b. Perencanaan dan Pengawasan Pengawasan

Fokus, dan Strategi Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk melakukan Pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dalam melakukan pengawasan terkait proses

Pemungutan, Perhitungan, dan Rekapitulasi Hasil Perolehan suara Pemilu 2019 adalah dalam bentuk Rapat Kerja Teknis Pengawasan, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Supervisi, Himbauan, dan intruksi dengan fokus sasaran Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu, KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu, Pemantau Pemilu, Steakholder Terkait dan DPD Perempuan Kaukus politik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bawaslu Provinsi Bengkulu melaksanakan Kegiatan Rapat Fasilitasi Dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tentang Rekapitulasi Dan Pungut Hitung, sebagai upaya pencegahan terhadap tahapan dan kegiatan yang akan dilakukan pada Pemilihan Umum tahun 2019. Rapat Fasilitasi Dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tentang Rekapitulasi Dan Pungut Hitung dilaksanakan pada 9 s.d. 11 Maret 2019, bertempat di Hotel Santika Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bawaslu dan KPU dan satu orang staf Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu serta staf Bawaslu Provinsi Bengkulu. Hasil dari kegiatan Bawaslu Provinsi Bengkulu dapat Membangun kerja sama pengawasan yang bersinergi, Peserta dapat mengetahui teknis dan pentingnya peran pengawasan Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tentang Rekapitulasi dan Pungut Hitung, peserta dapat mengetahui dan memahami peran dan hubungan Bawaslu dalam kerja sama pengawasan dengan KPU, peserta dapat memahami potensi pelanggaran tahapan rekapitulasi dan pungut hitung melalui Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tentang Rekapitulasi dan Pungut Hitung, peserta dapat mengetahui mekanisme/alur penyelesaian sengketa pemilu pada tahapan rekapitulasi pungut hitung melalui Rapat

Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tentang Rekapitulasi dan Pungut Hitung, peserta memahami pentingnya mengetahui regulasi pemilihan umum, dengan metode penyampaian pemaparan materi dan di isi dengan sesi diskusi, sesi kelas dan pembuatan rencana tindak lanjut.

- b) Bawaslu Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu tahun 2019 dengan DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Bengkulu, sebagai upaya pencegahan terhadap seluruh tahapan dan kegiatan yang akan dilakukan pada pemilihan umum tahun 2019. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019 dengan DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Bengkulu, dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 22 Maret 2019 bertempat di Hotel Grage Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kaukus Perempuan Indonesia, Kasubbag dan Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu Hasil dari kegiatan Bawaslu Provinsi Bengkulu, Peserta dapat mengetahui mekanisme pengawasan pemilu 2019, peserta dapat mengetahui dan memahami peran Bawaslu, untuk mengetahui setiap potensi pelanggaran dalam tahapan pengawasan pemilu tahun 2019, untuk melakukan pencegahan setiap potensi pelanggaran dalam setiap tahapan pemilu tahun 2019, peserta memahami pentingnya mengetahui regulasi pemilihan umum, dengan metode penyampaian pemaparan materi dan di isi dengan sesi diskusi, sesi kelas dan pembuatan rencana tindak lanjut
- c) Bawaslu Provinsi Bengkulu melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan pengawasan partisipatif dan akreditasi pemantau pemilu, sebagai upaya pencegahan

terhadap seluruh tahapan dan kegiatan yang akan dilakukan pada pemilihan umum tahun 2019. Rapat koordinasi pelaksanaan pengawasan partisipatif dan akreditasi pemantau pemilu dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 26 Maret 2019, yang mana bertempat di Hotel Santika Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Mahasiswa/i GMNI, HMI, IMM, PMII, KAMMI, GMKI, Kasubbag dan Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu. Hasil dari kegiatan Bawaslu Provinsi Bengkulu ini adalah Peserta dapat mengetahui teknis dan pentingnya peranan pengawasan Rapat koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif dan Akreditasi Pemantau Pemilu, Peserta dapat mengetahui dan memahami peran Bawaslu, Untuk mengetahui setiap potensi pelanggaran dalam tahapan pemilu tahun 2019, untuk mencegah melakukan potensi pelanggaran setiap tahapan pemilu tahun 2019, Peserta dapat memahami pentingnya mengetahui regulasi pemilihan umum, metode yang dilakukan adalah penyampaian pemaparan materi dan di isi dengan sesi diskusi, sesi kelas dan pembuatan rencana tindak lanjut.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Merujuk pada IKP 2019 Bawaslu Provinsi Bengkulu yang berada pada kategori kerawanan sedang dengan nilai 50,37, oleh karena itu Bawaslu Provinsi Bengkulu membuat Surat Himbauan dan surat intruksi terkait pencegahan pada saat pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2019 yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat Himbauan Kepada Ketua KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 016/K.BE/PM.01.01/1/2019 (Terlampir)

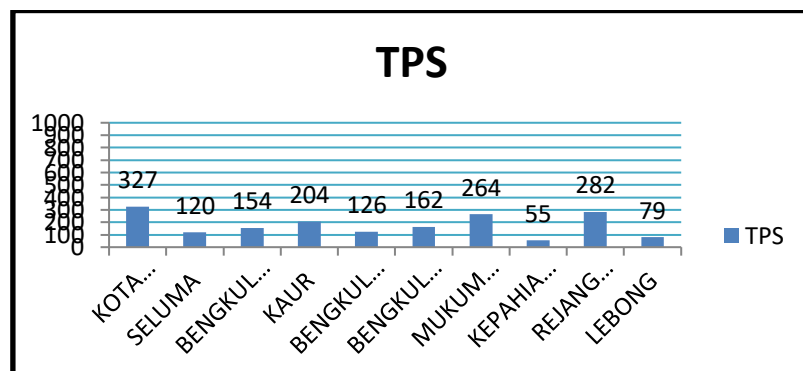
- 2) Surat Himbauan Kepada Ketua Partai Politik Provinsi Bengkulu, Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Bengkulu, dan Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan nomor: 044/K.BE/PM.01.01/IV/2019 (Terlampir).
- 3) Surat Intruksi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu dengan Nomor:048/K.BE/PM.00.01/IV/2019 (Terlampir).
- 4) Surat Himbauan Penetapan Pemantau Pemilu dengan nomor:039/K.BE/PM.01.01/III/2019. (Terlampir).
- 5) Surat undangan nomor: 060/K.BE/PM/01.01.5/2019 Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan persiapan dengan mengundang Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu untuk mengecek kesiapan data dan Inventarisir masalah terkait proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi. (DIM terlampir)
- 6) Surat Rekomendasi kepada KPU Provinsi Bengkulu dengan nomor:062/K.BE/PM.01.01/V/2019 berdasarkan hasil inventarisir Masalah yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu. (Terlampir).
- 7) Bawaslu Provinsi Bengkulu Menyusun TPS Rawan untuk memetakan potensi-potensi yang akan terjadi pada saat menjelang hari pemungutan dan perhitungan suara Pemilu 2019 berdasarkan indikator-indikator berikut.

Tabel Indikator TPS Rawan

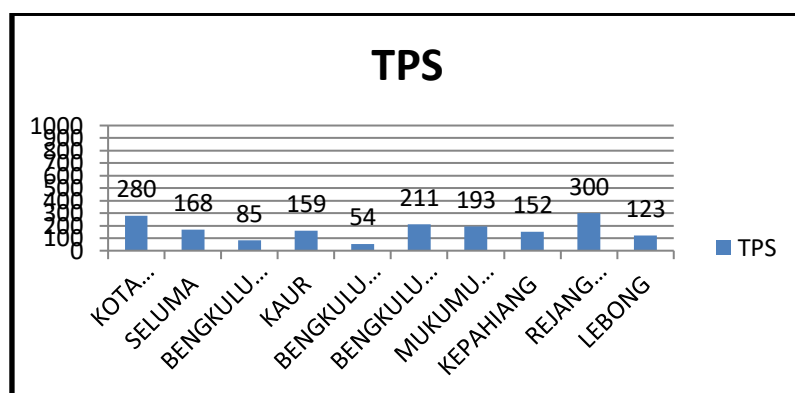
NO	VARIABEL	INDIKATOR
1.	Penggunaan Hak Pilih/Hilangnya hak pilih	1. Terdapat Pemilih DPTb dalam TPS
		2. Terdapat Pemilih DPK dalam TPS
		3. TPS dekat rumah sakit
		4. TPS dekat perguruan tinggi
		5. TPS dekat lembaga pendidikan (pesantren/asrama)
2.	Kampanye	6. Terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye di TPS
		7. Terdapat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras dan golongan di sekitar TPS.
3.	Netralitas	8. Petugas KPPS berkampanye untuk peserta Pemilu
4.	Pemungutan Suara	9. TPS berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta Pemilu
		10. Terdapat Logistik/perengkapan pemungutan suara mengalami kerusakan untuk di TPS

Adapun hasil Penyusunan TPS Rawan Se-Provinsi Bengkulu adalah sebagai Berikut:

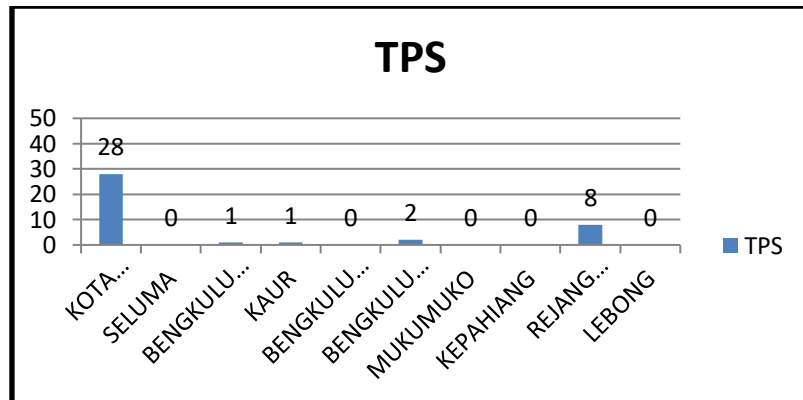
- I. Variabel Penggunaan Hak Pilih/Hilangnya Hak Pilih Indikator Terdapat Pemilih DPTB Dalam TPS



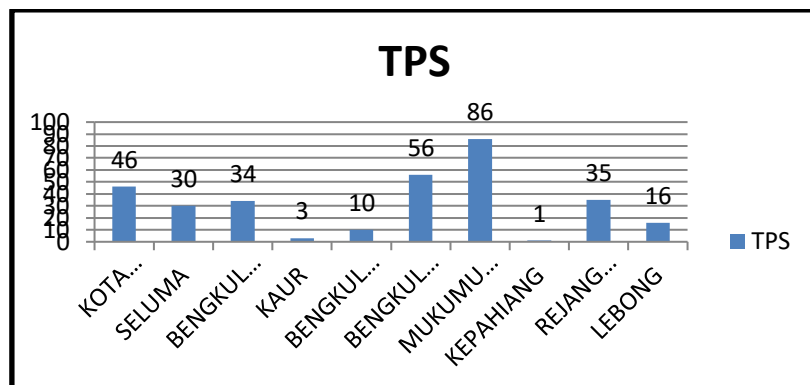
- II. Variabel Penggunaan Hak Pilih/Hilangnya Hak Pilih Indikator Terdapat Pemilih DPK Dalam DPS



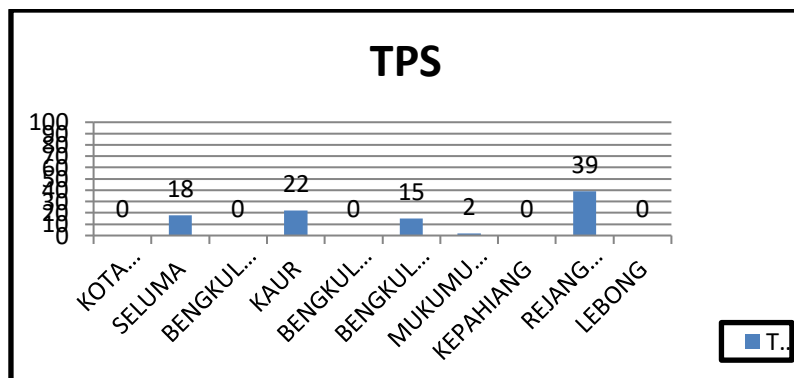
III. Variabel Penggunaan Hak Pilih/Hilangnya Hak Pilih
Indikator Terdapat Pemilih TPS Dekat Rumah Sakit



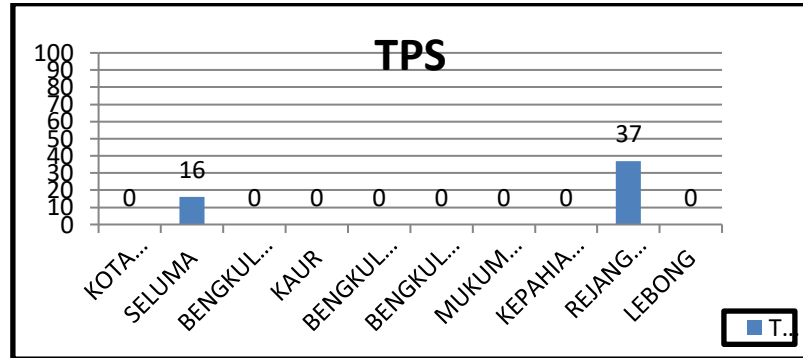
IV. variabel penggunaan hak pilih/hilangnya hak pilih
indikator terdapat Pemilih TPS dekat TPS dekat Lembaga Pendidikan (Pesantren/Asrama)



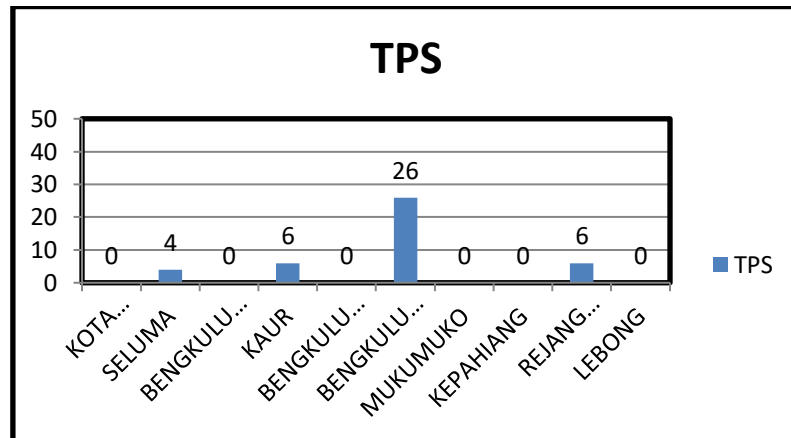
V. variable kampanye indikator terdapat praktik pemberian uang
atau barang pada masa kampanye di TPS



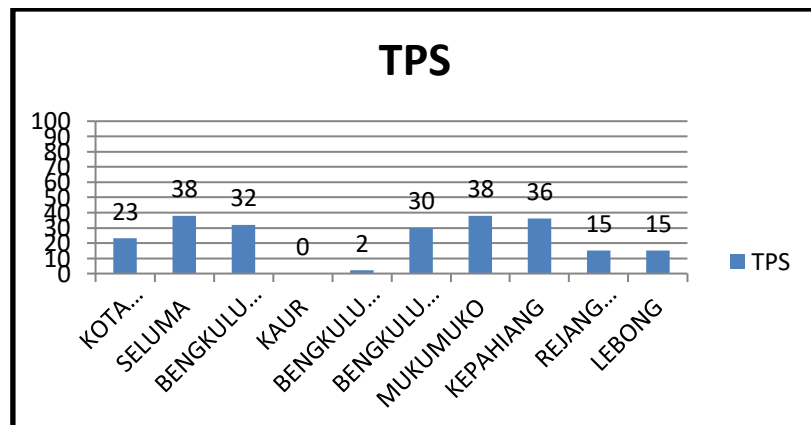
- VI. Variabel Kampanye Indikator Terdapat Peraktik Menghina/Menghasut Diantara Pemilih Terkait Isu Agama, Suku, Ras Dan Golongan Di Sekitar TPS



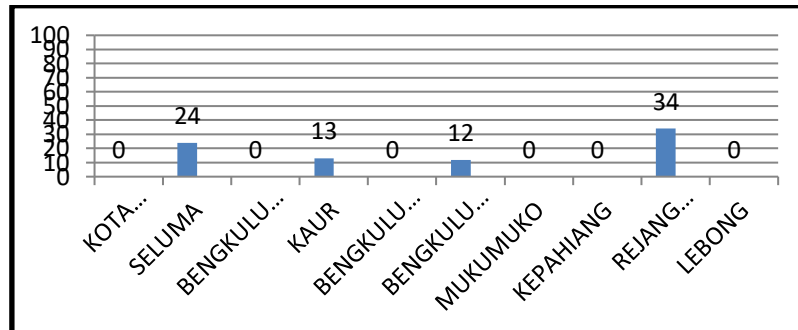
- VII. Variabel netralitas Indikator Petugas KPPS berkampanye untuk Peserta Pemilu



- VIII. Variabel Pemungutan Suara Indikator TPS Berada Di Dekat Posko/Rumah Tim Kampanye Peserta Pemilu



IX. Variabel Pemungutan Suara Indikator Terdapat Logistik/Perlengkapan Pemungutan Suara Mengalami Kerusakan Untuk TPS



b. Aktivitas Pengawasan

Pengawasan Pemungutan Suara Pada hari H tanggal 17 April 2019 Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pencegahan dan supervisi di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Kepahiang terkait pemungutan dan perhitungan suara. Pada pemilihan suara ulang yang terjadi di beberapa TPS di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bngkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan Supervisi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Pemungutan Suara Ulang (PSU)

no	Kabupaten/ Kota	Tanggal Pelaksanaan PSU	Fokus TPS yang Melakukan PSU
1.	Kota Bengkulu	24 April 2019	TPS 15 Kel.Rawa Makmur Permai Kec. Muara Bangka Hulu
2.	Mukomuko	24 April 2019	TPS 1 Kel.Penarik Kec. Penarik
3.	Kepahiang	27 April 2019	TPS 2,3, dan 4 Kel. Kampung Bogor Kec. Kepahiang.
4.	Kaur	27 April 2019	TPS 1 dan 2 Kec. Tanjung Kemuning Kel. Tanjung Kemuning III
5.	Seluma	27 April 2019	TPS 1 dan 2 Kecamatan Seluma Utara. Desa Sekalak.

Pengawan pada saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu di Tingkat Provinsi, Bawaslu Provinsi Bengkulu membuat surat tugas untuk mengawasi setiap proses jalannya rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Provinsi dengan rincian sebagai berikut :

1) Pada tanggal 1 s.d 7 Mei 2019 Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan pengawasan Hasil rekapitulasi suara pemilu tahun 2019 tingkat kabupaten/kota se-provinsi Bengkulu, di KPU Provinsi Bengkulu dengan nomor surat tugas :450.a/BE.Set/IV/2019. **(Data Terlampir).**

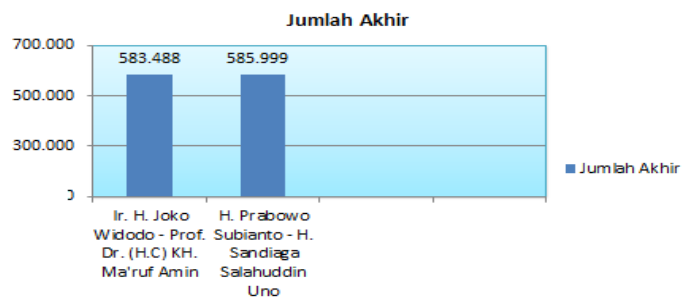
2) Pada tanggal 12 Mei 2019 Bawaslu Provinsi Bengkulu mengikuti Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2019 di Hotel Santika dengan nomor surat tugas : 465/ST/BE/Set/V/2019.

Hasil dari pengawasan rekapitulasi tingkat Provinsi Bengkulu di tuangkan di dalam Form A dan hasil dari Rekapitulasi di tingkat Provinsi di tuangkan di dalam Berita Acara DC Provinsi **(Form A dan BA DC terlampir).**

Adapun grafik dan tabel hasil **BA DC1** adalah sebagai berikut :

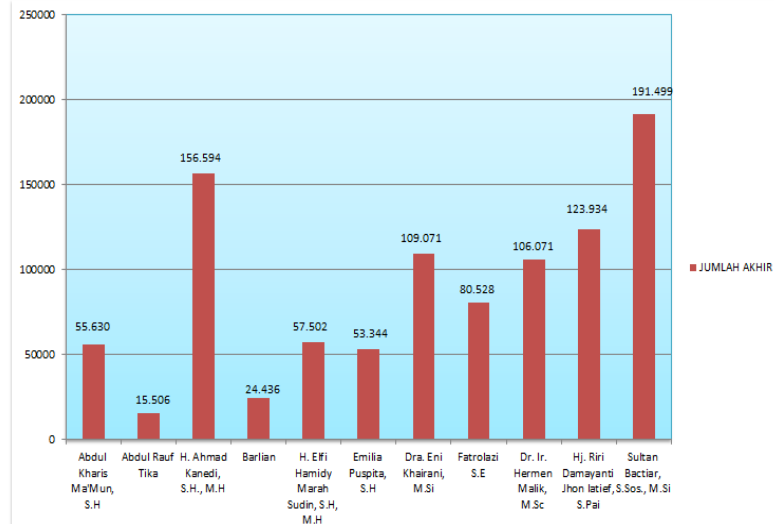
Grafik DC1 PPWP

MODEL DC1 PPWP



Grafik DC1 DPD

MODEL DC-1 DPD



Data Peolehan Perenkingan Calon Anggota DPD

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1	SULTAN BACTIAR, S.Sos., M.Si	191499
2	H. AHMAD KANEDI, SH., MH	156594
3	HJ. RIRI DAMAYANTI JOHN LATIEF, S.Psi	123934
4	Dra. ENI KHAIRANI, M.Si	109295
5	Dra. HERMEN MALIK, M.Sc	106071
6	FATROLAZI, SE	80528
7	H. ELFI HAMIDY MARAH SUDIN, SH., MH	57502
8	ABDUL KHARIS MA'MUN, SH	55630
9	EMILIA PUSPITA, SH	53344
10	BARLIAN	24436
11	ABDUL RAUF TIKA	15506

Tabel DC DPR RI

Partai	Nama Calon	Jumlah Akhir
PKB	1. Eko P Sanjdjojo	48.625
	2. Herliardo	7.017
	3. Dewi Paramita	5.002
	4. Dena Anggari	1.066
Gerindra	1. Susi Marley Bachsin	36.741
	2. Dr. Heri Budianto	19.586
	3. Dr. lia Lastari	31.364
	4. Daniel Pujosudarmo	10.032
PDIP	1. Hj. Elva Hartati Murman	44.711
	2. Restuty Aprillia	15.418
	3. Muspani	29.288
	4. Trio Arsepto Sakut	9.089
Golkar	5. Drs. Taufiq Hidayat	22.614
	6. Trisna Anggraini	13.987
	7. Alisya Fianne janne	4.245
	8. Mohammad Saleh	66.536
Nasdem	1. Dr. Anarulita Muchtar	30.360
	2. Hj. Leni Haryati jhon latief	29.524
	3. Michael putra Ferly	8.725
	4. Ir. Wismen a Razak	11.237
Garuda	1. Raja Huntal gading Hendry A	2.123
	2. Elva Meiliyanti	1.941
Berkarya	1. Azwar Boerhan	8.580
	2. Septi Efiyeti	4.236
	3. Drs. Hendarmin Afandi	1.857
	4.	
PKS	5. Dr. H Dani Hamdani	64.687

	6. Hj. Lidia Chairida	5.258
	7. Rita Yusefa	3.890
	8. Junaidi Albab Setiawan	9.099
Perindo	1. Dr. Ir. Ruslan wijaya	11.982
	2. Isnani Martuti	5.489
	3. Mufia Zuhri	3.980
	4. Putri Mukaramah	2.182
PPP	1. Ihsan Nahromi	18.634
	2. Angga Febi Aramaniza	2.820
	3. Khairiah	1.127
PSI	1. Dickson Aritonang	10.169
	2. Edward Mohammad Rozie	1.993
	3. Sepda Ayu WD	1.033
	4. Natasha Vini Labora	887
PAN	1. Dr. H. Ahmad Dasan	22.139
	2. Hj. Dewi Coryati	54.830
	3. H. Benny Suharto	26.102
	4. Hj. Yennita Fitriani	7.392
Hanura	1. Rini Susanti	1.048
	2. Aswanto	392
	3. Susanti Ningsih	188
Demokrat	1. H. Syamhasrudi Saleh	18.940
	2. Wiwik Asri Setyowati	3.339
	3. Rori junius Armija	1.805
	4. Mardiana Muksin	2.017
PBB	1. Rindra Panggar Besi	3.343
	2. Okto brawijaya Trisakti	1.067
	3. Lorina Kristin	366

PKPI	1. Ir. Syofyan Hosen	4.480
	2. Aizamia	3.102

Data Perengkingan Perolehan Suara Untu DPR RI

NO	PARTAI	SUARA TOTAL PARTAI
1	PDIP	137006
	HJ. ELVA HARTATI MURMAN, S.IP, MM	
2	GOLKAR	136581
	MOHAMMAD SALEH	
3	GERINDRA	130846
	SUSI MARLENY BACHSIN, SE., MM	
4	PAN	121990
	Hj. DEWI CORYATI, M.Si	
5	PKS	98952
	Dr. H. DENI HAMDANI, M.Pd	

Tabel DC DPRD Provinsi Dapi I

NO	URAIAN	KOTA BENGKULU
1	PKB	1385
	Suimi Fales,SH,MH	7970
	Peri Sapran Ediwijaya	548
	Evy Herawati	272
	Helmi, AR, SH	584
	Windy Kurnia Gandini	108
	Desy Marleni, S.Pd	122
	Imam Setiawan, SE	143
	Aurego Jaya, S.Sos	471
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	11603
2	GERINDRA	3606
	H. Suharto, S.E	8935
	Nurpandi, S.Sos	738
	Aznaini Thaib	658
	Lasrun Situmeang, S.Sos, M.M	464
	Indah Purnama Sari	326
	Drs. Miftahuddin, M.M	222
	Hj. Nurlela Nawawi, SKM, MM	748

	Kenedi, S.T	1276
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	16973
3	PDIP	2765
	Sunardi Kusuma Jaya, S.Sos	1442
	Yuzarial Zahari	445
	Meti Fijrianti	647
	Marlitawati	262
	CHURAIRA, S.E.	508
	RITA ELMALINI	279
	JUNAI DI ARFIAN KASIP, S.Sos	435
	WEHELMI, S.H., M.M.	875
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	7658
4	GOLKAR	2267
	Ir. PATRIANA SOSIALINDA	7140
	FRENTINDO, S.T.	911
	ARGANI MUKTI	1163
	YUAN DEGAMA	8171
	Drs. ASNAWI A LAMAT, M.Si.	2665
	WARITA, S.E.	633
	TETTY LUMONGGA	484
	Drs. SUMARDI, M.M.	8617
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	32051
5	NASDEM	1399
	Hj. ERNA SARI DEWI, S.E.	10434
	RENDRA GINTING, S.P.	1564
	AGUNG PRATAMA, S.H.	336
	ADIAN SYAH, S.Sos	269
	ASLANIAH, S.Sos	504
	ZULKARNAINI, S.Sos	1019
	Dra. MARYANA, M.M.	1442
	AGUSSALIM HASAN, S.Sos	1443
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	18410
6	GARUDA	210
	Drs.H.YASARLIN, M.Pd.	281
	LELY HERAWATI	90
	ZABIDI ONI	113
	RUBIYATI	21
	DIANA HARSANTI	30
	H Aidin Syafuri	59
	FABRI FIDERI, S.T.	89
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	893

7	BERKARYA	758
	Drs. RAZIANOVA GAFOER	497
	Drs. SUHARDY BASYIR	581
	YUNI HARLINDA, S.Mn.	238
	H. A. JAILANI, S.P.	472
	INDAH, S.E.	151
	VIRGINIA RUFLINA SITEPU	112
	Drs. H. DARMAWAN YAKOEB, M.H.	1733
	ARIE KURNIAWAN, S.E.	575
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	5117
8	PKS	3246
	SEFTY YUSLINAH, S.Sos.	10613
	IRMAN SAWIRAN, S.E.	3029
	H. ADHAR, S.Sos.	2019
	Dr. Hj. NETTY HERAWATI, DHSM, M.Si.	12
	Drs. H. M. YUSUF MANAN, S.Pd.	797
	SYAMSUL AZWAR, S.H., M.H.	502
	Dra. LENSU PUTRI UTAMI	533
	Ir. H. WINARDI PANGGARBESSY	1125
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	21876
9	PERINDO	703
	Drs. H. ARFIANTO AMRAN	2850
	HAKMAN NOVI	858
	YUSNIAR	317
	SAMRIN, S.E., M.M.	936
	YUNI ASMA	69
	AMRI TAFSILI	72
	SUSYANTI	87
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	5892
10	PPP	626
	RIKI SUPRIADI, S.Kom	985
	DHARMA FITRA	389
	MIMI HAYATI	79
	Drs. R. ZAKWAN TEGUH	311
	ERNA SRI ANGGRAINI, S.E.	325
	YULINDA HARTATI	58
	SUSILAWATI	65
	Ir. H. SUDIRMAN SALEH, M.M.	676
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	3514
11	PSI	632
	JONI IRWAN, S.P.	535
	SEPTA HARTONO, S.Sos., M.Si	209

	SHEREN DWI OKTARIA	357
	RENDY PRIMA ADITIA SAPUTRA	419
	RENY SUKMA NINGRUM, S.Sos., M.TPd	108
	MASINTAN, S.Pd	299
	RANTO HARISANDI, S.E.	176
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	2735
12	PAN	1913
	DEMPO XLER, S.IP, M.AP	13575
	HARI SUHARSYAH, S.H.	4469
	MAMETA, S.E.	1174
	KUSWANDI, S.E.	393
	HARFA'I MURAD	343
	IFA TRIANA	347
	YULKAMRA, S.Pd.I	441
	ARIESTA DIANA, S.Sos	221
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	22876
13	HANURA	599
	USIN ABDISYAH PUTRA SEMBIRING, S.H	3913
	HERDADI WINANDA	1055
	JAMSIAR, S.Sos	422
	Drs. SUARDI BAHRUN, S.H.	1343
	INTAN OLYVIA CHANDRA, S.E.	318
	EDI HARIYANTO, S.P.	3763
	SRI HARTINI, S.E.	126
	DAVID SUARDI	1494
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	13033
14	DEMOKRAT	1537
	H. EDISON SIMBOLON, S.Sos., M.Si	12677
	KARTIKA SARI, S.Sos	873
	KADER DALIMUNTHE, S.E.	702
	SUKMAR NERY	530
	Drs. H. AMIR HAMZAH, S.H.	233
	ANA AGUSTINA	155
	Ir. RISMAN SIPAYUNG	1119
	EMPI SUSYANTI, S.E.	424
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	18250
19	PBB	321
	Drs. H. MOH. INROJI	885
	ARIF GUNAWAN, S.E.	492
	Dra. Hj. ROSWATY	122
	HERMAN	204
	INA KIRANA, S.E.	111
	H. SYAIFUL AZHAR	275

		SITI ZAINABAH	131
		Drs. H. BACHTAR MAWIDIN, S.Th.I.	108
		Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	2649
20		PKPI	85
		SUBHAN, S.P.	394
		LIDYA FINA SYAFITRI	54
		PRAMUDYA WARDHANA	53
		SUSANTI	44
		Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	630

Perengkingan Perolehan Suara DPRD Provinsi Dapil I

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA DAPIL 1
1	GOLKAR	32051
	Drs. SUMARDI, M.M.	8617
2	PAN	22876
	DEMPO XLER, S.IP, M.AP	13575
3	PKS	21876
	SEFTY YUSLINAH, S.Sos.	10613
4	NASDEM	18410
	Hj. ERNA SARI DEWI, S.E.	10434
5	DEMOKRAT	18250
	H. EDISON SIMBOLON, S.Sos., M.Si	12677
6	GERINDRA	16973
	H. Suharto, S.E	8935
7	HANURA	13033
	USIN ABDISYAH PUTRA SEMBIRING, S.H	3913
8	PKB	11603
	Suimi Fales,SH,MH	7970
9	PDIP	7658
10	PERINDO	5892
11	BEKARYA	5117
12	PPP	3514
13	PSI	2735
14	PBB	2649
15	GARUDA	893
16	PKPI	630

Tabel DC1 DPRD Provinsi Dapil II

NO	Nmanam, ANAMA	BENGKULU TENGAH	BENGKULU UTARA	TOTAL
1	Partai Kebangkitan Bangsa	643	2219	2.862
	SUROTO. SM, S.E., M.M.	696	1481	2.177
	SIPTION MUHADY, S.Ag.	569	1433	2.002
	RUSMAWATI	93	227	320
	HERMAN TANTO, S.T.	95	396	491
	NICO ARDI PUTRA, S.Kom.	232	1595	1.827
	RIZKI JUNINA SALAMAH, S.Pd.	37	110	147
	YOSIE EFRAN SISCA	19	49	68
	SALIM, S.Pd.I.	42	215	257
	JUMLAH	2426	7725	10.151
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	1367	3514	4.881
	IRWAN ERIADI, S.E., M.Si.	2325	2210	4.535
	EDI RIYANTO, S.H.I., M.H.	686	1530	2.216
	ARLINDA	204	372	576
	SYARKAWI	165	883	1.048
	GUSPA IRAWAN, S.Sos	60	261	321
	ICE TRISNAWATI	122	196	318
	JUMLAH	4929	8966	13.895
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1560	7063	8.623
	IHSAN FAJRI, S.Sos., M.M.	4667	8165	12.832
	MARLESI	1011	860	1.871
	ANDARU PRANATA, S.E.	1605	35414	37.019
	WEDIA KADIR	117	572	689
	MERRY MADAHYANA, S.IP.	120	388	508
	DELVINA TRI AGUSTIN, S.I.Kom.	150	443	593
	JUMLAH	9230	52905	62.135
4	Partai Golongan Karya	1024	3747	4.771
	Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, M.Si.	2000	12725	14.725
	RAHARJO SUDIRO, S.Sos.	2470	1613	4.083
	MALNIARTI, SE	325	1864	2.189
	SUNANDAR, S.Sos.	346	2195	2.541
	EKA SEPTO, S.H.	102	1331	1.433
	EVA ELIYANI, S.Ip.	108	802	910
	JUWITA, S.Sos.	44	371	415
	SULIYANTO, A.Ma.	46	218	264
	JUMLAH	6465	24866	31.331
5	Partai Nasdem	704	1737	2.441
	TANTAWI DALI, S.Sos., MM	776	5288	6.064

	JASIAN NADEAK	1156	3145	4.301
	NORA ASMIRNA, S.Pd	137	225	362
	IDHAM	71	473	544
	SANDI ZR PERKASA, S.H.	527	973	1.500
	RAPIKA WULANDARI	52	49	101
	SUPIT SANTRI	24	47	71
	MARWANDI, S.P.	259	146	405
	JUMLAH	3706	12083	15.789
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	159	553	712
	M. MASYIR BERMANI, S.H., M.H.	109	326	435
	PANTAS HENRI SIMATUPANG	81	270	351
	DEWI SARTIKA	54	122	176
	JUMLAH	403	1271	1.674
7	Partai Berkarya	475	1182	1.657
	SAHIB	187	420	607
	REDHO KURNIAWAN, S.Pd.I	198	906	1.104
	Dra. MARIANI IDRIS	187	183	370
	FIRDAUS THAHER	122	200	322
	GUSNI	28	61	89
	ANGGIE DANIELA	59	59	118
	KOLDIYAR, S.E.	73	31	104
	IRWAN TONI	198	1468	1.666
	JUMLAH	1527	4510	6.037
8	Partai Keadilan Sejahtera	859	1861	2.720
	H. SUJONO, S.P., M.Si.	1411	4882	6.293
	BUDI SAKTI, S.T.	2100	1172	3.272
	MUSLIMAH, A.Ma.	176	981	1.157
	SURYADI USMAN, S.P.	240	205	445
	DESI SRI RAHAYU, S.Kom.	64	106	170
	SURATNO, S.Pd.I	51	130	181
	RITA HANDAYANI, S.Sos.	57	121	178
	Drs. H. SALAMUN HM, M.Si.	208	838	1.046
	JUMLAH	5166	10296	15.462
9	Partai Persatuan Indonesia	616	1466	2.082
	H. YURMAN HAMED, S.IP.	477	6426	6.903
	MEIDI HASFERI	432	954	1.386
	FEBRIANA WATI, S.IP.	123	623	746
	NASPIAN	1184	117	1.301
	U. LUMBAN GAOL	1305	209	1.514
	RENNY RIZKI LESTARI, S.KM.	47	232	279
	SAIDAH SIAGIAN	35	116	151
	JUMLAH	4219	10143	14.362

10	Partai Persatuan Pembangunan	625	732	1.357
	M. NASIR JAHYAH	4713	782	5.495
	Drs. SYAHRUL	171	247	418
	TITIN SUMARNI, S. Ag	195	288	483
	BRIGID BORNEO	311	58	369
	M. ASROMI, S.Pd	240	47	287
	PEPI PEYOLITA	172	27	199
	LILY HUSNI	28	46	74
	SUHARJONO	59	322	381
	JUMLAH	6514	2549	9.063
11	Partai Solidaritas Indonesia	189	427	616
	MUHHARAM, S.Kom.I.	763	241	1.004
	ISWI DANA UTAMA PUTRA, S.E., M.M.	43	96	139
	YUSTINA WIDJI MIARTI	142	193	335
	ANANG WIDIATMOKO	27	316	343
	TITIK HARLIZA, S.E.	21	51	72
	ROBY SUHENDRA, S.P.	20	19	39
	LIA RETNOWATI PUTRI, Amd.Keb	30	44	74
	EKO ANUGRAHA, S.H.	21	71	92
	JUMLAH	1256	1458	2.714
12	Partai Amanat Nasional	435	1479	1.914
	RAMA EKA PUTRA	1998	2808	4.806
	Drs. SLAMET RIYADI	473	1521	1.994
	ASMITA, S.I.Kom	68	166	234
	JOFPI ANTONI, S.S	44	136	180
	SUGIONO	34	94	128
	HERMITA ANGGRAINI, S.I.Kom	49	118	167
	MARHAYANI	53	72	125
	HADISASMITA, S.H.	33	77	110
	JUMLAH	3187	6471	9.658
13	Partai Hati Nurani Rakyat	463	662	1.125
	H. RAHMAT ALI	3700	1074	4.774
	ARPAN NAWAWI	266	119	385
	DESITA ARMA BELA, S.Pd	174	296	470
	ALCHAINI	53	196	249
	HARDI WIJAYA	142	69	211
	MARLENA BELLATAMA	32	89	121
	RUDIANSAN, S.Pd	13	61	74
	ADI SUCIPTO, S.IP.	119	202	321
	JUMLAH	4962	2768	7.730
14	Partai Demokrat	464	735	1.199
	Ir. CHAIRIL GUSWENDI	261	358	619

	Dr. H. BAMBANG SUSINO, SKM., M.M.	697	2184	2.881
	HERLINA AMIR	63	130	193
	EDYARSYAH, S.Sos., M.M.	220	782	1.002
	HADI SUCIPTO	473	151	624
	LICIA MARSIANA, S.H.	408	60	468
	REISA AMELIA, S.Pd	15	0	15
	S. FARIZAL FUADI	367	36	403
	JUMLAH	2968	4436	7.404
19	Partai Bulan Bintang	390	498	888
	M. SABRI, S.Sos., M.M.	3686	401	4.087
	NURHASAN. HR	77	286	363
	BETTY YUNITA, , S.Pd.	32	97	129
	LULUS TRIYONO, S.P.	14	128	142
	RENY ARYANI	22	90	112
	Drs. BUKHARI	21	103	124
	YULI YULANDARI	188	21	209
	M. YUSUF, S.Sos.	124	33	157
	JUMLAH	4554	1657	6.211
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	133	827	960
	HERMEDI RIAN	458	5646	6.104
	FAKHARUDDIN	44	239	283
	ARIFAH HIDAYATI, S.IP.	15	46	61
	YARNES S	12	63	75
	SUSI SUSANTI, SKM.	30	388	418
	YOKE MAILIS S	5	30	35
	SAHBUDI	10	23	33
	LIA INDRIYATY, S.IP	30	139	169
	JUMLAH	737	7401	8.138

Perengkingan Perolehan Suara Dprd Provinsi Dapil II

PARTAI	PEROLEHAN SUARA DAPIL 2
PDIP	62135
ANDARU PRANATA, S.E.	37.019
IHSAN FAJRI, S.Sos., M.M.	12832
MARLESI	1871
GOLKAR	31331
Dr. Ir. H. M. IMRON ROSYADI, M.Si.	14725

NASDEM	15789
TANTAWI DALI, S.Sos., MM	6064
PKS	15462
H. SUJONO, S.P., M.Si.	6293
PERINDO	14362
H. YURMAN HAMEDI, S.IP.	6903
GERINDRA	13895
IRWAN ERIADI, S.E., M.Si.	4535
PKB	10151
PAN	9658
PPP	9063
PKPI	8138
HANURA	7730
DEMOKRAT	7404
PBB	6211
BEKARYA	6037
PSI	2714
GARUDA	1674

Perolehan Suara DPRD Provinsi Dapil III

NO	NAMA NAMA PARTAI	MUKOMUKO
1	PKB	1679
	Ir. RENJES ZAETHEDDY	4245
	KHUSAIRI	3131
	Ir. NURLINA, M.Si	1683
	SYOFIA DIANA, S.E.	599
	JUMLAH	11337
2	GERINDRA	1926
	FITRI	5412
	SUHARTO	2904
	TITIK HARYANTI, S.Pd	448
	NUR AFNI DIANA	212
	JUMLAH	10902
3	PDIP	2242
	MUJIONO, S.IP.	3419
	WINARTI, S.AP	522
	RIDHO WIJAYA, S.E.	3390
	NUR HIDAYAH, S.Kom	351
	JUMLAH	9924

4	Partai Golongan Karya	1909
	Ir. IMAN ABRAHAM SURBAKTI	4507
	DAHLINAWATI, S.H.	543
	HILDA YANI, S.Sos.	578
	H. BADRUN HASANI, S.H., M.H.	4536
	JUMLAH	12073
5	Partai Nasdem	1053
	EVI GUSNIARTI, S.E.	3766
	AZHARI	1961
	MERIDA SUSANTI, S.H., M.Si.	754
	H. PAULUS SABAR SUDIYO, S.Sos	1392
	JUMLAH	8926
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	179
	Ns. MARDHATILLAH UTAMI PUTRI, S.Kep	89
	JUMLAH	268
7	Partai Berkarya	517
	EYOTA MADIUS, S.H., M.M., M.Kn.	504
	NOVA MIA NOVITA, S.Pd	197
	JUMLAH	1218
8	Partai Keadilan Sejahtera	1204
	AHMAT SETIABUDI, S.Psi, M.Si.	2847
	AHMAD DUNER, S.Hut.	3550
	WIWID KURNIA, S.Pd.	144
	SUCIA KARTIANA, S.Psi.	176
	JUMLAH	7921
9	Partai Persatuan Indonesia	1066
	SAHARIDIN ILYAS, S.H.	2152
	RITA HARTATI	424
	HUSNI THAMRIN	193
	JUMLAH	3835
10	Partai Persatuan Pembangunan	928
	Hj. YULIA SUSANTI, S.H., M.H.	8032
	SUPARI	1188
	SRI RAHAYU NINGSIH	167
	H. SYAMSURI RUSTAM, S.T.	124
	JUMLAH	10439
11	Partai Solidaritas Indonesia	150
	ERANARDI, S.IP.	319
	ZULFA ANITA	66
	JUMLAH	535
12	Partai Amanat Nasional	793
	Drs. INZANI	2115
	ERY ZULHAYAT, S.E., M.H.	3624

	ROSLINAR	171
	ANGGRA VINI YUNITA, S.Pd	370
	JUMLAH	7073
13	Partai Hati Nurani Rakyat	380
	PRANYOTO ATENG	1140
	ARNILIATI	223
	ZALNI, S.Pd	85
	H. HERMANSYAH, S.Kom., M.Kom.	817
	JUMLAH	2645
14	Partai Demokrat	1264
	Ir. MUHARAMIN	8814
	SUPARNI	1016
	HERWIN BUDIANA, S.I.P.	165
	ROSITA	237
	JUMLAH	11496
19	Partai Bulan Bintang	115
	ZULKIFLI SARUN CHANIAGO, S.H.	172
	OKTARI PERAWANI SISTI, SKM.	25
	YUHAMI ARAS	30
	JUMLAH	342
20	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	480
	JUMLAH	480

Perengkingan Perolehan Suara Dprd Provinsi Dapil III

PARTAI	PEROLEHAN SUARA DAPIL 3
GOLKAR	12073
H. BADRUN HASANI, S.H., M.H.	4536
DEMOKRAT	11496
Ir. MUHARAMIN	8814
PKB	11337
Ir. RENJES ZAETHEDDY	4245
GERINDRA	10902
FITRI	5412
PPP	10439
PDIP	9924
NASDEM	8926
PKS	7921
PAN	7073
PERINDO	3835
HANURA	2645
BEKARYA	1218

PSI	535
PKPI	480
PBB	342
GARUDA	268

Tabel DC1 DPRD Provinsi Dapil VI

NO	URAIAN	REJANG LEBONG	LEBONG	TOTAL
1	1 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1981	704	2685
	1. M. ARBI, S.H.	4720	588	5308
	2. YESSY FITRI ARTY, S.E.	2289	2763	5052
	3. Drs. HARTONO YA'KUB, M.Hi	1397	174	1571
	4. SELAMAT	177	227	404
	5. DOSI PUTRA SETIAWAN, S.Pd	318	664	982
	6. RIZKI ARYANI PUTRI	123	51	174
	7. ROHAWIDA, S.E.	68	232	300
	8. JULI HARYANTO	382	47	429
	9. ANDIKA PUTRA	5677	88	5765
	JUMLAH	17132	5538	22670
2	2 PARTAI GERINDRA	4480	744	5224
	1. MOHD GUSTUADI, S. Sos	1836	3037	4873
	2. ENDANG FILIAN	951	621	1572
	3. ELLY FITRIANI, SP	3248	536	3784
	4. MUHAMAD SYAFIK, S.E. M.M	2539	245	2784
	5. ERWIN. S	700	1004	1704
	6. RIKA MARISA, S. Sos	525	62	587
	7. SUHARUDDIN, SH	1012	27	1039
	8. CITRA NURELIZA	135	17	152
	9. ERICO PATRIA	101	27	128
	JUMLAH	15527	6320	21847
3	3 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	3741	837	4578
	1. PUTRADO HERLIANSYAH, SH	3370	834	4204
	2. HABURSANI, S. Sos	659	777	1436
	3. PARTINEM	687	184	871
	4. BATARA YUDHA PRATAMA WIJAYA, S. Sos	1324	4121	5445
	5. H SUDIRMAN	3266	2748	6014
	6. Hj. ZURIANI	1292	142	1434
	7. USMAN, S. Pdi, SH	178	46	224

	8. ARNI KARTIKA DEWI	189	50	239
	9. RUSTAM EFFENDI	396	262	658
	JUMLAH	15102	10001	25103
4	4 PARTAI GOLKAR	3481	669	4150
	1. ANDRIAN WAHYUDI	6346	745	7091
	2. ALFIAN, S.E	1665	285	1950
	3. FITRI HERTIKA SARI, S.E	4294	341	4635
	4. Drs. DALHADI UMAR, M. Si	1210	2905	4115
	5. H RUSWAN YS, S. Sos. M. Si	3044	507	3551
	6. Dra. MARSENANY	397	63	460
	7. MEIZARA CAHYASARI, S.E	160	78	238
	8. YURIZAL, S. Sos	741	34	775
	9. UMAR BAKRI	427	52	479
	JUMLAH	21765	5679	27444
5	5 PARTAI NASDEM	1596	635	2231
	1. ZULASMI OCTARINA, S.E	3429	5491	8920
	2. H MUJIYONO ZN, SH	1095	272	1367
	3. YUNIARTI PUSPITASARI	280	173	453
	4. YONA APRIZAL	333	153	486
	5. OVAN KENDARYO, Amd	420	122	542
	6. RIKA AVRINAWATI	304	79	383
	7. WAHIDIL INSAN, S.E	82	33	115
	8. Hj. CAROLINA, S. Sos	874	279	1153
	9. AMINUDIN. S	113	27	140
	JUMLAH	8526	7264	15790
6	6 PARTAI GARUDA	529	119	648
	1. H. BUYAR Ar, S.Ag. M.M	421	81	502
	2. ARFAN EFENDI	488	75	563
	3. YUNIAR LESTIANI	68	28	96
	4. A. BADAWI	36	33	69
	5. HILDA MELLI YANTI	91	16	107
	JUMLAH	1633	352	1985
7	7 PARTAI BERKARYA	1064	302	1366
	1. Ir. NIZA NISBACH	465	170	635
	2. ERLANSI	211	84	295
	JUMLAH	1740	556	2296
8	8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	2437	330	2767
	1. H. HERIZAL AFRIANSYAH, S. Sos	5714	612	6326
	2. UNTUNG BASUKI, S.E	2784	102	2886
	3. KARIDATUL AINI, S.Pd.	1074	132	1206
	4. PADI AL PAJRI, S.Ag., M.Pd	661	410	1071
	5. ERWANTO, S.Pd	235	22	257

	6. JUMIYATI, S.Ag		407	64	471
	7. MARISA ANDRIYANI, S.E		130	32	162
	8. H. SYAMSUL YUSUF, S.H		1046	699	1745
	9. SIDIK PURNOMO		165	11	176
	JUMLAH		14653	2414	17067
9	9 PARTAI PERINDO		1997	457	2454
	1. HERI PURWANTO, S.H		5256	378	5634
	2. UJANG SAIDINAH		559	137	696
	3. AZIZAH TULBAYANI, S.Sos		317	676	993
	4. Ir. ASMADI		235	83	318
	5. KUSRI IRIANTO, S.H		317	47	364
	6. SYAHKITAWATI, S.H		261	280	541
	7. WANCE AF RAMLI, S.Sos		674	167	841
	8. SAPRIYANI, S.KM		111	26	137
	9. HARDIYAN		678	102	780
	JUMLAH		10405	2353	12758
10	10 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)		917	333	1250
	1. H. GUSTAMI, S.E		817	724	1541
	2. H. NASIRWAN, S.E		975	2112	3087
	3. SINTA YULITA POHAN		347	68	415
	4. Drs. IKHSAN H. MUSTOPA		238	56	294
	5. ERLAILI		141	105	246
	6. SURYA KELENA		130	127	257
	7. LATIFA		59	11	70
	8. RASYID REDO		608	31	639
	JUMLAH		4232	3567	7799
11	11 PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)		371	98	469
	1. RENI SARTIKA		213	472	685
	2. M. JEFFRI ARLINANDES CHANDRA, S.H, M.H		126	47	173
	3. DESON KENEDI		168	49	217
	4. YOLANDA MONICA PRATIWI		81	28	109
	5. BENNY ARISANDY		567	145	712
	JUMLAH		1526	839	2365
12	12 PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)		1073	504	1577
	1. ZACKY ANTONY, S.H., M.H		1578	446	2024
	2. NOHARLI, S.Sos		472	1847	2319
	3. ALINDRY FATMA SARI		205	87	292
	4. ELVIS BAKRI, S.Pd		318	131	449
	5. INDRA SYAFRI, S.H		574	217	791
	6. ANGGIE MUSTKA, S.E		60	43	103

	7. RIZKI PANGESTU		48	54	102
	8. DEWI PURWATI		168	77	245
	9. JUPANES KARWA		52	649	701
	JUMLAH		4548	4055	8603
13	13 PARTAI HANURA		604	250	854
	1. ARSOP DEWANA, S.E		5027	903	5930
	2. BOBI CANDRA, S.E		437	106	543
	3. MADASARI MASYITA		202	53	255
	4. YESI JULIENSHI		186	84	270
	5. FERDIAN		51	25	76
	6. DIAH FITRI UTAMAI		32	124	156
	7. FIRMANSYAH, S. Sos		535	321	856
	8. NURRACHMI PERMATA SARI, S.E		98	19	117
	9. JUANDA		1180	2958	4138
	JUMLAH		8352	4843	13195
14	14 PARTAI DEMOKRAT		2000	374	2374
	1. ZULKARNAIL THAIB, S.H		3725	538	4263
	2. SUHARDHI DS, S.H		4728	223	4951
	3. MUTIARA INDAH		330	138	468
	4. Drs. H. LUKMANUL HAKIM		977	1039	2016
	5. MASDALENA		191	27	218
	6. M. KOBRI		731	32	763
	7. HILAL ROZI		144	45	189
	8. ELMA YUNANI, S. Sos		424	23	447
	9. FERY SONNEVILLE. HB		1045	240	1285
	JUMLAH		14295	2679	16974
19	19 PARTAI BULAN BINTANG		240	161	401
	1. Drs. A. MAHFI		207	146	353
	2. Dra. Hj. WAHDANIYAH M		476	257	733
	3. ZAFERDIAN AZAMY, S.E		42	56	98
	4. SUGIARTI		30	38	68
	5. ERWAN HADI PRAYETNO, S.E		23	18	41
	6. ERWIN JORHANES		42	100	142
	JUMLAH		1060	776	1836
20	20 PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)		170	100	270
	1. RAHMA NISA, S.Pd, M,Pd		344	138	482
	2. REZIKA DELLA FRANSISKA, S.IP		58	70	128
	JUMLAH		572	308	880

PARTAI	PEROLEHAN SUARA DAPIL 4
GOLKAR	27444
ANDRIAN WAHYUDI	7091
PDIP	25103
H SUDIRMAN	6014
PKB	22670
ANDIKA PUTRA	5765
GERINDRA	21847
MOHD GUSTUADI, S. Sos	4873
PKS	17067
H. HERIZAL AFRIANSYAH, S. Sos	6326
DEMOKRAT	16974
SUHARDHI DS, S.H	4951
NASDEM	15790
ZULASMI OCTARINA, S.E	8920
HANURA	13195
ARSOP DEWANA, S.E	5930
PERINDO	12758
HERI PURWANTO, S.H	5634
PAN	8603
PPP	7799
PSI	2365
BEKARYA	2296
GARUDA	1985
PBB	1836
PKPI	880

Tabel DC1 DPRD Provinsi

Dapil V

NO	URAIAN	KEPAHIANG
1	PKB	1415
	RAMLI	4646
	ZAINAL, S.Sos., M.Si	6215

	LISTIANI YUNITA	154
	MELI SUSANTI	99
	JUMLAH SUARA SAH	12529
2	GERINDRA	1600
	ADHE JUANDA	5489
	SILVYA OKTARINA	438
	JUMLAH SUARA SAH	7527
3	PDI PERJUANGAN	1797
	EDWAR SAMSI. S.IP., M.M.	9518
	KHAIRUL ANWAR	5441
	MERI HARTATI	320
	OCY FISCA SARI, S.H.	94
	JUMLAH SUARA SAH	17170
4	GOLONGAN KARYA	1701
	RICA DENIS, S.Si., M.Si. P	6125
	LINDA EMILIA, S.Sos	624
	UJANG IRMANSYAH, S.P.	1621
	Ir. DARMAWANSYAH, M.T.	6448
	JUMLAH SUARA SAH	16519
5	NASDEM	1121
	EDI SUNANDAR	3021
	INALIA, S.TP	680
	HOLIL	4188
	JUMATUL ARIA	320
	JUMLAH SUARA SAH	9330
6	GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	261
	WINDY ANGGRAINI, S.P	383
	ROBINSAS, S	85
	JUMLAH SUARA SAH	729
7	BERKARYA	580
	JUMLAH SUARA SAH	580
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	847
	ARMIN JAYA	2085
	NIZAMUDDIN, S.P	381
	INDAH DEPIANI, S.Pd	224
	NYAYU MASHITA, S.TP.	227
	JUMLAH SUARA SAH	3764
9	PERSATUAN INDONESIA	442
	MULYADI BACHTIAR	518
	RIKA MEYLA	122
	JUMLAH SUARA SAH	1082
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	380
	AHMAD RUSDI, S.E.	533

	ISNAINI DARMINSYAH	112
	ANISAH, S.E.	63
	ROTIJA TUTI ASMARA DEWI	117
	JUMLAH SUARA SAH	1205
11	PSI	97
	TRIADE AMARULLOH, S.T.	75
	JESSY OBASTIKA, SKM.	56
	JUMLAH SUARA SAH	228
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	425
	GUSTAN HERMADY, S.E.	822
	BAHRUDDIN	145
	DESI KARIMA	72
	YUNISKA HARYANTI, Amd.Ak	66
	JUMLAH SUARA SAH	1530
13	HATI NURANI RAKYAT	274
	OKTA RENI, A.md, Keb	300
	TAUFIK	266
	SITI MUYASARI, S.E.	56
	M. SUDIRMAN	424
	JUMLAH SUARA SAH	1320
14	DEMOKRAT	753
	FIRDAUS DJAILANI	3449
	YATI PURWASI, A.Md	115
	NENI YUSTINA	90
	FAISAL TOHA	1770
	JUMLAH SUARA SAH	6177
19	PARTAI BULAN BINTANG	73
	RIZKI RAHMAT HABIBI	48
	HJ. DARMIATI	29
	JUMLAH SUARA SAH	150
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	191
	M. RIDUWAN, S.Sos	712
	MARHAN SYAFRI, S.Sos	120
	SANTI OKTARIA HUTAPEA	52
	JUMLAH SUARA SAH	1075

PERENKINGAN PEROLEHAN SUARA DPRD PROVINSI DAPIL V

PARTAI	PEROLEHAN SUARA DAPIL 5
PDIP	17170
EDWAR SAMSI. S.IP., M.M.	9518
GOLKAR	16519
Ir. DARMAWANSYAH, M.T.	6448
PKB	12529
ZAINAL, S.Sos., M.Si	6215
NASDEM	9330
HOLIL	4188
GERINDRA	7527
DEMOKRAT	6177
PKS	3764
PAN	1530
HANURA	1320
PPP	1205
PERINDO	1082
PKPI	1075
GARUDA	729
BEKARYA	580
PSI	228
PBB	150

Tabel DC1 DPRD Provinsi

Dapil VI

NO	URAIAN	BENGKULU SELATAN	KAUR	TOTAL
1	PKB	388	710	1098
	JOHARI SALIM, S.Sos	1210	5378	6588
	ITA YUNITA, A.Ma	142	365	507
	OKI SYAPUTRA JAYA	330	85	415
	HUSNAINI	49	174	223
	LIDYA NOVITA	64	71	135
	LESTARI PUJIATI	21	30	51
	JASMAN, S.E	15	20	35

	JUMLAH	2219	6833	9052
2	GERINDRA	898	701	1599
	HERWIN SUBERHANI, S.H	3291	3958	7249
	MUDARWAN YUSUF, S.H., M.H	977	5072	6049
	FRATWENTI OKTA VIANIS, S.Pd	109	82	191
	ERNESTI	192	51	243
	H. YADERA SU'ID, S.T	4063	276	4339
	ASRUL ASADI, S.Sos	604	4120	4724
	JUMLAH	10134	14260	24394
3	PDIP	1124	644	1768
	HELMI P AMAN, S.Sos	4304	1886	6190
	YEVRI SUDIANTO	6489	1444	7933
	WIDYA PANGESTIKA	243	190	433
	APEN SYAHYAR, S.T.	148	701	849
	Drs. JUSIN ISHARMAN	702	98	800
	PUTRI DITA UTAMI	58	31	89
	MARTI ANITA SARI	70	21	91
	JUMLAH	13138	5015	18153
4	GOLKAR	1100	1067	2167
	SAMSU AMANAH, S.Sos.	4912	6307	11219
	ANPERILIZAH, A.Md.	1154	401	1555
	MERIYANI, S.Ikom., M.H.	1134	180	1314
	MULYADI	641	4123	4764
	ERNA NENGSI, S.Ag.	139	121	260
	H. RIFAI, S.Sos.	5465	215	5680
	METIKASARI	44	41	85
	JUMLAH	14589	12455	27044
5	NASDEM	549	343	892
	Drs. SARJONI HANAFI	1116	3118	4234
	DENDI JOFRIANTO, S.E	1231	154	1385
	MERIANI	167	59	226
	PITI HERLISUSANTI	212	54	266
	BAMBANG KURNADI	2860	801	3661
	RAMLES DAWATI	48	43	91
	DEDY ERMANSYAH, S.E	66	25	91
	JUMLAH	6249	4597	10846
6	GARUDA	136	159	295
	PARDAMEAN SIANTURI	85	212	297
	YENSI PUSPITA SARI	56	40	96
	JUMLAH	277	411	688
7	BEKARYA	383	306	689
	Drs. NAHARUDDIN	527	301	828

	Drs. YUHARDIN	230	68	298
	ZAIBA YATI	34	24	58
	JUMLAH	1174	699	1873
8	PKS	512	285	797
	NINDYO KUSMANTO, S.Ag.	768	499	1267
	BAHIRUL ZANI, S.E.	158	250	408
	ROSMI	489	38	527
	MUHAMAD HUSNUL FIKRI, Amd.	838	286	1124
	RIKA PITRI, S.Pd.	186	35	221
	DASMIYATI	104	21	125
	Ir. DJOKO HENDRO, M.Pd.	145	176	321
	JUMLAH	3200	1590	4790
9	PERINDO	332	293	625
	MUDIANTO, S.IP.	350	3927	4277
	ERWIN AFRIANSYAH, S.Pt.	642	345	987
	FARIDAH	381	36	417
	HERMAN EFENDI, S.Sos.	111	121	232
	FITRIANA	46	38	84
	MARLIANA	31	38	69
	JOHARDI TD	26	268	294
	JUMLAH	1919	5066	6985
10	PPP	397	442	839
	Drs. GUNADI YUNIR, M.M.	5144	1262	6406
	HERLIAN MUCHRIM, S.T.	213	5250	5463
	YESI NOFITA SARI, Amd, Keb	799	149	948
	ENLYE MARIZA	123	989	1112
	ERYAN EFFENDI, S.E.	3827	2560	6387
	SATRIA NUDDIN	53	169	222
	RITA FITRIANI	19	20	39
	JUMLAH	10575	10841	21416
11	PSI	121	51	172
	MARTIAN SUGIARTO	383	52	435
	DELLA OKTARI	80	29	109
	JUMLAH	584	132	716
12	PAN	449	232	681
	PARIAL, S.H.	4660	1333	5993
	SUSDIANTO AMALANI	384	218	602
	LESMA DEPI	152	96	248
	JOKO SISWO PRAPTONO, S.E.	328	99	427
	AYU ISLAMIA	22	24	46

	SRI LESTARI	46	25	71
	CHERAL ANTONI, S.E.	799	35	834
	JUMLAH	6840	2062	8902
13	HANURA	339	143	482
	RIA OKTARINA, S.Ps	7664	656	8320
	RAHMAT NURDIANSYAH	795	101	896
	FIJAR EKA SAPUTRA	170	79	249
	DISLATUL AINI	35	767	802
	LARA NOPTRI NINGGRUM	62	26	88
	PITER RUDIS, S.E., M.M	708	16	724
	JUMLAH	9773	1788	11561
14	DEMOKRAT	499	222	721
	FAIZAL MARDIANTO, S.H.	4840	314	5154
	ACHMAD TARMIZI GUMAY, S.H., M.H.	3115	145	3260
	HERNA SPARTY, S.Pd.I	73	56	129
	TH.TAJARMAN	234	20	254
	EMILIA CONTESA	57	38	95
	NOPRIANDA WULANSARI, S.E.	43	4	47
	EDI AGUSCIK, S.T.	175	13	188
	JUMLAH	9036	812	9848
19	PBB	119	241	360
	IR. SAHLAN SIRAD	208	387	595
	RISWAN JUMADI, S.Sos.	216	94	310
	MIZI ARIANI	9	30	39
	ZALEKA, S.Pd.I.	18	30	48
	JUMLAH	570	782	1352
20	PKPI	184	263	447
	EDWAR BENNY, S.H.	2174	4687	6861
	Ir. MIKRAN JAHIDIN	315	79	394
	LIKA OKMITALIA, S.Pd	23	174	197
	M. DAILI SALIM	23	591	614
	EVI ISTI	150	20	170
	DEWI ZAUDAH	40	15	55
	PASIRIN, S.H.	581	47	628
	JUMLAH	3490	5876	9366

Perengkingan Perolehan Suara DPRD Provinsi Dapil VI

PARTAI	PEROLEHAN SUARA DAPIL 6
GOLKAR	27044
SAMSU AMANAH, S.Sos.	11219
GERINDRA	24394
HERWIN SUBERHANI, S.H	7249
PPP	21416
Drs. GUNADI YUNIR, M.M.	6406
PDIP	18153
YEVRI SUDIANTO	7933
HANURA	11561
RIA OKTARINA, S.Ps	8320
NASDEM	10846
Drs. SARJONI HANAFAI	4234
DEMOKRAT	9848
FAIZAL MARDIANTO, S.H.	5154
PKPI	9366
PKB	9052
PAN	8902
PERINDO	6985
PKS	4790
BEKARYA	1873
PBB	1352
PSI	716
GARUDA	688

Tabel DC1 DPRDProvinsiDapil VII

NO	URAIAN	SELUMA
1	PKB	982
	SHOIM	704
	ALIMIN, SE	990
	RAUDA MAHARANI PUTRI, S.M	71
	BUNGA KURNIA SUCIA, Amd	43
	JUMLAH	2790

2	GERINDRA	1976
	JONAI, SP	9837
	A. AGUNG NS. KUSUMA	2725
	SRI HARLYANTI, A.md.Keb	784
	MERI SUKARNI	229
	WARDONSONI	517
	JUMLAH	16068
3	PDIP	2409
	SRIE REZEKI, SH	11412
	Drs.H. SIMARIN, M.Pd	4417
	NINDA DWI LIYANI	468
	MARZITA PUTRA	223
	H. HAMDAN	559
	JUMLAH	19488
4	GOLKAR	1312
	SALEHAN, S.Sos	3599
	FARIDA	2650
	RADIANTO STAR, ST	589
	MEGA SULASTRI, S.Sos	4752
	H. AHMAD BAKRI, S.Ag	194
	JUMLAH	13096
5	NASDEM	992
	RUSLI YAKUB, SH,.MM	5655
	ROBBY LAYBER PAMUNGKAS, SH	614
	ALMATUL AINI	241
	TARWINDO, SE	166
	SEPTI SUSANTI	1638
	JUMLAH	9306
6	GARUDA	281
	GULTOM IRONI, S.Sos	477
	ROZALI	300
	SINDDY MIRANTI UTAMI	49
	JUMLAH	1107
7	BERKARYA	689
	Ir. H. WAHIDIN DAHLAN	501
	NIKE JUSELEA, A.Md.Keb	0
	JUMLAH	1190
8	PKS	649
	H. SISWADI, SP	1155
	FADLI AFRIANSYAH, M.Pd	206
	TIA KOMALA	168
	DESI MARLENA	580
	JUMLAH	2758

9	PERINDO	914
	Drs. GUSTIANTO	6909
	EFRIADI	271
	KARDINA ROSSINDY APRILLIA, S.KM	212
	HERLINA SYAFETRI, SP	362
	MUKSIR, S.Pd	4014
	JUMLAH	12682
10	PPP	460
	NIZON LAILI	582
	IHUANDI	258
	CHICI PRATIWI	430
	REKSANDI	504
	DESI HARMIATI	110
	JUMLAH	2344
11	PSI	148
	HAYURI GUSAPTATUR, S.P	197
	SABRINA HARDENI	46
	JUMLAH	391
12	PAN	975
	BILLY DWITRATA SUNANDI, ST	10101
	CHAI DIR MUCHTAR, S.Sos	1194
	PARIDA ELFA	374
	LASMI JAYA, S.IP	1193
	HUSNUL KHOTIMAH, SE,.MM	401
	JUMLAH	14238
13	HANURA	80
	H. MARWAN S.RAMIS	104
	MUHAR ROZI	45
	LILI HERNI	32
	SULISTINI	29
	MUKHLIS, SP	128
	JUMLAH	418
14	DEMOKRAT	898
	Drs. A. SALIM, MM	5751
	Hj. ROSNAINI ABIDIN, S.Sos	1202
	SYAFRUDIN DA, SH,.MM	4601
	TALIA. S, M,Kes	146
	SAWALUDIN SIMBOLON, S.Sos,.MM	214
	JUMLAH	12812
15	PBB	138
	MINHARSII, S.Pd	890
	A. RAHMAN	163
	RUSNAINI	171

	IIS SOLIHAT	20
	BAIZAR AMRULLAH, SH.I	71
	JUMLAH	1453
16	PKPI	366
	DAMERIA R SIPAYUNG, SH	0
	JUMLAH	366

PERENKINGAN PEROLEHAN SUARA DPRD PROVINSI DAPIL VII

PARTAI	PEROLEHAN SUARA DAPIL 7
PDIP	19488
SRIE REZEKI, SH	11412
GERINDRA	16068
JONAI, SP	9837
PAN	14238
BILLY DWITRATA SUNANDI, ST	10101
GOLKAR	13096
MEGA SULASTRI, S.Sos	4752
DEMOKRAT	12812
Drs. A. SALIM, MM	5751
PERINDO	12682
NASDEM	9306
PKB	2790
PKS	2758
PPP	2344
PBB	1453
BEKARYA	1190
GARUDA	1107
HANURA	418
PSI	391
PKPI	366

3. Hasil-hasil pengawasan

a. Temuan

Terdapat beberapa temuan di TPS yang berpotensi melakukan pemungutan suara ulang pada saat pemungutan dan perhitungan suara Pemilu tahun 2019 di Bawaslu Kabupaten/ Kota dan terdapat penyelenggara KPPS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. **(Data Terlampir didalam DIM)**

b. Rekomendasi

Telah dilakukan rekomendasi Perhitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang ditemukan adanya potensi Perhitungan dan Pemungutan Suara ulang. Untuk penyelenggara yang diduga melanggar Kode Etik maka Bawaslu Provinsi Bengkulu merekomendasikan untuk memproses penyelenggara yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik tersebut.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Dilakukan Perhitungan suara ulang dan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS yang diduga berpotensi dilakukannya perhitungan dan Pemungutan suara ulang. Untuk penyelenggara yang diduga melakukan pelanggaran maka di buat Form Model A dan di tindak lanjuti.

4. Dinamika dan Permasalahan

Potensi Masalah Di Pungut Hitung Dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara

- a. Banyaknya jumlah KPPS yang baru dan penambahan jumlah TPS menyebabkan kpps belum bisa bekerja maksimal
- b. Sdm yang belum siap dengan sistem pemilu yang baru
- c. Masa kerja yang singkat sehingga tidak maksimalnya pelatihan untuk anggota kpps
- d. Dana untuk pelatihan kpps dan ptps sangat minim

- e. Usia dan pengetahuan untuk penyelenggara tingkat kpps yang harus di evaluasi berdasarkan sisitem pemilu yang baru
- f. Lemahnya pemahaman terkait regulasi sehingga menyebabkan psu
- g. Rekrutmen sdm yang berkualitas
- h. Disiapkan alat bantu untuk rekapitulasi secara komputer/tidak manual sehingga tidak terjadi salah hitung
- i. Perbanyak kegiatan sosialisasi bagi penyelenggara pemilu
- j. Buku pegangan yang singkat dan jelas
- k. Menguasai wilayah tps
- l. Memahami kriteria tps rawan/tidaknya tps tersebut
- m. Memahami kriteria timbulnya pemungutan suara ulang (psu)
- n. Memastikan dokumen foto c plano benar-benar diterima dan diarsipkan oleh staf kecamatan dan staf kabupaten/kota

Persoalan dalam Pengawasan Tahapan Pemungutan dan perhitungan Suara Pemilu 2019 terdapat perhitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang yang terjadi di beberapa TPS di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu. Berikut Rincian PSU Se-Provinsi Bengkulu :

- a. Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan dengan alasan terdapat 6 orang pemilih pengguna KTP elektronik, tetapi bukan berdomisili di Provinsi Bengkulu yang tidak terdaftar di DPT dan DPTB namun, diberikan surat suara dan telah melakukan pencoblosan di Kota Bengkulu Kecamatan. Muara Bangka Hulu Kelurahan. Rawa Makmur Permai No. TPS 15 .
- b. Terdapat 15 Pemilih menggunakan foto copy KTP dan alamatnya berada diluar provinsi Bengkulu dan tidak menunjukkan KTP asli di Kabupaten Mukomuko, Kecamatan Penarik, Keluran Penarik TPS 1.
- c. Terdapat di TPS 2,3 dan 4 di Kabupaten Kepahiang Kecamatan. Kepahiang Keluran. Kampung Bogor. dimana Di TPS 02 terdapat 1 orang pemilih penggunaan E-KTP tapi bukan berdomisili di desa Kampung Bogor, tidak terdaftar di DPT dan DPTB, namun diberikan

surat suara dan telah melakukan pencoblosan. TPS 03 terdapat 2 orang pemilih penggunaan E-KTP tapi bukan berdomisili di desa Kampung Bogor tidak terdaftar di DPT dan DPTB, namun diberikan surat suara dan telah melakukan pencoblosan. TPS 04 ada 5 orang pemilih pengguna E-KTP tapi bukan berdomisili di desa Kampung Bogor tidak terdaftar di DPT dan DPTB, namun diberikan surat suara dan telah melakukan pencoblosan.

- d. terdapat dua (2) TPS yang di rekomendasikan untuk dilakukan PSU yaitu TPS 1 dan TPS 2. Di TPS 01 terdapat 6 orang pemilih pengguna E-KTP tapi Bukan berdomisili di desa Tanjung Kemuning III Dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB, namun diberikan Surat Suara dan telah melakukan Pencoblosan, tanpa memiliki Formulir A5. Pada TPS 02 terdapat 2 orang pemilih tetapi tidak terdaftar di DPT dan DPTB serta bukan berdomisili di desa Tanjung Kemuning III tetapi tetap melakukan pencoblosan tanpa Memiliki Formulir A5 di Kabupaten Kaur, Kecamatan. Tanjung Kemuning Kelurahan. Tanjung Kemuning III.
- e. Di Kabupaten Seluma, Kecamatan Seluma Utara. Desa Sekalak. Terdapat di TPS 1 dan 2 dimana ditemukan Pemilih DPK tetapi tidak sesuai dengan domisili di E- KTP yang terdapat di TPS tersebut.

Rincian Perhitungan Suara Ulang yang terjadi di TPS Se-Provinsi Bengkulu dengan rincian sebagai berikut

- **Kabupaten Kaur**

No	Hari/ tanggal Penghitungan Ulang (PU)	Kab/ Kota	Kecam atan	Kelurahan / Desa	No TPS	Total TPS	Alasan Penghitungan Ulang (PU)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Senin, 22 April 2019	kaur	tetap	Padang binjay	1	2	tidak cocoknya jumlah suara sah dan tidak sah terhadap perolehan suara partai politik dan calon.
2	Senin, 22 April 2020	kaur	tetap	tanjung bunga	2	2	tidak cocoknya jumlah perolehan suara partai politik

							beserta calon dg jumlah suara sah dan tidak sah
3	Senin, 22 April 2021	kaur	tetap	Cucupan	1	1	ketidak cocokan data pemilih suara sah dan tidak sah. terhadap perolehan suara sah calon dan partay politik.
4	Kamis, 18 April 2019	Kaur	Maje	Tanjung Beringin	2	1	Bahwasannnya pada saat Penjumlahan Rekapitulasi penghitungan Perolehan
							Suara terjadi kelebihan Jumlah Suara dari pemilih yang memilih di TPS tersebut.
5	Selasa, 23 April 2019	Kaur	Tj Kemuning	TJ Kemuning III	1 dan 2	2	KTP Pemilih dari Luar Kecamatan dan Kabupaten Lain dan tidak memiliki A5
6	Selasa, 23 April 2019	Kaur	Tj Kemuning	TJ Kemuning I	1	1	selisih jumlah penghitungan surat suara
7	Rabu, 24 April 2019	Kaur	Tj Kemuning	Tj IMAN 1	1	1	Keberatan Saksi, ketidak cocokan jumlah suara Partai Golkar
8	Rabu, 24 April 2019	KAUR	PADANG GUCI HILIR	Gunung Kaya	2	2	1. Sisa surat suara tidak di silang oleh ketua KPPS
							2. Rekap suara yang sah tidak sama dengan perolehan calon dan partai politik berdasarkan data Saksi dan Pengawas
9	Selasa, 23 April 2019	Kaur	Kaur Utara	Guru Agung II	2	1	Surat Suara sah DPR RI Tidak Sinkron dengan jumlah surat suara yang digunakan
10	Senin, 22 April 2019	Kaur	Kinal	Gedung Wani	1	1	C1 Hologram tidak ditulis huruf penjumlahan
11	Rabu, 24 April 2019	Kaur	Kinal	Tanjung Baru	1	2	C1 Hologram tidak sama dengan panwas, PPK dan saksi

12	Rabu, 24 April 2019	Kaur	Kinal	Jawi	1	2	C1 Hologram A. Data Pemilih (DPT,DPTb dan DPK) B. Pengguna Hak Pilih (DPT,DPTB dan DPK) tidak di isi penjumlahan
13	Rabu, 24 April 2019	Kaur	Kinal	Jawi	2	2	C1 Hologram A. Data Pemilih (DPT,DPTB dan DPK) B. Pengguna Hak Pilih (DPT,DPTB dan DPK) tidak di isi penjumlahan
14	Sabtu, 20 April 1019	KAUR	LUNGKANG KULE	LAWANG AGUNG	02	2	Jumlah Suara syah DPRD Provinsi di C1 hologram tidak sinkron dengan jumlah surat suara di C1 salinan
15	Minggu, 21 April 1019	KAUR	LUNGKANG KULE	TANJUNG BUNIAN	02	2	Surat Suara tidak syah DPRD Provinsi tidak sinkron dengan jumlah surat suara di C1 hologram
TOTAL							24

C. KABUPATEN BENGKULU SELATAN

No	Hari/ tanggal Penghitungan Ulang (PU)	Kab/ Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	No TPS	Total TPS	Alasan Penghitungan Ulang (PU)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Minggu,21-04-2019	Kota Bengkulu	Gading Cempaka	Padang Harapan	1	1	Perhitungan Ulang Surat Suara DPR RI karena suara caleg dihitung dan dimasukkan juga kedalam suara partai,PU ini dimulai pada pukul 23.00 wib

2	senin, 22-04-2019	Kota Bengkulu	Gading Cempaka	Cempaka Permai	4	1	Perhitungan ulang surat suara DPR RI terjadi karena jumlah C1 Hologram tidak sama dengan C1 salinan yang punya saksi dan C1 plano.
3	selasa 23-04-2019	Kota Bengkulu	Gading Cempaka	Cempaka Permai	14	1	Perhitungan ulang kotak suara DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kota /Kab karena suara caleg di hitung dan dimasukan ke suara partai, PU ini di mulai pada pukul 22.00 wib
4	Senin, 22 April 2019	Kota Bengkulu	Muara Bangkahulu	Kandang Limun	5	1	Perhitungan Suara Ulang untuk Kotak DPR RI, dikarenakan ada kesalahan dari KPPS dimana jumlah suara sah melebihi jumlah Hak Pilih, KPPS ketika melakukan perhitungan suara caleg di hitung juga ke dalam suara partai, sehinggaterjadi penumpukan di suara partai yang menghasilkan lebihnya suara sah dibandingkan jumlah hak pilih, terjadi kesalahan hitung juga ada pada DPRD Povinsi dan DPRD Kota, namun setelah mengetahui dari sample kotak DPR RI, maka untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kota tanpa harus dilakukan Perhitungan Ulang, cukup dengan menggunakan rumus saja.

5	Sabtu, 20 April 2019	Bengkulu	Ratu Agung	Lempuing	4	1	Terjadi kesalahan penghitungan suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota, karena setiap hasil perolehan suara caleg dihitung juga menjadi suara partai yang menyebabkan hasil perolehan suara menjadi membengkak
6	Sabtu, 20 April 2019	Bengkulu	Ratu Agung	Nusa Indah	2	1	Terjadi kesalahan penghitungan suara DPR RI, karena setiap hasil perolehan suara caleg dihitung juga menjadi suara partai yang menyebabkan hasil perolehan suara menjadi membengkak
7	Rabu, 24 April 2019	BENGKUL U	Ratu Agung	Sawah Lebar	2	1	Tidak sesuai antara jumlah data pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, jumlah suara sah dan tidak sah di C1 maupun di C1 Plano sehingga dilakukan penghitungan ulang
Total							7

• Kabupaten Bengkulu Utara

No	Hari/tanggal Penghitungan Ulang (PU)	Kab/ Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	No TPS	Total TPS	Alasan Penghitungan Ulang (PU)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Minggu, 21 April 2019	Bengkulu Utara	Air Padang	Suka Rami	1	1	keberatan dari saksi parpol di karenakan jumlah suara sah di tps 1 Desa sukarami kecamatan Air Padang untuk suara DPR,DPRD PROVINSI dan DPRD kabupaten melebihi jumlah pemilihan yang ada.jadi para saksi partai menyampaikan keberatan dan meminta untuk melakukan penghitungan ulang.
2	Kamis, 25 April 2019	Bengkulu Utara	Arga Makmur	Gunung Agung	2	1	Ditemukannya rekapitulasi untuk suara sah dan tidak sah DPR RI tidak sinkron antara arsip C1, C1 Hologram, Salinan C1 Saksi, Salinan C1 Panwaslu dan C1 Plano. Saksi mengajukan keberatan untuk melakukan penghitungan ulang.
3	Sabtu,20 April 2019	Bengkulu Utara	Air Napal	Tepi Laut	2	1	surat suara DPR RI adanya perbedaan data antara jumlah data sah dan tidak sah dengan seluruh data surat suara yang memiliki selisi satu dari total surat suara keseluruhan.
4	Minggu,21 April 2019	Bengkulu Utara	Air Napal	Pasar Tebat	1	1	surat suara DPRD Provinsi adanya perbedaan data jumlah surat suara sah pada C1 plano dan C1 Hologram partai PDIP.
5	Senin,22 April 2019	Bengkulu Utara	Air Napal	Tebing Kandang	2	1	surat suara DPRD Kabupaten adanya perbedaan total jumlah surat suara Caleg no urut 2 pada C1 plano dan C1 Hologram partai Golkar
6	Minggu, 21 April 2019	Bengkulu Utara	Batiknau	Durian Amparan	4	1	Perbedaan hasil jumlah surat suara sah dan tidak sah antara C1 Hologram dan salinan dengan jumlah statistik perolehan suara calon. Hasil perolehan suara dan jumlah seluruh suara sah berbeda 2 suara
7	Senin, 22 April 2019	Bengkulu Utara	Batiknau	Ulak Tanding	2	1	Suara sah DPR RI berbeda antara hitungan statistic dengan C1 Hologram dan salinan. Terdapat suara sah DPR RI yang tidak tertulis di dalam C1 Hologram dan salinan.

8	Senin, 22 April 2019	Bengkulu Utara	Air Besi	Lubuk Balam	2	1	Karena terdapat bekas penghapus yang menggunakan Tipe-x pada C1 Plano, sehingga menimbulkan kecurigaan dari para saksi.
TOTAL							8

• **KABUPATEN LEBONG**

No	Hari/tanggal Peng hitungan Ulang(PU)	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	No TPS	Total TPS	Alasan Penghitungan Ulang (PU)
1	Kamis/ 25 April 2019	LEBONG	LEBONG UTARA	DESA TUNGGANG	5	1	Karena ada kelebihan suara di TPS 05 Desa Tunggang dari salinan C1 yang diterima panwaslu dan saksi ada selisih 2 suara, ketika di sinkronkan dengan C1 Hologram dan C1 Plano juga belum sinkron, lalu saksi meminta untuk melakukan penghitungan surat suara ulang untuk pemilihan DPRD provinsi, setelah itu barulah ditemukan surat suara tidak sah yang masuk kedalam sampul surat suara sah.
2	Selasa/ 23 April 2019		PELABAI	DESA TIK TELEU	1	1	Hitung ulang untuk pemilihan DPR RI dikarenakan jumlah suara Sah + Tidak Sah yang ada di C-Plano, C1-Hologram dan salinan C1 Panwaslu serta saksi tidak Valid / tidak Sama dengan Jumlah pengguna hak pilih dan pengguna hak surat suara, dari hasil penghitungan ulang tersebut dari jumlah suara tidak sah dengan jumlah 53 suara ternyata hasil yang ditemukan hanya 51.
3	Rabu/ 24 April 2019		PELABAI	SUKAU DATANG	1	1	Hitung Ulang untuk pemilihan DPRD Provinsi dikarenakan jumlah suara sah + tidak sah yang ada di C-Plano, C1-hologram dan salinan C1 Panwaslu serta saksi tidak Valid / tidak Sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan pengguna hak surat suara. dengan jumlah suara sah dari seluruh Partai dan Calon 160 dan suara tidak

								<p>sah 48 sedangkan Pemilih hanya 206, dari hasil penghitungan ulang surat suara tersebut ditemukan jumlah suara sah dari Partai NASDEM jumlah suara sah Partai yang sebelumnya 2 menjadi Tiga, sedangkan calon nomor urut 1 dari Partai yang sama yang sebelumnya memperoleh hasil suara sah yang sebelumnya 10 menjadi 9, dan dari Partai Solidaritas Indonesia calon nomor urut 5 yang sebelumnya memperoleh suara sah 2 ternyata Nol (0).</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

• **KABUPATEN SELUMA**

No	Hari/ tanggal Peng hitungan Ulang (PU)	Kab/ Kota	Keca matan	Kelu rahan/ Desa	No TPS	Total TPS	Alasan Penghitungan Ulang (PU)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Minggu, 21 April 2019	Seluma	Lubuk Sandi	Talang Kebun	2	1	<p>Dikarnakan adanya ketidak sinkronan antara C1 salinan dan C1 Hologram yang akhirnya diputuskan unruk membuka C1 Plano, setelah dibuka ternyata ada kesalahan pada salah C1 salinan. Dan permasalahan timbul pada surat suara yang tidak sah terdapat ketidak sinkronan pennghitungan pada C1 Plano yang mengakibatkan mengelembung 1 suara. akhirnya Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk menghitung kembali surat suara tidak sah.</p>

2	Kamis, 25 April 2018	Seluma	Lubuk Sandi	Padang Capo Ilir	1	1	Dikarnakan adanya kesalahan penulisan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Laki-laki, yaitu pada C1 Salinan dan C1 Plano berjumlah 77 orang setelah dilakukan pengecekan pada C7 (daftar hadir)
							ternyata pemilih laki-laki berjumlah 78 orang. Dikarnakan perbedaan tersebut berakibat pada jumlah Surat Suara yang digunakan yang berpengaruh pada perolehan jumlah suara. Maka Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk menghitung kembali Surat Suara.

• **KABUPATEN MUKOMUKO**

No	Hari/ tanggal Penghitungan Ulang (PU)	Kab/ Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	No TPS	Total TPS	Alasan Penghitungan Ulang (PU)	PERBEDAAN PEROLEHAN HASIL SUARA	
								SALINAN C1	CI PLANO
1	Minggu, 21 April 2019	MUKOMUKO	KOTA MUKOMUKO	Tanah Harapan	3	1	Terjadi kesalahan penulisan dijumlah pengguna hak pilih DPTb yang tertulis laki-laki 2 dan perempuan 1, yang seharusnya laki-laki 0 perempuan 0. Telah diperbaiki, dengan membuat/ mengisi kejadian khusus Form DA.2-KPU yang diparaf oleh Ketua PPS dan disaksikan oleh Saksi. Untuk surat suara DPR RI terdapat perbedaan penjumlahan pada suara sah tertulis 134 yang seharusnya 136. Ada kemungkinan berkurang di surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru coblos, atau penjumlahan surat suara yang tidak sah atau	136	134

					<p>jumlah surat suara yang digunakan. Panwaslu Kecamatan Kota Mukomuko merekomendasikan untuk membuka C1 Plano DPR RI setelah membuka C1 Plano masih ditemukan ketidaksesuaian jumlah seperti diatas. Panwascam merekomendasi buka surat suara tidak sah setelah surat suara tidak sah dibuka jumlah masih tetap 54 sama seperti yang tertulis dalam C1 Plano, kemudian Panwascam merekomendasikan untuk membuka surat suara yang tidak terpakai setelah dibuka jumlah sama seperti yang tertulis dalam C1 Plano. Kemudian Panwascam merekomendasikan membuka daftar hadir (C.7) DPT berjumlah 180 dan DPK berjumlah 9 tetapi yang hadir 8 jadi total 188 sesuai dengan C1 Plano. Sehubungan titik permasalahan belum ditemukan akhirnya Panwascam merekomendasikan hitung ulang, didalam surat suara sah terdapat 2 surat suara yang tidak sah dikarenakan surat suara tersebut tidak ditanda tangani oleh Ketua KPSS. setelah dilakukan hitung ulang akhirnya statistiknya ketemu, surat sah sebanyak 132 dan surat tidak sah sebanyak 56 jadi jumlah keseluruhan sebanyak 188.</p>		
					<p>Terjadi perbedaan antara jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 183 sedangkan jumlah pengguna hak pilih 188 tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan, Panwaslu Kecamatan Kota Mukomuko merekomendasi PPK untuk membuka C1 Plano, menghitung surat suara tidak sah, menghitung jumlah suara sah dan menghitung ulang seluruh surat suara sah. Dalam proses penghitungan ulang ditemukan 5 surat suara yang sah yg tidak ditanda tangani oleh ketua KPSS dan dinyatakan surat suara tersebut tidak sah. Sehingga dalam penghitungan ulang jumlah keseluruhan menjadi valid. dengan hasil suara sah 170 dan suarah tidak sah 18</p>	183	183

							jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 188 Diperbaiki diparaf oleh Ketua PPS dan saksi masalah selesai.		
2	Jum'at, 26 April 2019			KEL.KO TO JAYA	4	1	<p>Terjadi kesalahan hasil penjumlahan suara sah, suara tidak sah dan suara tidak terpakai tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima, Panwaslu Kecamatan Kota Mukomuko merekomendasikan untuk membuka C1 Plano, suara tidak sah, C7 Daftar hadir, suara tidak terpakai, suara sah dan menghitung ulang seluruh surat suara. Dalam proses penghitungan ulang ditemukan 3 surat suara yang sah tetapi tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS maka dinyatakan surat suara tersebut tidak sah. Hasil akhir penghitungan jumlah suara yang diterima 220, dengan rincian surat suara sah 186, surat suara tidak sah 28 serta surat suara yang tidak terpakai/digunakan sebanyak 6. Perubahan akibat suara suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS sebagai berikut: Nomor Urut 27 a.n. Dra Eni Hairani, M.Si 18 menjadi 17 dan Nomor Urut 29 a.n. DR. Ir. Hermen Malik, Msc 86 menjadi 84. C1 Hologram dan C1 Plano diperbaiki dan diparaf oleh Ketua PPS dan saksi.</p>	214	214
							<p>Terjadi perbedaan penjumlahan surat suara sah, C1 Hologram dan C1 salinan yang berjumlah 198 sedangkan penjumlahan manual berjumlah 200, Panwaslu Kecamatan Kota Mukomuko merekomendasikan membuka C1 Plano setelah C1 Plano dibuka hasilnya pun sama berjumlah 198 dan hasilnya pun belum diketahui. Proses berlanjut dengan menghitung jumlah surat suara tidak digunakan berjumlah 8, surat suara tidak sah berjumlah 9 dan surat suara sah 198 jadi jumlah keseluruhan berjumlah 215, dalam proses penghitungan surat suara sah terdapat 1 surat suara yang tidak ditanda tangani oleh ketua KPPS. Hasil nya pun belum</p>	198	198

						diketahui dan proses dilanjutkan dengan penghitungan surat suara ulang yang meliputi suara sah, suara tidak sah, suara yang dikembalikan dan suara yang tidak digunakan dapat disimpulkan menjadi: Jumlah surat suara yang diterima berjumlah 215, surat suara yang dikembalikan berjumlah 1, surat suara yang tidak terpakai 8, surat suara yang digunakan berjumlah 206, surat suara sah berjumlah 197 dan surat suara tidak sah berjumlah 9. Jumlah surat suara sah ditambah dengan jumlah surat suara tidak sah berjumlah 206. C1 Plano dan C1 Hologram diperbaiki dan diparaf oleh Ketua PPS dan saksi masalah selesai.		
3	senin/ 22-04- 2019	XIV KOYO	RAWA BANGU N	2	1	penjumlahan tidak sesuai pada perolehan suara DPD no urut 30	13	14
						penjumlahan tidak sesuai pada perolehan suara DPD no urut 31	44	43
						perolehan suara sah caleg paratai golkar no.urut 1 tertulis 1 seharusnya 0	21	22
4	minggu/ 21-04- 2019	XIV KOYO	TANJU NG MULYA	5	1	mengitung jumlah kertas suara sah dan tidak sah		
						selisih 1 suara pada caleg partai PAN a/N Dewi coryati. Sebelumnya suara dewi coryati sebanyak 4 suara, Setelah di hitung ulang menjadi 5 suara.	4	5
						untuk mencari selisih suara dimna C1 salinan hologram jumlah suara sah 241 tedapat selisih 11 suara yg seharusnya 230	241	230
5		SELAGAN RAYA	SUNGA I PUH DUA	3	1	Pada CI DPR RI TPS 3 jumlah suara sah yg seharusnya 112 tertulis 111 dan suara tidak sah tertulis 54, jumlah suara sah dan tidak sah tertulis 165 sesuai dengan jumlah surat suara yg di gunakan. atas rekomendasi panwascam selagan raya maka kotak suara DPR RI di bukak dan di hitung ulang, dan setelah di hitung ulang ternyata jumlah suara sah sebanyak 112 dan tidak sah 53.		

6	Minggu, 21 April 2019		TERAS TERUNJAM	Setia Budi	1	1	Jumlah Susu sah kurang 1 DPR dari jumlah Susu sah 140	140	140	
7	Minggu, 21 April 2019			Pondok Kopi	3	1	kesalahan hitung dan pemisahan Susu rusak dan susu tidak terpakai	29	30	
8	Selasa 22 April 2019		IPUH	SIBAK		2	1	Tidak sinkron jumlah surat suara sah dan tidak sah, direkomendasikan menghitung surat suara sah	tidak meru bah hasil suara	tidak merub ah hasil suara
				MEDAN JAYA		1,2	2	Tidak sinkron jumlah surat suara sah dan tidak sah, direkomendasikan menghitung surat suara tidak sah	tidak meru bah hasil suara	tidak merub ah hasil suara
				PULAI PAYUNG		2	1	Tidak sinkron jumlah surat suara sah dan tidak sah, direkomendasikan menghitung surat suara sah	tidak meru bah hasil suara	tidak merub ah hasil suara
				PULAU BARU		2	1	Tidak sinkron data Pemilih dan Pengguna hak Pilih dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, direkomendasikan menghitung surat suara tidak sah	tidak meru bah hasil suara	tidak merub ah hasil suara
				TANJUN G HARAPAN		2	1	Tidak sinkron jumlah surat suara sah dan tidak sah, direkomendasikan menghitung surat suara tidak sah	tidak meru bah hasil suara	tidak merub ah hasil suara
				RETAK ILIR		2	1	Tidak sinkron jumlah surat suara sah dan tidak sah, direkomendasikan menghitung surat suara tidak sah	tidak meru bah hasil suara	tidak merub ah hasil suara
				LUBUK TALANG		1	1	Tidak Ditemukan C1 Plano Partai,HANURA, BULAN BINTANG,DEMOKRAT,PKPI	Tidak ada perb edaan	tidak ada perbed aan

9	RABU / 24 APRIL 2019	PONDOK SUGUH	AIR BIKUK	1	1	Terdapat kekeliruan Penjumlahan Suara dan Tidak sah Parpol dan Calon untuk pemilihan DPRD Kab/Kota dari Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK tetapi dalam salinan C1 dan C1 Plano Total sama	169	169
10	MINGGU / 21 APRIL 2019		AIR BERAU	3	1	Tidak sinkron Hasil Perolehan Suara dan Tidak sah untuk Parpol dan Calon dalam salinan C1 KPPS Desa Air Berau Untuk Pemilihan DPRD Kab/Kota dari Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK tetapi Total Pada salinan c1 dan C1 Plano sama	139	139
11	SABTU / 20 APRIL 2019		POND OK SUGUH	3	1	Terdapat selisih 1 Jumlah Suara dan Tidak sah Untuk Pemilihan DPRD Prov dari Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK	168	169
12	SELASA / 23 APRIL 2019		TUNGG ANG	6	1	Terjadi kekeliruan Penjumlahan dari pengguna Hak Pilih dalam DPK dan Kesalahan Penulisan Suara Sah Pada Parpol GARUDA untuk jumlah Total pada salinan c1 dan C1 Plano sama	261	261
13	RABU / 24 APRIL 2019		AIR HITAM	4	1	Terjadi Kesalahan dalam Penjumlahan Suara Sah dan Tidak Sah untuk Pemilihan DPRD Provinsi dari Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK Tetapi dalam Salinan C1 dan C1 Plano Jumlah total sama 228	228	228
14	SENIN / 22 APRIL 2019		SINAR LAUT	2	1	Terdapat Kekeliruan penjumlahan Suara Tidak Sah dalam salinan c1 dengan C1 Plano pada pemilihan DPR RI untuk pemilih yang menggunakan Hak pilihnya dalam DPT, DPTb dan DPK tetapi Jumlah Total sama	177	177
TOTAL							21	

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

- a. Rekrutmen SDM yang berkualitas
- b. Disiapkan alat bantu untuk rekapitulasi secara komputer/tidak manual sehingga tidak terjadi salah hitung

- c. Perbanyak kegiatan sosialisasi bagi penyelenggara pemilu
- d. Buku pegangan yang singkat dan jelas
- e. Menguasai wilayah TPS
- f. Memahami kriteria tps rawan/tidaknya tps tersebut
- g. Memahami kriteria timbulnya pemungutan suara ulang (psu)
- h. Memastikan dokumen foto C Plano benar-benar diterima dan diarsipkan oleh staf kecamatan dan staf kabupaten/kota
- i. Mengecek dan memastikan keseluruhan rekap C1 sebelum diserahkan
- j. Memastikan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih
- k. Memahami kriteria perhitungan suara ulang
- l. Memastikan pergerakan C1 ke DA1
- m. Memastikan pergerakan surat suara yang tidak sah dari C1 ke DA1
- n. Memastikan ba adanya keberatan atau kejadian khusus pada C2 dan DA2

Tabel 28. Penghitungan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Kaur

No	Hari/ tanggal Penghitungan Ulang (PU)	Kab/ Kota	Kec	Kelurahan / Desa	No TPS	Total TPS	Alasan Penghitungan Ulang (PU)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Senin, 22 April 2019	kaur	tetap	Padang binjay	1	2	tidak cocoknya jumlah suara sah dan tidak sah terhadap perolehan suara partai politik dan calon.
2	Senin, 22 April 2020	kaur	tetap	tanjung bunga	2	2	tidak cocoknya jumlah perolehan suara partai politik beserta calon dg jumlah suara sah dan tidak sah

3	Senin, 22 April 2021	kaur	tetap	Cucupan	1	1	ketidak cocokan data pemilih suara sah dan tidak sah. terhadap perolehan suara sah calon dan partay politik.
4	Kamis, 18 April 2019	Kaur	Maje	Tanjung Beringin	2	1	Bahwasannya pada saat Penjumlahan Rekapitulasi penghitungan Perolehan
							Suara terjadi kelebihan Jumlah Suara dari pemilih yang memilih di TPS tersebut.
5	Selasa, 23 April 2019	Kaur	Tj Kemuning	TJ Kemuning III	1 dan 2	2	KTP Pemilih dari Luar Kecamatan dan Kabupaten Lain dan tidak memiliki A5
6	Selasa, 23 April 2019	Kaur	Tj Kemuning	TJ Kemuning I	1	1	selisih jumlah penghitungan surat suara
7	Rabu, 24 April 2019	Kaur	Tj Kemuning	Tj IMAN 1	1	1	Keberatan Saksi, ketidak cocokan jumlah suara Partai Golkar
8	Rabu, 24 April 2019	KAUR	PADANG GUCI HILIR	Gunung Kaya	2	2	1. Sisa surat suara tidak di silang oleh ketua KPPS
							2. Rekap suara yang sah tidak sama dengan perolehan calon dan partai politik berdasarkan data Saksi dan Pengawas
9	Selasa, 23 April 2019	Kaur	Kaur Utara	Guru Agung II	2	1	Surat Suara sah DPR RI Tidak Sinkron dengan jumlah surat suara yang digunakan

10	Senin, 22 April 2019	Kaur	Kinal	Gedung Wani	1	1	C1 Hologram tidak ditulis huruf penjumlahan
11	Rabu, 24 April 2019	Kaur	Kinal	Tanjung Baru	1	2	C1 Hologram tidak sama dengan panwas, PPK dan saksi
12	Rabu, 24 April 2019	Kaur	Kinal	Jawi	1	2	C1 Hologram A. Data Pemilih (DPT,DPTb dan DPK) B. Pengguna Hak Pilih (DPT,DPTB dan DPK) tidak di isi penjumlahan
13	Rabu, 24 April 2019	Kaur	Kinal	Jawi	2	2	C1 Hologram A. Data Pemilih (DPT,DPTB dan DPK) B. Pengguna Hak Pilih (DPT,DPTB dan DPK) tidak di isi penjumlahan
14	Sabtu, 20 April 2019	KAUR	LUNGKANG KULE	LAWANG AGUNG	02	2	Jumlah Suara syah DPRD Provinsi di C1 hologram tidak sinkron dengan jumlah surat suara di C1 salinan
15	Minggu, 21 April 2019	KAUR	LUNGKANG KULE	TANJUNG BUNIAN	02	2	Surat Suara tidak syah DPRD Provinsi tidak sinkron dengan jumlah surat suara di C1 hologram
TOTAL							24

Tabel 29. Penghitungan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Hari/ tanggal Penghitungan Ulang (PU)	Kab/ Kota	Keca matan	Kelurahan/ Desa	No TPS	Total TPS	Alasan Penghitungan Ulang (PU)
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Minggu,21-04-2019	Kota Bengkulu	Gading Cempaka	Padang Harapan	1	1	Perhitungan Ulang Surat Suara DPR RI karena suara caleg dihitung dan dimasukan juga kedalam suara partai,PU ini dimulai pada pukul 23.00 wib
2	senin, 22-04-2019	Kota Bengkulu	Gading Cempaka	Cempaka Permai	4	1	Perhitungan ulang surat suara DPR RI terjadi karena jumlah C1 Hologram tidak sama dengan C1 salinan yang punya saksi dan C1 plano.
3	selasa 23-04-2019	Kota Bengkulu	Gading Cempaka	Cempaka Permai	14	1	Perhitungan ulang kotak suara DPR RI, DPR Provinsi, DPR Kota /Kab karena suara caleg di hitung dan dimasukan ke suara partai, PU ini di mulai pada pukul 22.00 wib
4	Senin, 22 April 2019	Kota Bengkulu	Muara Bangkahu	Kandang Limun	5	1	Perhitungan Suara Ulang untuk Kotak DPR RI, dikarenakan ada kesalahan dari KPPS dimana jumlah suara sah melebihi jumlah Hak Pilih, KPPS ketika melakukan perhitungan suara caleg di hitung juga ke dalam suara partai, sehingga terjadi penumpukan di suara partai yang menghasilkan lebihnya suara sah dibandingkan jumlah hak pilih, terjadi kesalahan hitung juga ada pada DPRD Povinsi dan DPRD Kota, namun setelah mengetahui dari sample kotak DPR RI, maka untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kota tanpa harus

							dilakukan Perhitungan Ulang, cukup dengan menggunakan rumus saja.
5	Sabtu, 20 April 2019	Bengkulu	Ratu Agung	Lempuing	4	1	Terjadi kesalahan penghitungan suara DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota, karena setiap hasil perolehan suara caleg dihitung juga menjadi suara partai yang menyebabkan hasil perolehan suara menjadi membengkak
6	Sabtu, 20 April 2019	Bengkulu	Ratu Agung	Nusa Indah	2	1	Terjadi kesalahan penghitungan suara DPR RI, karena setiap hasil perolehan suara caleg dihitung juga menjadi suara partai yang menyebabkan hasil perolehan suara menjadi membengkak
7	Rabu, 24 April 2019	BENGKULU	Ratu Agung	Sawah Lebar	2	1	Tidak sesuai antara jumlah data pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan, jumlah suara sah dan tidak sah di C1 maupun di C1 Plano sehingga dilakukan penghitungan ulang
Total							7

Tabel 30. Penghitungan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Bengkulu Utara

No	Hari/tanggal Penghitungan Ulang (PU)	Kab/ Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	No TPS	Total TPS	Alasan Penghitungan Ulang (PU)
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Minggu, 21 April 2019	Bengkulu Utara	Air Padang	Suka Rami	1	1	keberatan dari saksi parpol di karenakan jumlah suara sah di tps 1 Desa sukarami kecamatan Air Padang untuk suara DPR,DPRD PROVINSI dan DPRD kabupaten melebihi jumlah pemilihan yang ada.jadi para saksi partai menyampaikan keberatan dan meminta untuk melakukan penghitungan ulang.
2	Kamis, 25 April 2019	Bengkulu Utara	Arga Makmur	Gunung Agung	2	1	Ditemukannya rekapitulasi untuk sura sah dan tidak sah DPR RI tidak sinkron antara arsip C1, C1 Hologram, Salinan C1 Saksi, Salinan C1 Panwaslu dan C1 Plano. Saksi mengajukan keberatan untuk melakukan penghitungan ulang.
3	Sabtu,20 April 2019	Bengkulu Utara	Air Napal	Tepi Laut	2	1	surat suara DPR RI adanya perbedaan data antara jumlah data sah dan tidak sah dengan seluruh data surat suara yang memiliki selisi satu dari total surat suara keseluruhan.
4	Minggu,21 April 2019	Bengkulu Utara	Air Napal	Pasar Tebat	1	1	surat suara DPRD Provinsi adanya perbedaan data jumlah surat suara sah pada C1 plano dan C1 Hologram partai PDIP.
5	Senin,22 April 2019	Bengkulu Utara	Air Napal	Tebing Kandang	2	1	surat suara DPRD Kabupaten adanya perbedaan total jumlah surat suara Caleg no urut 2 pada C1 plano dan C1 Hologram partai Golkar
6	Minggu, 21 April 2019	Bengkulu Utara	Batiknau	Durian Amparan	4	1	Perbedaan hasil jumlah surat suara sah dan tidak sah antara C1 Hologram dan salinan dengan jumlah statistik perolehan suara calon. Hasil perolehan suara dan jumlah seluruh suara sah berbeda 2 suara
7	Senin, 22 April 2019	Bengkulu Utara	Batiknau	Ulak Tanding	2	1	Suara sah DPR RI berbeda antara hitungan statistic dengan C1 Hologram dan salinan. Terdapat suara sah DPR RI yang tidak tertulis di dalam C1 Hologram dan salinan.

8	Senin, 22 April 2019	Bengkulu Utara	Air Besi	Lubuk Balam	2	1	Karena terdapat bekas penghapus yang menggunakan Tipe-x pada C1 Plano, sehingga menimbulkan kecurigaan dari para saksi.
TOTAL							8

• **KABUPATEN LEBONG**

No	Hari/ tanggal Peng hitungan Ulang(PU)	Kabu paten/ Kota	Keca matan	Kelu rahan/ Desa	No TPS	Total TPS	Alasan Penghitunga Ulang (PU)
1	Kamis/ 25 April 2019	LEBONG	LEBONG UTARA	DESA TUNGGANG	5	1	Karena ada kelebihan suara di TPS 05 Desa Tunggang dari salinan C1 yang diterima panwaslu dan saksi ada selisih 2 suara, ketika di sinkronkan dengan C1 Hologram dan C1 Plano juga belum sinkron, lalu saksi meminta untuk melakukan penghitungan surat suara ulang untuk pemilihan DPRD provinsi, setelah itu barulah ditemukan surat suara tidak sah yang masuk kedalam sampul surat suara sah.
2	Selasa/ 23 April 2019		PELABAI	DESA TIK TELEU	1	1	Hitung ulang untuk pemilihan DPR RI dikarenakan jumlah suara Sah + Tidak Sah yang ada di C-Plano, C1-Hologram dan salinan C1 Panwaslu serta saksi tidak Valid / tidak Sama dengan Jumlah pengguna hak pilih dan pengguna hak surat suara, dari hasil penghitungan ulang tersebut dari jumlah suara tidak sah dengan jumlah 53 suara ternyata hasil yang ditemukan hanya 51.

3	Rabu/ 24 April 2019		PELABAI	SUKAU DATANG	1	1 Hitung Ulang untuk pemilihan DPRD Provinsi dikarenakan jumlah suara sah + tidak sah yang ada di C-Plano, C1-hologram dan salinan C1 Panwaslu serta saksi tidak Valid / tidak Sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan pengguna hak surat suara. dengan jumlah suara sah dari seluruh Partai dan Calon 160 dan suara tidak sah 48 sedangkan Pemilih hanya 206, dari hasil penghitungan ulang surat suara tersebut ditemukan jumlah suara sah dari Partai NASDEM jumlah suara sah Partai yang sebelumnya 2 menjadi Tiga, sedangkan calon nomor urut 1 dari Partai yang sama yang sebelumnya memperoleh hasil suara sah yang sebelumnya 10 menjadi 9, dan dari Partai Solidaritas Indonesia calon nomor urut 5 yang sebelumnya memperoleh suara sah 2 ternyata Nol (0).
---	------------------------	--	---------	--------------	---	--

Tabel 31. Penghitungan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Seluma

No	Hari/ tanggal Peng hitungan Ulang (PU)	Kab/ Kota	Keca matan	Kelu rahan/ Desa	No TPS	Total TPS	Alasan Penghitungan Ulang (PU)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Minggu, 21 April 2019	Seluma	Lubuk Sandi	Talang Kebun	2	1	Dikarnakan adanya ketidak sinkronan antara C1 salinan dan C1 Hologram yang akhirnya diputuskan unruk membuka C1 Plano, setelah dibuka ternyata ada kesalahan pada salah C1 salinan. Dan permasalahan timbul pada surat suara yang tidak sah terdapat ketidak sinkronan pennghitungan pada C1 Plano yang mengakibatkan mengelembung 1 suara. akhirnya Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk menghitung kembali surat suara tidak sah.
2	Kamis, 25 April 2018	Seluma	Lubuk Sandi	Padang Capo Ilir	1	1	Dikarnakan adanya kesalahan penulisan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Laki-laki, yaitu pada C1 Salinan dan C1 Plano berjumlah 77 orang setelah dilakukan pengecekan pada C7 (daftar hadir)
							ternyata pemilih laki-laki berjumlah 78 orang. Dikarnakan perbedaan tersebut berakibat pada jumlah Surat Suara yang digunakan yang berpengaruh pada perolehan jumlah suara. Maka Panwaslu Kecamatan merekomendasikan untuk menghitung kembali Surat Suara.

Tabel 32. Penghitungan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Bengkulu Utara

No	Hari/ tanggal Penghitu ngan Ulang (PU)	Kab/ Kota	Kecam atan	Kelu rahan/ Desa	No TPS	Total TPS	Alasan Penghitun gan Ulang (PU)	PERBEDAAN PEROLEHAN HASIL SUARA	
								SALINA N C1	CI PLANO
1	Minggu, 21 April 2019	MUK OMU KO	KOTA MUKOM UKO	Tanah Harapa n	3	1	Terjadi kesalahan penulisan dijumlah pengguna hak pilih DPTb yang tertulis laki-laki 2 dan perempuan 1, yang seharusnya laki-laki 0 perempuan 0. Telah diperbaiki, dengan membuat/ mengisi kejadian khusus Form DA.2-KPU yang diparaf oleh Ketua PPS dan disaksikan oleh Saksi. Untuk surat suara DPR RI terdapat perbedaan penjumlahan pada suara sah tertulis 134 yang seharusnya 136. Ada kemungkinan berkurang di surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru coblos, atau penjumlahan surat suara yang tidak sah atau jumlah surat suara yang digunakan. Panwaslu Kecamatan Kota Mukomuko merekomendasikan untuk membuka C1 Plano DPR RI setelah membuka C1 Plano masih ditemukan ketidaksesuaian jumlah seperti diatas. Panwascam merekomendasi buka surat suara tidak sah setelah surat suara tidak sah dibuka jumlah masih tetap 54 sama seperti yang	136	134

					<p>tertulis dalam C1 Plano, kemudian Panwascam merekomendasikan untuk membuka surat suara yang tidak terpakai setelah dibuka jumlah sama seperti yang tertulis dalam C1 Plano. Kemudian Panwascam merekomendasikan membuka daftar hadir (C.7) DPT berjumlah 180 dan DPK berjumlah 9 tetapi yang hadir 8 jadi total 188 sesuai dengan C1 Plano. Sehubungan titik permasalahan belum ditemukan akhirnya Panwascam merekomendasikan hitung ulang, didalam surat suara sah terdapat 2 surat suara yang tidak sah dikarenakan surat suara tersebut tidak ditanda tangani oleh Ketua KPPS. setelah dilakukan hitung ulang akhirnya statistik nya ketemu, surat Sah sebanyak 132 dan surat tidak sah sebanyak 56 jadi jumlah keseluruhan sebanyak 188.</p>		
					<p>Terjadi perbedaan antara jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 183 sedangkan jumlah pengguna hak pilih 188 tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan, Panwaslu Kecamatan Kota Mukomuko merekomendasi PPK untuk membuka C1 Plano, menghitung surat suara</p>	183	183

						tidak sah, menghitung jumlah suara sah dan menghitung ulang seluruh surat suara sah. Dalam proses penghitungan ulang ditemukan 5 surat suara yang sah yg tidak ditanda tangani oleh ketua KPSS dan dinyatakan surat suara tersebut tidak sah. Sehingga dalam penghitungan ulang jumlah keseluruhan menjadi valid. dengan hasil suara sah 170 dan suarah tidak sah 18 jumlah seluruh suara sah dan tidak sah berjumlah 188 Diperbaiki diparaf oleh Ketua PPS dan saksi masalah selesai.		
2	Jum'at, 26 April 2019		KEL.KO TO JAYA	4	1	Terjadi kesalahan hasil penjumlahan suara sah, suara tidak sah dan suara tidak terpakai tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang diterima, Panwaslu Kecamatan Kota Mukomuko merekomendasikan untuk membuka C1 Plano, suara tidak sah, C7 Daftar hadir, suara tidak terpakai, suara sah dan menghitung ulang seluruh surat suara. Dalam proses penghitungan ulang ditemuka 3 surat suara yang sah tetapi tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS maka dinyatakan surat suara tersebut tidak sah. Hasil akhir penghitungan jumlah suara yang diterima 220, dengan rincian surat suara sah 186, surat suara tidak sah 28	214	214

					serta surat suara yang tidak terpakai/digunakan sebanyak 6. Perubahan akibat suara suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS sebagai berikut: Nomor Urut 27 a.n. Dra Eni Hairani, M.Si 18 menjadi 17 dan Nomor Urut 29 a.n. DR. Ir. Hermen Malik, Msc 86 menjadi 84. C1 Hologram dan C1 Plano diperbaiki dan diparaf oleh Ketua PPS dan saksi.		
					Terjadi perbedaan penjumlahan surat suara sah, C1 Hologram dan C1 salinan yang berjumlah 198 sedangkan penjumlahan manual berjumlah 200, Panwaslu Kecamatan Kota Mukomuko merekomendasikan membuka C1 Plano setelah C1 Plano dibuka hasilnya pun sama berjumlah 198 dan hasilnya pun belum diketahui. Proses berlanjut dengan menghitung jumlah surat suara tidak digunakan berjumlah 8, surat suara tidak sah berjumlah 9 dan surat suara sah 198 jadi jumlah keseluruhan berjumlah 215, dalam proses penghitungan surat suara sah terdapat 1 surat suara yang tidak ditanda tangani oleh ketua KPPS. Hasil nya pun belum diketahui dan proses dilanjutkan dengan penghitungan surat suara ulang yang meliputi suara sah, suara tidak sah, suara	198	198

						yang dikembalikan dan suara yang tidak digunakan dapat disimpulkan menjadi: Jumlah surat suara yang diterima berjumlah 215, surat suara yang dikembalikan berjumlah 1, surat suara yang tidak terpakai 8, surat suara yang digunakan berjumlah 206, surat suara sah berjumlah 197 dan surat suara tidak sah berjumlah 9. Jumlah surat suara sah ditambah dengan jumlah surat suara tidak sah berjumlah 206. C1 Plano dan C1 Hologram diperbaiki dan diparaf oleh Ketua PPS dan saksi masalah selesai.		
3	senin/ 22-04- 2019	XIV KOYO	RAWA BANGU N	2	1	penjumlahan tidak sesuai pada perolehan suara DPD no urut 30	13	14
						penjumlahan tidak sesuai pada perolehan suara DPD no urut 31	44	43
						perolehan suara sah caleg paratai golkar no.urut 1 tertulis 1 seharusnya 0	21	22
4	minggu/ 21-04- 2019	XIV KOYO	TANJU NG MULYA	5	1	mengitung jumlah kertas suara sah dan tidak sah		
						selisih 1 suara pada caleg partai PAN a/N Dewi coryati. Sebelumnya suara dewi coryati sebanyak 4 suara, Setelah di hitung ulang menjadi 5 suara.	4	5
						untuk mencari selisih suara dimna C1 salinan hologram jumlah suara sah 241 tedapat selisih 11 suara yg seharusnya 230	241	230

5			SELAGAN RAYA	SUNGA I IPUH DUA	3	1	Pada CI DPR RI TPS 3 jumlah suara sah yg seharusnya 112 tertulis 111 dan suara tidak sah tertulis 54, jumlah suara sah dan tidak sah tertulis 165 sesuai dengan jumlah surat suara yg di gunakan. atas rekomendasi panwascam selagan raya maka kotak suara DPR RI di bukak dan di hitung ulang, dan setelah di hitung ulang ternyata jumlah suara sah sebanyak 112 dan tidak sah 53.		
6	Minggu, 21 April 2019		TERAS TERUNJA	Setia Budi	1	1	Jumlah Susu sah kurang 1 DPR dari jumlah Susu sah 140	140	140
7	Minggu, 21 April 2019		M	Pondok Kopi	3	1	kesalahan hitung dan pemisahan Susu rusak dan susu tidak terpakai	29	30
8	Selasa 22 April 2019		IPUH	SIBAK	2	1	Tidak sinkron jumlah surat suara sah dan tidak sah, direkomendasikan menghitung surat suara sah	tidak merubah hasil suara	tidak merubah hasil suara
				MEDAN JAYA			Tidak sinkron jumlah surat suara sah dan tidak sah, direkomendasikan menghitung surat suara tidak sah	tidak merubah hasil suara	tidak merubah hasil suara
					1,2		Tidak sinkron jumlah surat suara sah dan tidak sah, direkomendasikan menghitung surat suara tidak sah	tidak merubah hasil suara	tidak merubah hasil suara
				PULAI PAYUNG	2	1	Tidak sinkron jumlah surat suara sah dan tidak sah, direkomendasikan menghitung surat suara sah	tidak merubah hasil suara	tidak merubah hasil suara

			PULAU BARU	2	1	Tidak sinkron data Pemilih dan Pengguna hak Pilih dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, direkomendasikan menghitung surat suara tidak sah	tidak merubah hasil suara	tidak merubah hasil suara
			TANJUNGPANG HARAPAN	2	1	Tidak sinkron jumlah surat suara sah dan tidak sah, direkomendasikan menghitung surat suara tidak sah	tidak merubah hasil suara	tidak merubah hasil suara
			RETAKILIR	2	1	Tidak sinkron jumlah surat suara sah dan tidak sah, direkomendasikan menghitung surat suara tidak sah	tidak merubah hasil suara	tidak merubah hasil suara
			LUBUK TALANG	1	1	Tidak Ditemukan C1 Plano Partai, HANURA, BULAN BINTANG, DEMOKRAT, PKPI	Tidak ada perbedaan	tidak ada perbedaan
9	RABU / 24 APRIL 2019		AIR BIKUK	1	1	Terdapat kekeliruan Penjumlahan Suara dan Tidak sah Parpol dan Calon untuk pemilihan DPRD Kab/Kota dari Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK tetapi dalam salinan C1 dan C1 Plano Total sama	169	169
10	MINGGU / 21 APRIL 2019	PONDOK SUGUH	AIR BERAU	3	1	Tidak sinkron Hasil Perolehan Suara dan Tidak sah untuk Parpol dan Calon dalam salinan C1 KPPS Desa Air Berau Untuk Pemilihan DPRD Kab/Kota dari Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK tetapi Total Pada salinan c1 dan C1 Plano sama	139	139
11	SABTU / 20 APRIL 2019		PONDOK SUGUH	3	1	Terdapat selisih 1 Jumlah Suara dan Tidak sah Untuk Pemilihan DPRD Prov dari Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK	168	169

12	SELASA / 23 APRIL 2019		TUNGG ANG	6	1	Terjadi kekeliruan Penjumlahan dari pengguna Hak Pilih dalam DPK dan Kesalahan Penulisan Suara Sah Pada Parpol GARUDA untuk jumlah Total pada salinan c1 dan C1 Plano sama	261	261
13	RABU / 24 APRIL 2019		AIR HITAM	4	1	Terjadi Kesalahan dalam Penjumlahan Suara Sah dan Tidak Sah untuk Pemilihan DPRD Provinsi dari Pengguna Hak Pilih dalam DPT, DPTb dan DPK Tetapi dalam Salinan C1 dan C1 Plano Jumlah total sama 228	228	228
14	SENIN / 22 APRIL 2019		SINAR LAUT	2	1	Terdapat Kekeliruan penjumlahan Suara Tidak Sah dalam salinan c1 dengan C1 Plano pada pemilihan DPR RI untuk pemilih yang menggunakan Hak pilihnya dalam DPT, DPTb dan DPK tetapi Jumlah Total sama	177	177
TOTAL								21

G. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN ASN

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Bahwa dalam Peraturan BAWASLU RI No. 6 tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Sipil Negara , Anggota, Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Perencanaan Pengawasan

Perencanaan pengawasan dilakukan dengan melakukan identifikasi terkait potensi ASN yang tidak netral dan berdasarkan hal tersebut menjadi fokus dalam melakukan pengawasan terkait netralitas ASN. Pengerahan ASN oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka memenangkan partai politik tertentu menjadi tingkat kerawanan yang harus diawasi. Mengikuti rakor yang dilaksanakan BAWASLU RI.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Mengirimkan surat himbauan kepada instansi, kantor-kantor terhadap larangan dan sanksi-sanksi ASN apabila terlibat dalam berpolitik. Surat himbauan Nomor : 009/K.BE/PM.01.00/II/2019 perihal tentang Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA secara Serentak di seluruh Kabupaten se-Provinsi Bengkulu. Dan Surat himbauan nomor 085/BAWASLU PROV BE/ PM.01/5/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal himbauan netralitas ASN yang disampaikan kepada Plt Gubernur Bengkulu, Kepala OPD se-Provinsi Bengkulu, Kakanwil se-Provinsi Bengkulu, Rektor PTN se-Provinsi Bengkulu.

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan netralitas ASN sehingga mewujudkan Pemilu yang jujur dan non partisan. Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan himbauan baik secara langsung pada saat menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain, maupun dalam bentuk surat dan himbauan.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, ditemukan ada ASN yang diduga terlibat dalam kampanye. Kemudian Bawaslu Bengkulu Utara melakukan Klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Yang bersangkutan adalah ASN Dinas Kesehatan Bengkulu Utara. Kemudian Bawaslu Bengkulu Utara membuat surat Ke KASN untuk memberikan sanksi “hukum sedang” kepada yang bersangkutan dan surat tersebut sudah diserahkan kepada Pemda Bengkulu Utara selaku Pembina kepegawaian yang bersangkutan.

b. Rekomendasi

Memberikan rekomendasi kepada KASN untuk memberikan sanksi kepada pegawai Dinas Kesehatan Bengkulu Utara.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

KASN memberikan sanksi sedang kepada yang bersangkutan dan suratnya sudah diberikan kepada Pemda Bengkulu Utara.

4. Dinamika dan Permasalahan

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Bawaslu Provinsi Bengkulu Pelaksanaan Non Tahapan ASN masih adanya ketidaktahuan ASN mengenai regulasi tentang Pemilihan Umum serta ASN

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dalam evaluasi pelaksanaan Pengawasan dengan adanya melakukan pengawasan secara langsung disetiap tahapan maka tidak ada temuan dan laporan terkait keterlibatan ASN yang ikut serta didalam Kampanye atau ikut serta berpolitik diwilayah Kota Provinsi Bengkulu.

H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan dan IKP

Dalam tahapan pengawasan politisasi sara yang tergolong dari Ras, Suku, dan Agama, maka Bawaslu Provinsi Bengkulu membuat surat himbuan Nomor : 009/K.BE/PM.01.00/II/2019 perihal tentang Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA secara Serentak di seluruh Kabupaten se-Provinsi Bengkulu.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Provinsi Bengkulu telah melakukan pengawasan langsung terkait kegiatan kampanye yang terkait kepada Isu SARA dan memantau media cetak dan media sosial.

2. Kegiatan Pengawasan

Kegiatan Pengawasan yang dilakukan dalam Non tahapan Pengawasan Politik Uang.

c. Pencegahan

Dengan melakukan sosialisasi yang disampaikan kepada banyak pihak terkait. Dan mengintruksikan ke Bawaslu Kabupaten/Kota segala aturan yang berkaitan dengan aturan yang berlaku berkenaan pencegahan tindakan money politic.

d. Aktivitas Pengawasan:

1) Pengawasan Patroli Politik Uang dan Massa Tenang

Kegiatan Patroli Pengawasan Anti politik uang diawali dengan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pada tanggal 12 April 2019, Pukul 08.00 Wib. Kegiatan Apel Patroli Pengawasan diikuti oleh seluruh staf Bawaslu Provinsi, Anggota Bawaslu dan Staf Bawaslu Kota Bengkulu dan seluruh Panwascam dan Pengawas Desa/Kelurahan se-Kota Bengkulu. Yang menjadi pembina pada Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang ini yaitu Bapak Ediansyah Hasan, S.H, M.H (Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu) dan yang bertugas sebagai Pemimpin Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang yaitu Zait Sanjani Midun (Pengawas Kelurahan Panorama Bengkulu). Kegiatan Apel Patroli Pengawasan Anti

Politik Uang ini dilaksanakan di seluruh Indonesia, dimana Patroli Pengawasan ini dilaksanakan untuk menyatakan kesiapan Bawaslu dalam melaksanakan Pengawasan Masa Tenang dan hari Pemungutan dan Perhitungan Suara. Dimana kegiatan Apel Patroli Pengawasan Anti Politik Uang pertama kali didalam sejarah Pemilihan Indonesia Pemilihan Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden akan dipilih secara serentak.

2) Pengawasan di Masa Tenang.

Memasuki hari Masa tenang jelang pemilu pada 17 April 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng tim gabungan dari Satpol PP, melakukan penertiban hingga pencopotan terhadap sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpampang di sejumlah titik jalan pada Minggu pagi 14 April 2019. Selama masa tenang peserta pemilu dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apa pun. Masa tenang berlangsung selama tiga hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pada tanggal 13 – 14 April 2019 Anggota Bawaslu provinsi Bengkulu Dodi Herawasyah, S.Pd.,M.M. Melaksanakan Supervisi dan Patroli Pengawasan menghadapi masa tenang dan Tahapan Punggut Hitung di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada tanggal 14-15 April 2019 Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Parsadaan Harahap,S.P.,M.Si Melakukan Supervisi Patroli Pengawasan Anti Politik di Kabupaten rejang Lebong. Pada tanggal 15-16 April 2019 Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Patimah Siregar, S.Pd., M.Pd Melakukan Supervisi Pengawasan Patroli Anti Politik Uang di Kabupaten Kaur.

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Tidak ada temuan pada pelaksanaan Non tahapan Pengawasan Politik Uang

b. Penanganan Pelanggaran

Tidak ada Penanganan Pelanggaran pada pelaksanaan Non tahapan Pengawasan Politik Uang.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Tindaklanjut Rekomendasi pada pelaksanaan Non tahapan Pengawasan Politik Uang.

4. Dinamika dan Permasalahan

Tahapan kampanye sering terjadi politik uang tetapi dalam pengawasannya Bawaslu kesulitan dalam menemukan pelanggaran politik uang dikarenakan pelaku dalam politik uang susah untuk di cari informasinya karena pihak-pihak penerima tidak mau memberika laporan ataupun memberikan informasi-informasi terkait dugaan pelanggaran politik uang.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dengan adanya melakukan pengawasan secara langsung dan disetiap tahapan maka tidak ada temuan dan laporan terkait dengan politik uang.

I. PELAKSANAAN NON TAHAPAN PENGAWASAN POLITIK SARA

1. Pelaksanan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanna dan IKP

Indek kerawanan Provinsi Bengkulu berada dalam kategori kerawanan sedang 50,37, kerawanan Pemilu tahun 2019 yaitu adanya Pihak tertentu yang menyarankan untuk memilih calonatas dasar golongan agama dan ras. Dan menyebarkan berita atau informasi tidak benar (bonong) sehingga menyerankan untuk memilih salah satu peserta Pemilu lainnya kepada masyarakat.

b. Perencanaan pengawasan

Untuk pencegahan maraknya isu Politik Sara maka bawaslu provinsi Bengkulu membuat strategi perencanaan sebagai berikut :

- 1) Surat himbauan Nomor : 009/K.BE/PM.01.00/II/2019 perihal tentang Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA secara Serentak di seluruh Kabupaten se-Provinsi Bengkulu.
- 2) Bawaslu Provinsi Bengkulu mengadakan kegiatan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang , Politisasi sara dan untuk pilkada 2018 berintegrasi .

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Dalam hal pencegahan bawaslu Provinsi Bengkulu telah membuat surat himbauan dan telah menggelar deklarasi tolak politisasi sara.

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam hal pengawasan, bawaslu provinsi Bengkulu telah melakukan pengawasan politisasi sara dengan pengawasan melekat terkait kampanye yang di lakukan oleh peserta pemilu.

3. Hasil-hasil pengawasan

a. Temuan

Selama proses tahapan tidak didapat temuan

b. Penanganan pelanggaran

Tidak ada penangan pelanggaran terkait politisasi sara

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Tidak ada tindaklanjut Rekomendasi yang terkait dalam Politisasi Sara.

4. Dinamika dan Permasalahan

Dinamika dan permasalahan dalam politisasi sara ialah tidak terpantau menyeluruhnya politisasi sara yang terkadang terjadi di sosial media.

5. Evaluasi pelaksanaan pengawasan

Pelaksanaan pengawasan terkait Politisasi SARA dengan mengadakan sosialisasi secara berkala, langsung dan melekat kepada masyarakat berkenaan dengan ISU SARA dan HOAX yang dijadikan pihak tertentu untuk

kepentingan pribadi atau golongan. Dan melakukan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan kepentingan Kepemiluan untuk mencegah agar tidak berkembangnya Politisasi SARA diwilayah Provinsi Bengkulu.

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 adalah penyelenggaraan pemilulegislatif dengan eksekutif yang dilakukan secara bersamaan. Pemilu ini menjadi pemilu pertama dimana pemilu legislatif dan pemilu presiden serentak dalam satu hari, tentu hal ini membuat kinerja penyelenggara dan pengawas pemilu lebih ekstra dalam proses penyelenggran maupun

pengawasan, disisi lain pemilu serentak banyak manfaat antara lain efiritipitas waktu, anggran, kelemahan tentu juga banyak antara lain kesalahan rekapitulasi, karena KPPS harus bekerja dengan 5 surat suara.

Pembahasan mengenai Pemilu mempunyai lingkup yang luas, setidaknya mencakup aktor Pemilu, sistem Pemilu, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum Pemilu. Melalui pengkajian ini, tim berfokus pada pengawasan pemilu disetiap tahapan, hasil dari laporan akhir dapat kami simpulkan bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam proses pengawasan pemilu, tahapan perencanaan masih banyak kekurangan antara lain regulasi, alat kerja. Tahapan aktivitas pengawasan masih lemahnya pengarsipan data, dokumentasi dan surat menyurat, hal ini menjadi acuan untuk pemilu selanjutnya agar lebih terencana, terseusun dan efektif. Selanjutnya rapat kerja atau rapat teknis belum sinkron dengan kegiatan di Bawaslu Provinsi, hal ini membuat jadwal yang tumburan dan perencanaan rakor pengawasan didaerah terganggu.

B. REKOMENDASI

a. Perbaikan Regulasi

Dalam hal rekomendasi perbaikan regulasi, hendaknya penyusunan regulasi, SE, petunjuk teknis serta alat kerja keluar sebelum tahapan berlangsung agar dalam hal pengawasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menjadikan regulasi sebagai landasan dan acuan, adapaun masukan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Bengkulu terkait regulasi antara lain :

-
1. Perbawaslu yang keluar setelah tahapan berakhir, contoh perbawaslu terkait pendataran dan verifikasi partai politik perbawaslu keluar setelah tahapannya selesai
 2. Perbawaslu tentang pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik baru dikeluarkan pada akhir Januari 2018 pasca putusan MK, sedangkan pengawasan sudah dimulai pada bulan Oktober 2017

b. Perbaikan Penyelenggara Tahapan Perbaikan Teknis Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilaksanakan kami Bawaslu provinsi memberikan masukan-masukan dalam rangka perbaikan penyelenggaran tahapan perbaikan kedepan, perbaikan teknis pengawasan antara lain :

- a. Pengirim laporan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Link Aplikasi hal menjadi kendala bagi Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk melakukan cek dan ricek hasil pengawasan
- b. Keterlambatan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengirim Laporan
- c. Alat kerja yang dibuat oleh Bawaslu Republik Indonesia menjadi panduan dan Alat ukur dalam melakukan Pengawasan Setiap tahapan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan Permintaan Laporan dari Bawaslu RI terkadang tidak sesuai dengan jadwal.
- d. Alat kerja, SE, regulasi hendaknya keluar sebelum tahapan
- e. Akurasi data dari PDK, Kecamatan belum sinkron
- f. Masih lemahnya sdm di level bawah
- g. Di level bawah belum mampu membuat inventaris masalah
- h. Pemahaman regulasi yang masih lemah
- i. Kurangnya bimbingan teknis khusus pada tahapan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik tahun 2019
- j. Alat kerja pengawasan disampaikan pada waktu masuknya tahapan.
- k. Pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon anggota DPD di Provinsi Bengkulu hendaknya langsung bertemu dengan yang bersangkutan sehingga dapat dikonfirmasi dukungan yang diberikan

-
- I. Terkait pengawasan, BawasluProvinsi Bengkulu sebaiknya mengadakan BIMTEK terkait pengawasan kepada Koordinator divisi dan staf se-Kabupaten/Provinsi Bengkulu sehingga terjadi keseragaman baik dalam teknis atau pelaporan pengawasan.